

PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGKA



Papua

2020



Kementerian PPN/
Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(BAPPENAS)



KATA PENGANTAR

Buku Profil Pembangunan Daerah Dalam Angka (PDDA) 2020 merupakan salah satu materi publikasi yang disusun oleh Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Deputi Bidang Pengembangan Regional. Penyusunan Buku PDDA ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi dan perkembangan hasil pembangunan antardaerah dalam unit provinsi di wilayah Papua.

Buku PDDA 2020 ini menyajikan data dan informasi kondisi terakhir dan perkembangannya dalam periode 5 tahun terakhir dari Indikator-indikator pembangunan sebagai berikut: (i) 5 (lima) Perkembangan Indikator Utama Pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio, (ii) Perkembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (iii) Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat (iv) Perkembangan Ekonomi Wilayah, (v) Perkembangan Infrastruktur Wilayah, (v) Pengembangan Wilayah, serta (vi) Informasi mengenai perkembangan penyebaran covid-19 dan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat berdasarkan data dan informasi yang terkumpul hingga awal November 2020.

Uraian dari setiap pembahasan dalam publikasi ini lebih menekankan terhadap metode penyajian informasi yang mudah dipahami, sehingga pembaca akan dimudahkan dalam memahami gambaran capaian dari hasil pembangunan setiap provinsi, keberbandingannya antarprovinsi dalam lingkup wilayah pulau dan nasional, serta keberbandingan antar tahun. Gambaran tersebut tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan, yaitu data-data yang bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi dari kementerian dan lembaga terkait.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan publikasi ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2020

Deputi Bidang Pengembangan Regional



TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D

Deputi Bidang Pengembangan Regional

PENANGGUNG JAWAB:

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D

Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana

TIM PENYUSUN :

Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc; Zulfakar, S.Kom, ME; Fidelity Silvana, SP. M.Int. Econ& F; Supriyadi, S.Si, MT;

Moh. Agung Widodo, SP, MIDEK ; Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT; Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom; Afini

Mahabas, SKom, MPA; Asep Sukmayadi, ST, MT

TIM AHLI:

Setya Agung Riyadi; Eka Lesniawati;

TIM PENDUKUNG:

Anna Astuti; Eni Arni; Sapto Mulyono; Samsudin

Donny Yanuar; Toni Hernandi, Sri Wulandari;.

Komentar, saran dan kritik dapat disampaikan ke:

Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Jl. TamanSuropati No. 2 JakartaPusat 10310

Telp/Fax. (021) 3193 4195

e-mail : dit.pw@bappenas.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
LAMPIRAN	
1. PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	2
1.1. Pertumbuhan Ekonomi	2
1.2. Pengangguran Terbuka	4
1.3. Kemiskinan	7
1.4. Indeks Pembangunan Manusia	8
1.5. Gini Ratio	9
2. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	12
2.1. Kependudukan	12
2.2. Ketenagakerjaan	13
3. PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT	19
3.1. Pendidikan	19
3.2. Kesehatan	23
3.3. Ekonomi Masyarakat	31
4. PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH	35
4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	35
4.2. Investasi PMA dan PMDN	39
4.3. Ekspor dan Impor	41
4.4. Perbankan	44
4.5. Pembangunan Sektor Unggulan	46
4.6. Perkembangan Keuangan Daerah	58

5.	PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	63
5.1.	Jalan	63
5.2.	Listrik	65
6.	PENGEMBANGAN WILAYAH	68
6.1.	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Wilayah Papua	68
6.2.	Pembangunan Daerah Tertinggal	72
7.	PERKEMBANGAN PENYEBARAN COVID-19 DAN DAMPAK TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT	78
7.1.	Penyebaran COVID-19	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2010 Provinsi Di Wilayah Papua Tahun 2015-2020, (dalam persen)	3
Tabel 2.	Perkembangan jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2020	5
Tabel 3.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Papua Tahun 2015-2020	5
Tabel 4.	Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Papua, Tahun 2020	6
Tabel 5.	Perkembangan Pengangguran terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di wilayah Papua pada tahun 2015 dan tahun 2020	7
Tabel 6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi di Perdesaan dan Perkotaan Periode 2015-2020	8
Tabel 7.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020	8
Tabel 8.	Perkembangan IPM, Ranking dan Reduksi <i>Shortfall</i> Antarprovinsi Tahun 2015-2019	9
Tabel 9.	Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 - 2020	10
Tabel 10.	Luas Wilayah dan Kependudukan Antarprovinsi di Wilayah Papua tahun 201	12
Tabel 11.	Perkembangan Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan <i>Dependency Ratio</i> Antarprovinsi di Wilayah Papua	12
Tabel 12.	Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi Di Wilayah Papua Periode 2015-2020	13
Tabel 13.	Penduduk Wilayah Papua Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Perdesaan-Perkotaan Tahun 2015 dan 2020	15
Tabel 14.	Penduduk Wilayah Papua Menurut Status Pekerjaan Utama dan Perdesaan-Perkotaan Tahun 2015 dan 2020	17
Tabel 15.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Antarprovinsi di wilayah Papua tahun 2015 - 2019	19
Tabel 16.	Perkembangan Angka Partisipasi sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019	20
Tabel 17.	Gambaran Rasio Murid-Guru, Murid-Rombel, Rombel-Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019 Di Wilayah Papua	21
Tabel 18.	Kondisi Bangunan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan TA. 2018/2019 Di Wilayah Papua	21
Tabel 19.	Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer dan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi	23

Tabel 20.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U Di Wilayah Papua Periode Tahun 2013 dan 2018	25
Tabel 21.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U di Wilayah Papua Periode Tahun 2013 dan 2018	26
Tabel 22.	Perkembangan Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/Tinggi Badan (TB) Di Wilayah Papua Periode Tahun 2013 dan 2018	26
Tabel 23.	Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis Antarprovinsi di Wilayah Papua Periode 2015-2019	27
Tabel 24.	Perkembangan Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau <i>Case Notification Rate</i> (CNR) Antarprovinsi di Wilayah Papua Periode 2015-2019	27
Tabel 25.	Perkembangan Kasus Baru HIV dan AIDS Tahun 2015 – 2019 di Wilayah Papua	28
Tabel 26.	Jumlah Puskesmas dan Rasio dengan Kecamatan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019	29
Tabel 27.	Jumlah dan Persentase Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019	30
Tabel 28.	Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk	31
Tabel 29.	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Disesuaikan Antarprovinsi Tahun 2015-2019	32
Tabel 30.	Persentase Pengeluaran Perkapita/Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Perdesaan/ Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019	33
Tabel 31.	Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2020, (dalam triliun rupiah)	35
Tabel 32.	Peran Ekonomi Wilayah Papua terhadap Perekonomian Nasional ADHB Tahun 2015-2020, (dalam persen)	35
Tabel 33.	Peran Ekonomi Provinsi Terhadap Perekonomian Wilayah Papua ADHB Tahun 2015-2020, (dalam persen)	35
Tabel 34.	Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (2010) menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019, (persen)	36
Tabel 35.	Perkembangan PDRB Perkapita ADHB menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019, (Rp. ribu/jiwa)	37
Tabel 36.	Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Wilayah Papua Tahun 2015-2020, Triwulan I, (dalam persen)	37
Tabel 37.	Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Wilayah Papua Tahun 2015-2020, Triwulan I, (persen)	37
Tabel 38.	Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi Di Wilayah Papua Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)	38
Tabel 39.	Sumber Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi Di Wilayah Papua Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)	38
Tabel 40.	Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Papua Tahun 2015-2020, Triwulan I, (persen)	38

Tabel 41.	Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)	39
Tabel 42.	Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi tahun 2020 dan Jagung serta Kedelai Tahun 2018 menurut Provinsi di Wilayah Papua	49
Tabel 43.	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Utama Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019	49
Tabel 44.	Penyebaran Produksi Tanaman Perkebunan Utama menurut Provinsi Di Wilayah Papua Tahun 2019	50
Tabel 45.	Populasi Ternak Besar menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2019. (ekor)	50
Tabel 46.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019, (Ribu ekor)	51
Tabel 47.	Perkembangan Perikanan Tangkap di Wilayah Papua Tahun 2014 dan 2018 Berdasarkan Provinsi (sdalam ton)	52
Tabel 48.	Perkembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Papua Tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi (dalam ton)	52
Tabel 49.	Jumlah Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2015-2019, (orang)	53
Tabel 50.	Jumlah Tamu Domestik pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2015-2019, (orang)	53
Tabel 51.	Jumlah Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2013-2018	54
Tabel 52.	Jumlah kamar Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2013-2018	54
Tabel 53.	Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi/Hotel Bintang dan Non-Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2014-2018	54
Tabel 54.	Perkembangan Jumlah Pendapatan dan Tenaga Kerja Industri Mikro-Kecil menurut Provinsi Di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019	56
Tabel 55.	Perkembangan PAD Antarprovinsi Antarprovinsi Tahun 2015-2019	59
Tabel 56.	Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Papua Tahun 2015-2019	59
Tabel 57.	Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	60
Tabel 58.	Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	61
Tabel 59.	Peta Kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019	62
Tabel 60.	Kualitas Jalan menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2018	64
Tabel 61.	Perkembangan Investasi KEK MBTK	69
Tabel 62.	Calon Investor Potensial di KEK MBTK	70
Tabel 63.	Realisasi Investasi di KEK Sorong	70
Tabel 64.	Status Terakhir KEK Sorong	71

Tabel 65.	Daerah Tertinggal di Wilayah Papua Tahun 2015-2019	72
Tabel 66.	Karakteristik Daerah Tertinggal di Wilayah Papua Tahun 2015/2019/2020	73
Tabel 67.	Perkembangan Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Papua Periode 2015-2020	75
Tabel 68.	Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Papua	79
Tabel 69.	Perkembangan Pengangguran Terbuka pada Periode Februari dan Agustus 2020	79
Tabel 70.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha dan Provinsi di Wilayah Papua	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Papua dan Nasional Tahun 2015-2020, (persen)	2
Gambar 2.	Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Papua Tahun 2015-2020, (persen)	3
Gambar 3.	Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2020, (dalam persen)	4
Gambar 4.	Perkembangan Pengangguran Terbuka dan TPT di Wilayah Papua Tahun 2015-2020	4
Gambar 5.	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Periode 2015-2020 di Wilayah Papua	5
Gambar 6.	Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Papua Tahun 2020	6
Gambar 7.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2015-2020 (Ribuan Jiwa)	7
Gambar 8.	Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2020 (Ribuan Jiwa)	7
Gambar 9.	Indeks Pembangunan Manusia Antarprovinsi pada Periode 2014-2019	9
Gambar 10.	Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Papua Barat dan Papua Periode 2015- 2020	10
Gambar 11.	Jumlah Penduduk dan <i>Dependency Ratio</i> Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2019	13
Gambar 12.	Perkembangan Angkatan Kerja di Wilayah Papua Menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2015-2020	14
Gambar 13.	Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi Menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2020	14
Gambar 14.	Penduduk Wilayah Papua menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020	14
Gambar 15.	Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Papua Tahun 2020	16
Gambar 16.	Penduduk Wilayah Papua menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020	16
Gambar 17.	Status Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Papua Tahun 2020	17
Gambar 18.	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Papua pada Tahun 2019	19
Gambar 19.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2019	20
Gambar 20.	Persentase Guru/kepala Sekolah Minimal Berijazah D4/S1 Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2018/2019	22
Gambar 21.	Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019	23

Gambar 22.	Angka Harapan Hidup (AHH) Antarprovinsid di Wilayah Papua Tahun 2015-2019	24
Gambar 23.	Persentase Balita Menurut Status Gizi Dengan Indeks Berat Badan (Bb)/ Umur (U) di Wilayah Papua Tahun 2018	24
Gambar 24.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) di Wilayah Papua Tahun 2018	25
Gambar 25.	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (TB)/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Papua Tahun 2018	26
Gambar 26.	Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis di Wilayah Papua Periode 2015-2019	27
Gambar 27.	Kasus baru HIV dan AIDS Kumulatif Tahun 2015-2019 Antarprovinsi di Wilayah Papua	28
Gambar 28.	Perkembangan Jumlah Puskesmas menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019	29
Gambar 29.	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Tahun 2019	29
Gambar 30.	Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Rumah Sakit menurut Provinsi Tahun 2019	30
Gambar 31.	Gambaran Tingkat Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas Antarprovinsi Tahun 2019	31
Gambar 32.	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Papua Menurut Kelompok Barang, Tahun 2015 dan 2019	33
Gambar 33.	Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah Papua ADHB Tahun 2015 dan 2020 Triwulan I, (dalam persen)	36
Gambar 34.	Struktur Perekonomian Provinsi di Wilayah Papua ADHB Tahun 2015-2020, (rata-rata dalam persen)	36
Gambar 35.	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) Wilayah Papua Tahun 2015-2019	39
Gambar 36.	Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMDN (%) menurut Wilayah dan Provinsi Tahun 2015-2019	40
Gambar 37.	Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US\$) Wilayah Papua Tahun 2015-2019	40
Gambar 38.	Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMA (%) menurut Wilayah dan Provinsi Tahun 2015-2019	41
Gambar 39.	Perkembangan Perdagangan Migas dan Non Migas Wilayah Papua dan Provinsi Tahun 2015-2019. (dalam juta US\$)	41
Gambar 40.	Perdagangan Migas dan Non Migas menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019. (rata-rata dalam persen)	42
Gambar 41.	Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Wilayah Papua Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)	42
Gambar 42.	Kontribusi Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 - 2019. (rata-rata dalam persen)	43
Gambar 43.	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non-Migas Wilayah Papua Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)	43

Gambar 44.	Perkembangan Kontribusi Nilai Impor Migas dan Non Migas Wilayah Papua Tahun 2015-2019, (dalam persen)	44
Gambar 45.	Perkembangan Nilai Pinjaman/Kredit dan Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Tahun 2015 – 2020 (Rp. Miliar)	44
Gambar 46.	Posisi Pinjaman/Kredit yang Diberikan Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi 2015-2019, (Rp. Miliar)	45
Gambar 47.	Rasio Pinjaman/kredit terhadap Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019, (Rp. Miliar)	45
Gambar 48.	Rasio Kredit Bermasalah terhadap Pinjaman/Kredit menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2019	46
Gambar 49.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Papua Tahun 2016-2020	46
Gambar 50.	Distribusi Produksi Padi menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2020	47
Gambar 51.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jagung di Wilayah Papua Tahun 2014-2018	47
Gambar 52.	Distribusi Produksi Jagung menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2018	48
Gambar 53.	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai di Wilayah Papua Tahun 2014-2018	48
Gambar 54.	Distribusi Produksi Kedelai menurut Wilayah dan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2018	49
Gambar 55.	Perkembangan Populasi Ternak Besar di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019, (dalam ribu ekor)	50
Gambar 56.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019, (ribu ekor)	51
Gambar 57.	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya berdasarkan Wilayah di Indonesia, (ton)	52
Gambar 58.	Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Provinsi Wilayah Papua, Tahun 2019-2020	55
Gambar 59.	Perkembangan Jumlah Industri Usaha Mikro-Kecil (IMK) Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019, (dalam unit)	56
Gambar 60.	Komposisi Perkembangan Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Indonesia Tahun 2017	57
Gambar 61.	Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Papua berdasarkan Provinsi Tahun 2017	57
Gambar 62.	Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Wilayah Papua berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017	57
Gambar 63.	Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Antarprovinsi Tahun 2015-2019	58
Gambar 64.	Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Papua Tahun 2015-2019	59

Gambar 65.	Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	60
Gambar 66.	Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019	61
Gambar 67.	Indeks kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019	62
Gambar 68.	Perkembangan Panjang Jalan menurut Kewenangan di Wilayah Papua Tahun 2015-2018, (dalam Km)	64
Gambar 69.	Perkembangan Energi yang Diproduksi di Wilayah Papua Tahun 2014-2018, (dalam GWh)	65
Gambar 70.	Komposisi Produksi Energi Listrik menurut Jenis Pembangkit di Wilayah Papua Tahun 2019, (dalam persen)	65
Gambar 71.	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Wilayah Papua Tahun 2016-2019, (dalam persen)	66
Gambar 72.	Rasio Elektrifikasi menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2019, (dalam persen)	66
Gambar 73.	Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Papua	68
Gambar 74.	Masterplan KEK Sorong	69
Gambar 75.	Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Papua periode 2015 - 2019	75
Gambar 76.	Alokasi Dana Desa dan Jumlah Desa menurut Daerah Tertinggal di Wilayah Papua pada Tahun 2019	75
Gambar 77.	Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Papua	78
Gambar 78.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III Wilayah Papua Tahun 2019 dan 2020	80
Gambar 79.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha di Wilayah Papua	81
Gambar 80.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Provinsi di Wilayah Papua	82
Gambar 81.	Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Triwulan I dan II menurut Provinsi di Wilayah Papua	83



PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA

- ❖ Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua periode 2015-2018 tumbuh positif, dan pada akhir 2019 berkontraksi dengan angka pertumbuhan -10,67 persen. Hal ini disebabkan sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi pada angka pertumbuhan sebesar -13,50 persen.
- ❖ Pada tahun 2020 Triwulan II bersamaan dengan periode pandemik Covid 19 pertumbuhan ekonomi wilayah Papua mampu tumbuh positif, yaitu sebesar 3,25 persen.
- ❖ Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Barat sebanyak 30.039 orang atau dengan TPT sebesar 6,20 persen, dan di Provinsi Papua sebanyak 66.296 orang atau dengan TPT sebesar 3,62 persen.
- ❖ Pengangguran terbuka di wilayah Papua sebagian besar berpendidikan terakhir SMU, dengan rincian di Provinsi Papua Barat mencapai 34,85 persen, dan di Provinsi Papua (32,53%).
- ❖ Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 26,64 persen dengan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 35,5 persen, dan Tingkat di Provinsi Papua Barat (21,37%) dengan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 32,7 persen.
- ❖ IPM Provinsi Papua Barat tahun 2019 mencapai 64,70 dan menduduki ranking ke-33 ditingkat nasional, sedangkan Provinsi Papua dengan IPM 60,84 menduduki ranking terendah di Indonesia (ke-34).
- ❖ Nilai koefisien Gini Ratio di Provinsi Papua Barat dan Papua pada tahun 2020, masih berada di atas gini rasio nasional (0,381), dengan nilai koefisien Gini Ratio tertinggi di Provinsi Papua (0,392) dan Papua Barat (0,382).



01

Perkembangan Indikator Utama Pembangunan

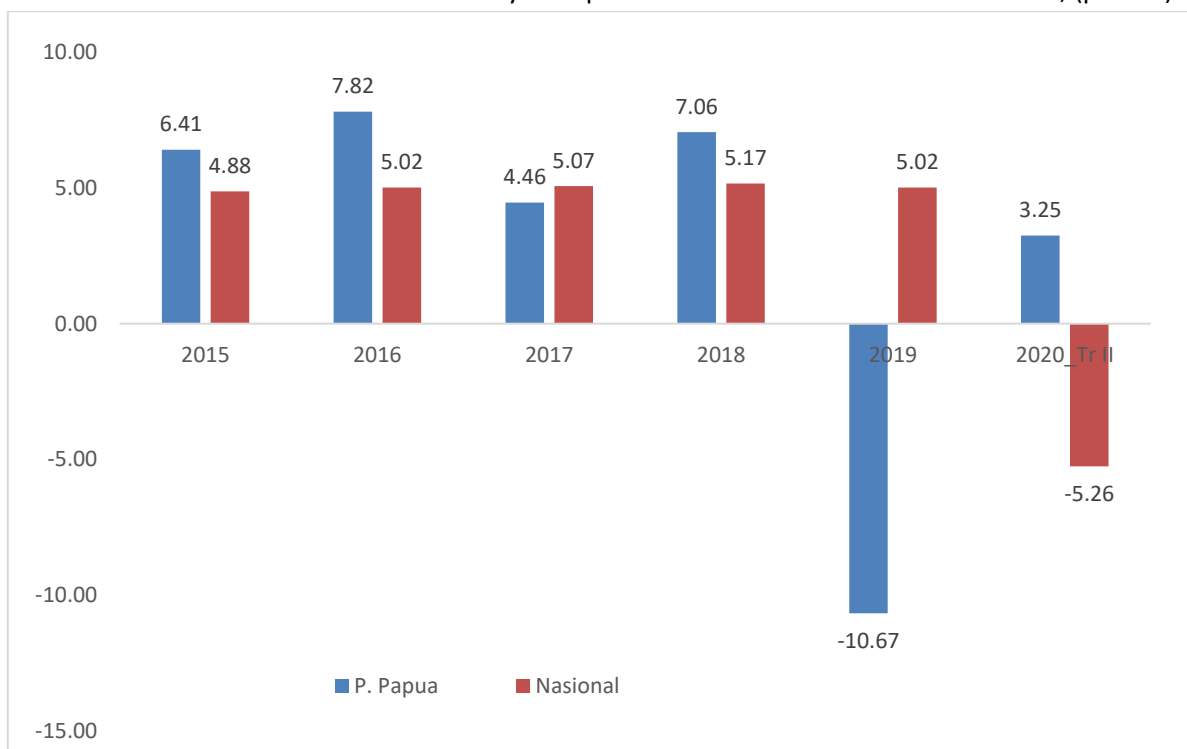


1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua periode 2015-2019 menunjukkan angka pertumbuhan yang fluktuatif, dimana 2015-2018 tumbuh positif, dan pada akhir 2019 berkontraksi dengan angka pertumbuhan -10,67 persen. Penurunan ekonomi yang cukup tajam pada tahun 2019 disebabkan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebagai penyumbang terbesar perekonomian wilayah Papua berkontraksi pada angka pertumbuhan sebesar -13,50 persen. Pada tahun 2020 Triwulan II bersamaan dengan adanya krisis pandemik Covid 19 memberikan dampak cukup signifikan terhadap penurunan kinerja ekonomi diberbagai wilayah, namun demikian pertumbuhan ekonomi wilayah Papua masih mampu tumbuh positif, yaitu sebesar 3,25 persen (**Gambar 1**). Sementara sektor yang memiliki andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Papua, yaitu sektor pertanian sebesar 0,53 persen, sektor konstruksi sebesar 0,57 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,53 persen (**Gambar 2**).

Gambar 1:

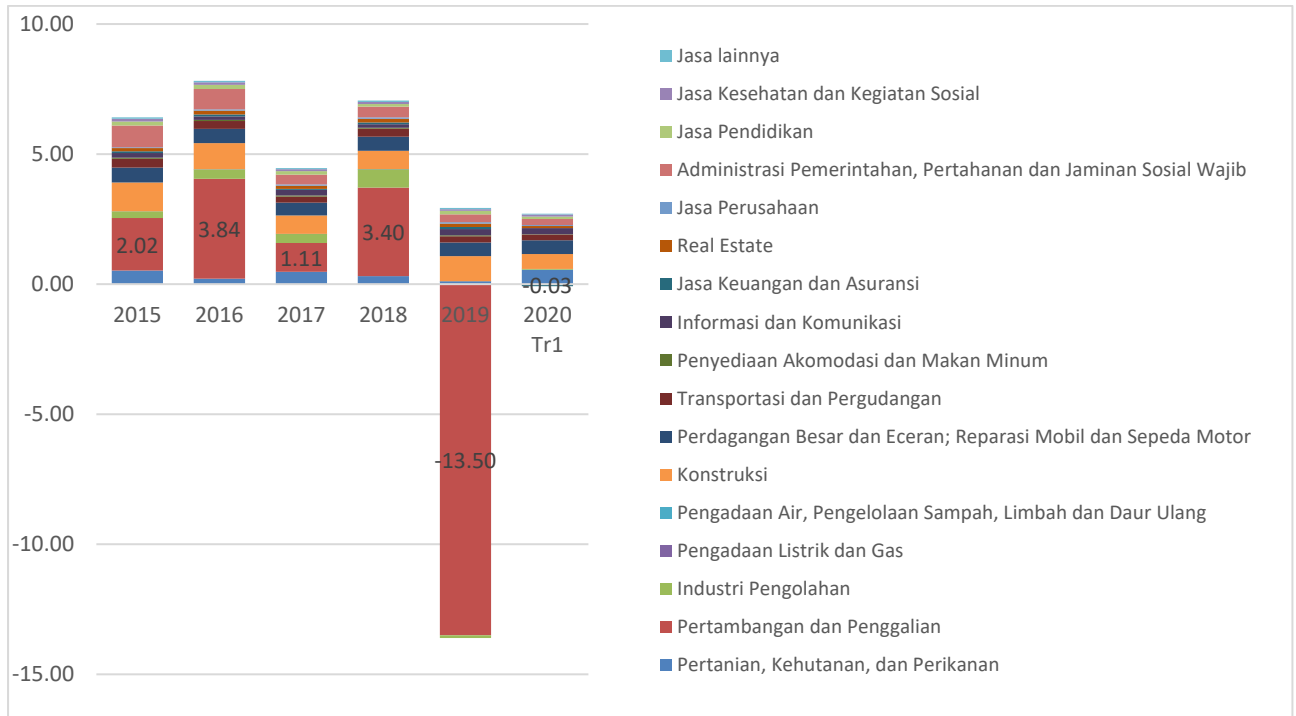
Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Papua dan Nasional Tahun 2015-2020 Tr II, (persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Gambar 2:

Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 Wilayah Papua Tahun 2015-2020 Tr I, (persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Pertumbuhan ekonomi provinsi di wilayah Papua, rata-rata tumbuh positif selama periode 2015-2019, kecuali di Provinsi Papua pada tahun 2019 berkontraksi dengan angka pertumbuhan -15,72 persen. Perkembangan ekonomi pada tahun 2020 Triwulan II seiring dengan krisis pandemi Covid 19, Provinsi Papua Barat dan Papua masih mampu tumbuh positif, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 4,52 persen, dan 0,53 persen (**Tabel 1**). Sektor-sektor yang memberikan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 Triwulan I, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, dan sektor konstruksi. Sektor lain yang memberikan andil cukup besar adalah sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor informasi dan komunikasi (**Gambar 3**).

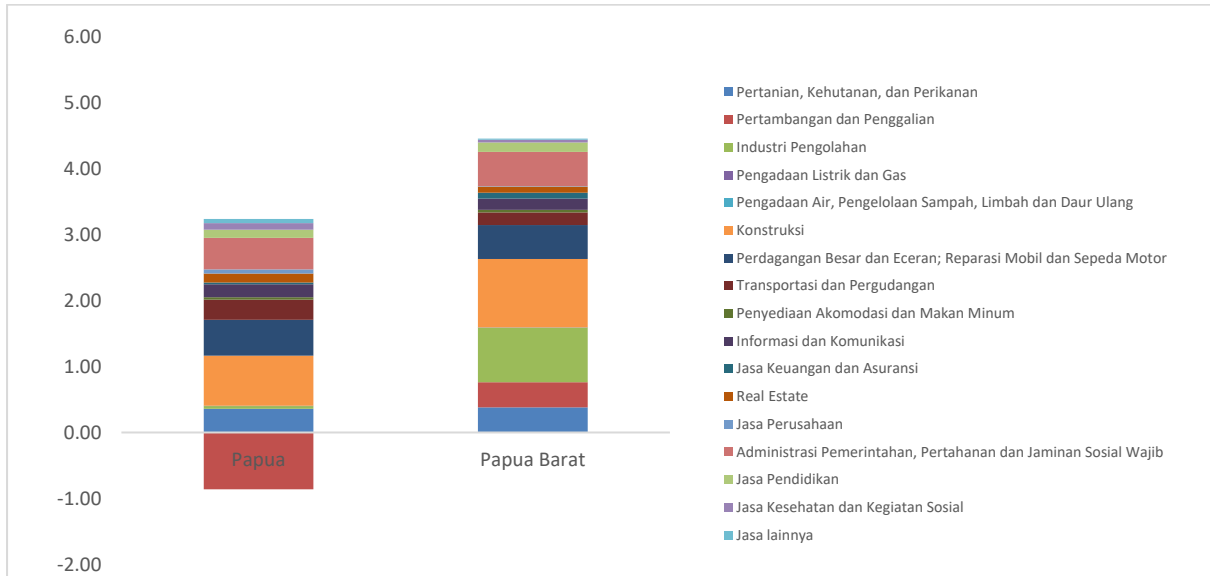
Tabel 1:

Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2010 Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2020 Triwulan II, (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_Tr II
Papua Barat	4,15	4,52	4,02	6,25	2,66	0,53
Papua	7,35	9,14	4,64	7,37	-15,72	4,52
PAPUA	6,41	7,82	4,46	7,06	-10,67	3,25

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Gambar 3:
Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua
Tahun 2015-2020, (dalam persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

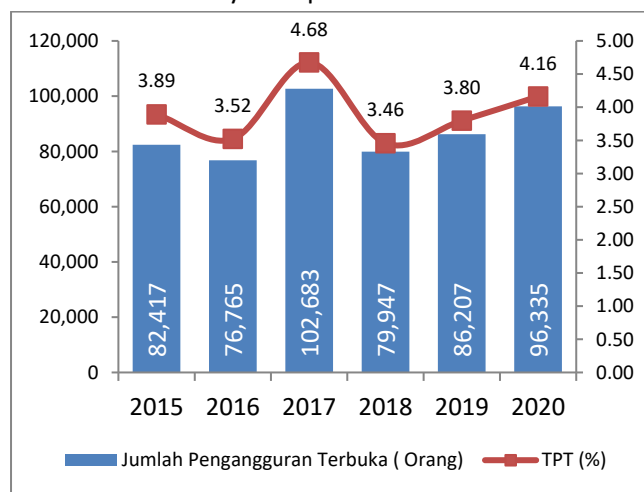
1.2. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka di wilayah Papua pada tahun 2020 sebanyak 96.335 orang atau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,16 persen, lebih rendah dibanding TPT Nasional (5,34%). Perkembangan pengangguran terbuka tersebut menunjukkan peningkatan pada periode 2016-2017, dan menunjukkan penurunan pada periode 2017-2018, dan meningkat kembali pada periode 2018-2020.

Pengangguran Terbuka antarprovinsi pada tahun 2020 di wilayah Papua, Provinsi Papua Barat menunjukkan jumlah 30.039 orang dengan TPT sebesar 6,20 persen. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Papua sebanyak 66.296 orang atau dengan TPT sebesar 3,62 persen.

Perkembangan jumlah pengangguran terbuka antarprovinsi di wilayah Papua dalam periode 2015-2020 menunjukkan penurunan jumlah pengangguran terbuka, namun berdasarkan TPT menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,59 persen untuk TPT di Provinsi Papua Barat. Sedangkan di Provinsi Papua menunjukkan penurunan TPT sebesar 0,10 persen.

Gambar 4:
Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka dan TPT di Wilayah Papua Tahun 2015-2020



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Tabel 2:

Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2020

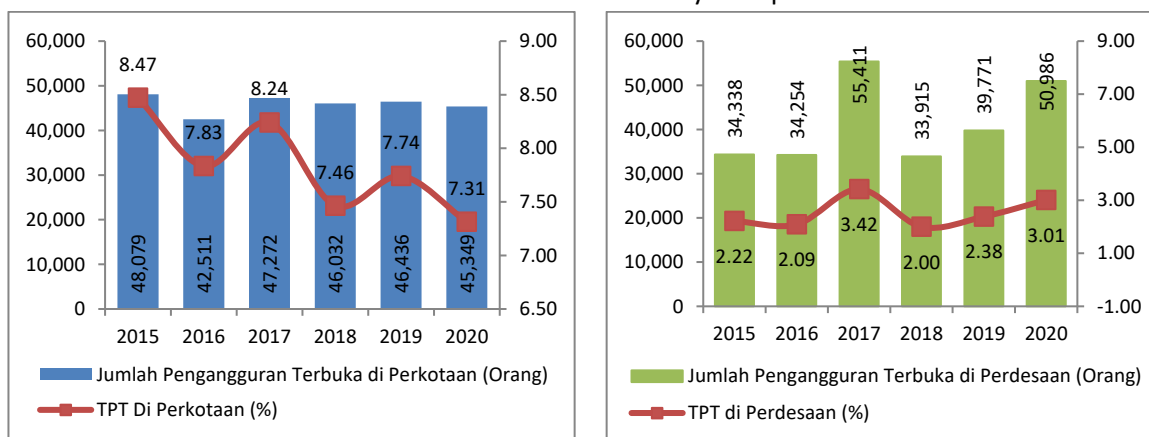
Wilayah	Tahun						Δ ('15-'20)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu orang)							
Papua Barat	18.806	25.037	33.214	26.129	24.322	30.039	11.233
Papua	63.611	51.728	69.469	53.818	61.885	66.296	2.685
PAPUA	82.417	76.765	102.683	79.947	86.207	96.335	13.918
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)							
Papua Barat	4,61	5,73	7,52	5,67	5,28	6,20	1,59
Papua	3,72	2,97	3,96	2,91	3,42	3,62	-0,10
PAPUA	3,89	3,52	4,68	3,46	3,80	4,16	0,27

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pengangguran Terbuka menurut Perdesaan-Perkotaan. Jumlah pengangguran terbuka dan TPT pada periode 2015-2020 menunjukkan dominasi di perkotaan, dengan TPT tertinggi pada tahun 2015 (8,47%) dan berkurang 1,16 persen menjadi 7,31 persen pada tahun 2020. Sementara untuk TPT di pedesaan, tertinggi sebesar 4,42 persen pada tahun 2017 dan berkurang 0,41 persen pada tahun 2020 menjadi 3,01 persen.

Gambar 5:

Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka (orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Periode 2015-2020 di Wilayah Papua



Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Selama periode 2015-2020, Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan TPT di perkotaan dan pedesaan, masing-masing sebesar 1,56 persen dan 1,54 persen. Sementara itu pada periode yang sama di Provinsi Papua menunjukkan penurunan TPT sebesar 2,02 persen di Perkotaan, dan peningkatan TPT sebesar 0,59 persen di Perdesaan.

Tabel 3:

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Antarprovinsi menurut Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Papua Tahun 2015-2020

Provinsi	TPT Perkotaan (%)							TPT Perdesaan (%)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ ('15-'20)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ ('15-'20)
Papua Barat	8,08	10,36	9,72	9,48	8,76	9,64	1,56	3,10	3,64	6,50	3,81	3,72	4,64	1,54
Papua	8,58	6,99	7,76	6,81	7,42	6,56	-2,02	2,02	1,75	2,71	1,59	2,07	2,61	0,59
PAPUA	8,47	7,83	8,24	7,46	7,74	7,31	-1,16	2,22	2,09	3,42	2,00	2,38	3,01	0,79

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan. Pengangguran terbuka di wilayah Papua pada tahun 2020 sebagian besar dikontribusi oleh kelompok pengangguran berpendidikan terakhir SMU (33,26%), tamat SMP (16,96%), dan tamat Universitas (14,61%). Persentase pengangguran terbuka berpendidikan terakhir SMU di Provinsi Papua Barat mencapai 34,85 persen, kemudian persentase tertinggi berikutnya adalah tamat SMP (16,09%) dan tamat Universitas (15,70%). Sementara itu di Provinsi Papua, persentase tertinggi adalah pengangguran terbuka berpendidikan SMU (32,53%), Tamat SMP (17,35%) dan tamat Universitas (14,61%).

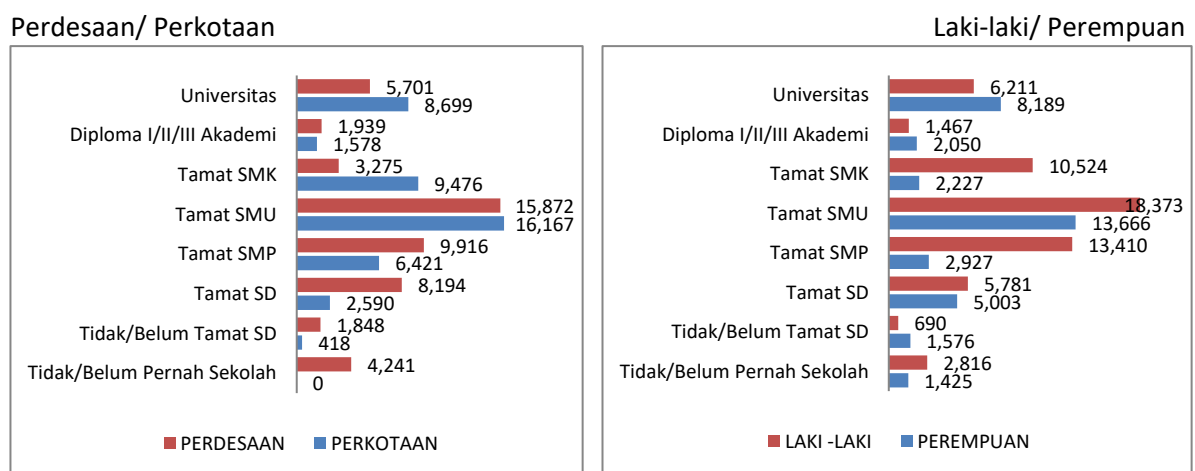
Tabel 4:
Pengangguran Terbuka menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Papua Tahun 2020

Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)	Persentase Pengangguran terbuka menurut Pendidikan							
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMU	Tamat SMK	Diploma I/II/III Akademi	Universitas
Papua Barat	30.039		1,97	11,76	16,09	34,85	14,57	5,06	15,70
Papua	66.296	6,40	2,53	10,94	17,35	32,53	12,63	3,01	14,61
PAPUA	96.335	4,40	2,35	11,19	16,96	33,26	13,24	3,65	14,95

Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Berdasarkan keberadaan pengangguran terbuka di perdesaan dan perkotaan, menunjukkan pengangguran terbuka pada kelompok berpendidikan lebih tinggi dari SMP sebagian besar berada di perkotaan, sementara untuk yang berpendidikan SMP dan pendidikan lebih rendah sebagian besar berada di perdesaan. Berdasarkan gender, pengangguran terbuka berpendidikan tertinggi (Universitas dan Diploma) sebagian besar adalah kaum perempuan, dan tingkat pendidikan lebih rendah sebagian besar dari kaum laki-laki.

Gambar 6:
Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Papua Tahun 2020



Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Perkembangan pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan di wilayah Papua pada tahun 2015 dan tahun 2020 menunjukkan penurunan persentase untuk berpendidikan tidak/belum tamat SD (-0,13%), SMA Umum (-8,27%), Diploma (-0,41%), dan Universitas (-6,01%). Sementara itu untuk persentase pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan lainnya menunjukkan peningkatan.

Tabel 5:

Perkembangan Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Papua Tahun 2015 dan Tahun 2020

Papua	Tahun	Pengangguran Terbuka (Orang)	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				Diploma I/II/III Akademi Diploma I/II/III	Universitas
					Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas			
							Umum	Kejuruan		
Jumlah (Orang)	2015	82.417	3.307	2.048	6.314	7.026	34.230	8.873	3.344	17.275
	2020	96.335	4.241	2.266	10.784	16.337	32.039	12.751	3.517	14.400
	Δ ('15-'20)	13.918	934	218	4.470	9.311	-2.191	3.878	173	-2.875
(%)	2015	100,00	4,01	2,48	7,66	8,52	41,53	10,77	4,06	20,96
	2020	100,00	4,40	2,35	11,19	16,96	33,26	13,24	3,65	14,95
	Δ ('15-'20)	0,00	0,39	-0,13	3,53	8,43	-8,27	2,47	-0,41	-6,01

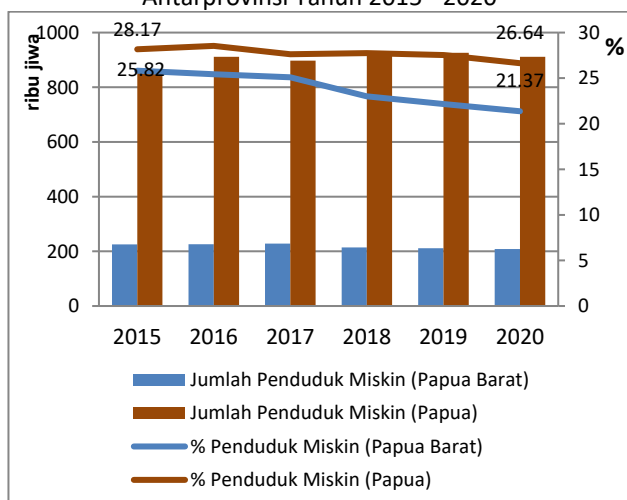
Sumber : Sakernas Februari 2015-2020, BPS

1.3. Kemiskinan

Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Indonesia semester 1 (Maret) tahun 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa (9,78%), berkurang sebanyak 2,17 juta jiwa (1,44%) jika dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa (11,22%). Pada Tahun 2020 Jumlah penduduk miskin di wilayah Papua mencapai 1,12 juta jiwa atau 4,24 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.

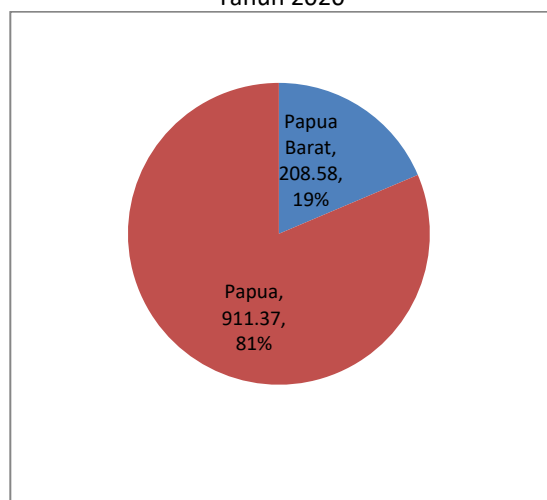
Gambar 7:

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2015 - 2020



Gambar 8:

Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi Tahun 2020



Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan penyebaran jumlah penduduk miskin tahun 2020 antarprovinsi sebagian besar berada di Provinsi Papua sebanyak 911,37 ribu jiwa atau 81 persen dari total penduduk miskin wilayah Papua. Penyebaran penduduk miskin tahun 2020 di wilayah Papua sebagian besar berada di perdesaan (93,95 persen) dengan distribusi sebesar 95,21 persen di Provinsi Papua, dan 88,45 persen di Provinsi Papua Barat. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan sebesar 52,22 ribu jiwa, dengan proporsi penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 0,45 persen. Sedangkan di Provinsi Papua Barat menunjukkan penurunan sebesar 16,78 ribu jiwa, dengan proporsi penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 2,97 persen.

Tabel 6:
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Antarprovinsi di Perdesaan dan Perkotaan pada Periode 2015-2020

Provinsi	Jumlah (ribu jiwa)			Perkotaan (%)			Perdesaan (%)		
	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)
Papua Barat	225,36	208,58	-16,78	8,58	11,55	2,97	91,42	88,45	-2,97
Papua	859,15	911,37	52,22	4,34	4,79	0,45	95,66	95,21	-0,45
PAPUA	1.084,51	1.119,95	35,44	5,22	6,05	0,83	94,78	93,95	-0,83

Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan persentase penduduk miskin antarprovinsi pada tahun 2020, Tingkat kemiskinan di provinsi Papua Barat (21,37%) dan Papua (26,64%) masih jauh berada di atas tingkat kemiskinan nasional (9,78%). Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua (26,64%) dengan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 35,5 persen, dan di perkotaan sebesar 4,47 persen. Tingkat di Provinsi Papua Barat (21,37%) dengan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 32,7 persen, dan di perkotaan sebesar 5,85 persen. Selama periode 2015-2020, penurunan tingkat kemiskinan terbesar berada di Provinsi Papua Barat sebesar 4,45 persen, sebagian besar dikontribusi penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan (5,27%).

Tabel 7:
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020

Provinsi	Perkotaan (K)			Perdesaan (D)			Jumlah (K + D)		
	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2020	Δ ('15-'20)
Papua Barat	5,86	5,85	-0,01	37,97	32,7	-5,27	25,82	21,37	-4,45
Papua	4,61	4,47	-0,14	36,66	35,5	-1,16	28,17	26,64	-1,53
INDONESIA	8,29	7,38	-0,91	14,21	12,82	-1,39	11,22	9,78	-1,44

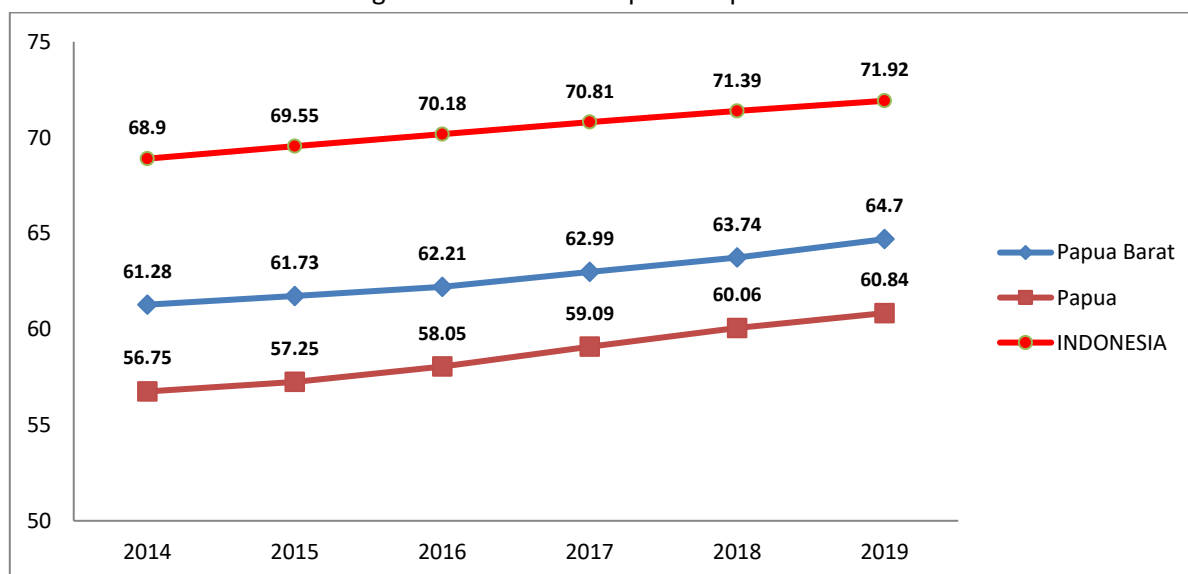
Sumber: Data Kemiskinan Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia. IPM antarprovinsi di wilayah Papua selama periode 2015 – 2019 menunjukkan peningkatan, namun masih jauh di bawah IPM Nasional tahun 2019 (71,92). Provinsi Papua Barat dengan IPM tertinggi baru mencapai 64,70 (tahun 2020) dan menduduki ranking ke-33 ditingkat nasional, sedangkan Provinsi Papua dengan IPM 60,84 menduduki ranking terendah (ke-34) dari seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 9:

Indeks Pembangunan Manusia Antarprovinsi pada Periode 2014-2019



Sumber: Publikasi BPS, 2020

Berdasarkan perkembangan IPM antara tahun 2015 dan 2019, seluruh provinsi menunjukkan peningkatan IPM, dengan peningkatan tertinggi di Provinsi Papua yang meningkat sebanyak 3,59 poin, dan di Provinsi Papua Barat meningkat sebesar 1,67 poin. Untuk menunjukkan kecepatan perkembangan IPM selama periode 2015-2019 dapat diindikasikan melalui reduksi *shortfall* pertahun (*annual reduction in shortfall*) yaitu perhitungan secara sederhana untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai IPM ideal (IPM =100). Berdasarkan Hasil perhitungan, Provinsi Papua Barat dan Papua memiliki nilai reduksi *shortfall* per tahun termasuk kategori menengah (1,5-1,7).

Tabel 8:

Perkembangan IPM, Ranking dan Reduksi *Shortfall* Antarprovinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		Δ (‘15-‘20)	Reduksi Shortfall Per tahun
	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional	IPM	Ranking Nasional		
Papua Barat	61,73	33	62,21	33	62,99	33	63,74	33	64,7	33	2,97	1,67
Papua	57,25	34	58,05	34	59,09	34	60,06	34	60,84	34	3,59	1,70
INDONESIA	69,55		70,18		70,81		71,39		71,92		2,37	1,67

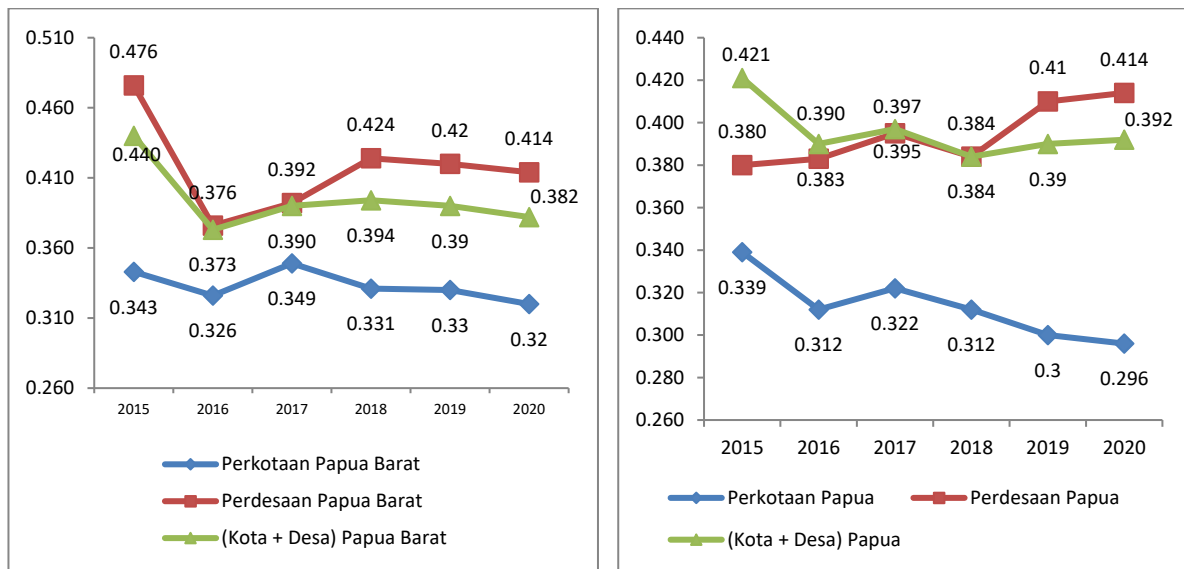
Sumber data, BPS

Keterangan: Kategori reduksi *shortfall* pertahun : (a) Sangat lambat jika : < 1,3; (b) Lambat jika : 1,3 – 1,5; (c). Menengah : 1,5 – 1,7; dan (d) Cepat jika : > 1,7.

1.5. Gini Ratio

Gini Ratio. Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana Gino Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan sebaliknya Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan Tidak Merata Sempurna.

Gambar 10:
Pekembangan Gini Ratio di Provinsi Papua Barat dan Papua pada Periode 2015-2020



Sumber: Data Gini Ratio Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan data BPS, perkembangan nilai koefisien Gini Ratio secara nasional pada periode 2015-2020 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 0,408 pada tahun 2015 berkurang sebesar 0,027 menjadi 0,381 pada tahun 2020. Nilai koefisien Gini Ratio di Provinsi Papua Barat dan Papua pada tahun 2020, masih berada di atas gini rasio nasional, dengan nilai koefisien Gini Ratio tertinggi di Provinsi Papua (0,392) dan Papua Barat (0,382), walaupun masih termasuk kategori Tingkat Ketimpangan rendah.

Tabel 9:
Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2020

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2015	2020	Δ ('15-20)	2015	2020	Δ ('15-20)	2015	2020	Δ ('15-20)
Papua Barat	0,343	0,32	-0,023	0,476	0,414	-0,062	0,440	0,382	-0,058
Papua	0,339	0,296	-0,043	0,380	0,414	0,034	0,421	0,392	-0,029
NASIONAL	0,428	0,393	-0,035	0,334	0,317	-0,017	0,408	0,381	-0,027

Sumber: Data Gini Ratio Semester 1 (maret), Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan nilai koefisien Gini Ratio di perdesaan dan perkotaan tahun 2020, ketimpangan di perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat (0,414) termasuk kategori sedang, sementara di perkotaan Provinsi Papua Barat (0,32) dan Papua (0,296) termasuk kategori rendah. Pada periode 2015-2020, di perdesaan Provinsi Papua menunjukkan peningkatan nilai koefisien Gini Ratio sebesar 0,034, sedangkan di Provinsi Papua Barat menunjukkan penurunan sebesar 0,062.



PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

- ❖ Jumlah penduduk wilayah Papua pada tahun 2019 sebanyak 4.34 juta jiwa atau 1,62 persen dari penduduk Indonesia, dengan jumlah tertinggi di provinsi Papua sebanyak 3,38 juta jiwa atau 77,88 persen dari penduduk di wilayah Papua.
- ❖ Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Papua pada tahun 2019 mencapai 10,36 jiwa/Km², dengan kepadatan di Provinsi Papua sebesar 10,59 Jiwa/Km² lebih besar dibanding kepadatan di Provinsi Papua Barat sebesar 9,63 Jiwa/Km².
- ❖ Laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2019 di wilayah Papua mencapai 2,22 persen, dengan Laju pertumbuhan di Provinsi Papua Barat (2,55%) lebih tinggi dibanding Provinsi Papua (1,88%).
- ❖ Angka beban tanggungan (dependency Ratio) di Provinsi Papua Barat dan Papua sudah memasuki masa Bonus Demografi (<50%), sebesar 47,1 persen di Papua Barat, dan 43,7 persen di Provinsi Papua.
- ❖ Angkatan kerja di wilayah Papua pada Februari 2020 sebanyak 2,31 juta orang atau meliputi 1,68 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.
- ❖ penduduk wilayah Papua pada Februari 2020, sebagian besar memiliki jenis pekerjaandi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hingga mencapai 1.3 juta orang (58,61%) dari total pekerja.
- ❖ Berdasarkan jenis status pekerjaan utama pada Februari 2020, penduduk wilayah Papua sebagian besar bekerja sebagai Pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 586,74 ribu orang (26,46%), Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar sebanyak 582,64 ribu orang (26,27%), serta Buruh/Karyawan/ Pegawai sebanyak 574,98 ribu orang (25,92%).
- ❖ Status pekerjaan utama paling dominan di Provinsi Papua adalah pekerja keluarga/tak dibayar (29,23%), dan di Provinsi Papua Barat adalah buruh/karyawan/pegawai (39,80%).

02

Perkembangan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan



2.1. Kependudukan

Kependudukan. Wilayah Papua pada tahun 2019 berpenduduk sebanyak 4.34 juta jiwa atau 1,62 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk tertinggi berada di Provinsi Papua sebanyak 3,38 juta jiwa atau 77,88 persen dari penduduk di wilayah Papua. Berdasarkan rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan menunjukkan rasio laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 10:

Luas Wilayah dan Kependudukan Antarprovinsi di Wilayah Papua pada Tahun 2019

Provinsi	Luas Wilayah Daratan		Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2019) (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
	(km ²)	%	(ribu jiwa)	%			
Papua Barat	99.671,6	23,80	959,6	22,12	111,00	2,55	9,63
Papua	319.036,1	76,20	3.379,3	77,88	110,60	1,88	10,59
PAPUA	418.707,7	100,00	4.338,9	100,00	110,80	2,22	10,36

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)

Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Papua pada tahun 2019 mencapai 10,36 jiwa/km², dengan kepadatan di Provinsi Papua sebesar 10,59 jiwa/km² lebih besar dibanding kepadatan di Provinsi Papua Barat sebesar 9,63 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2019 di wilayah Papua mencapai 2,22 persen, dengan Laju pertumbuhan di Provinsi Papua Barat (2,55%) lebih tinggi dibanding Provinsi Papua (1,88%).

Kepadatan penduduk wilayah Papua pada tahun 2015 sebesar 9,58 jiwa/km² meningkat sebesar 0,78 jiwa/km² menjadi 10,36 jiwa/km² pada tahun 2019. Pada periode 2015-2019, peningkatan kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 0,91 jiwa/km², sedangkan di Papua Barat sebesar 0,74 jiwa/km².

Tabel 11:

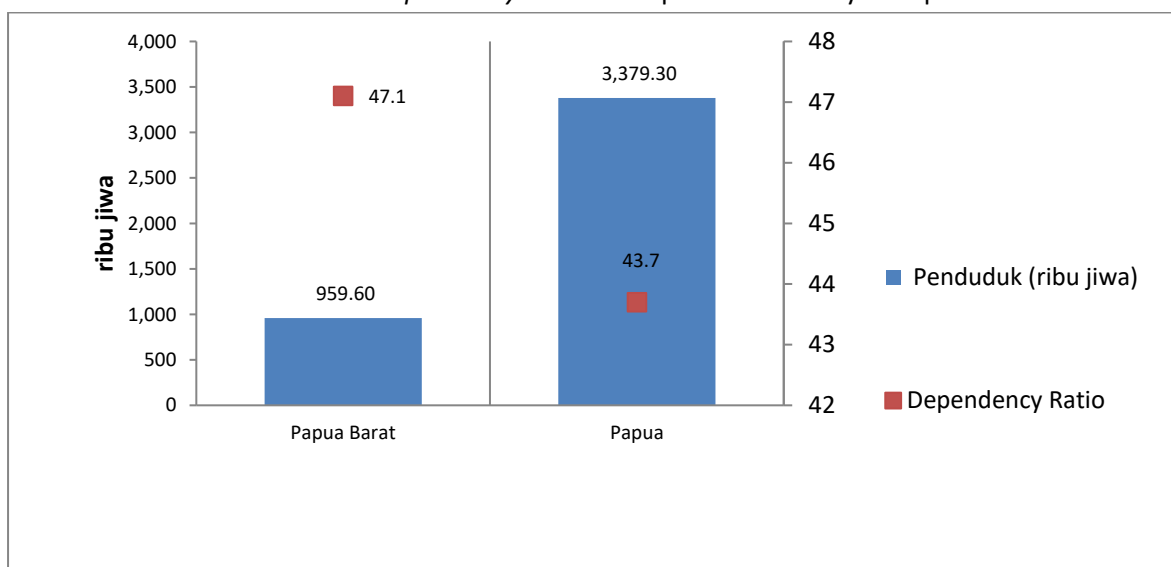
Perkembangan Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan *Dependency Ratio* Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)			Dependency Ratio		
	2015	2019	Δ ('15-'19)	2015	2019	Δ ('15-'19)	2015	2020	Δ ('10-'20)
Papua Barat	868,82	959,60	90,78	8,72	9,63	0,91	49,9	47,1	-2,8
Papua	3.143,09	3.379,30	236,21	9,85	10,59	0,74	47,5	43,7	-3,8
PAPUA	4.011,91	4.338,90	326,99	9,58	10,36	0,78			

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Gambar 11:

Jumlah Penduduk dan *Dependency Ratio* Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2019



Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) disebagian besar wilayah Papua sudah memasuki masa Bonus Demografi (<50%), dimana usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) lebih rendah dibanding penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun). Angka beban tanggungan tersebut masing-masing sebesar 47,1 persen di Papua Barat, dan 43,7 persen di Provinsi Papua.

2.2. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja. Total angkatan kerja di wilayah Papua pada Februari 2020 sebanyak 2,31 juta orang atau meliputi 1,68 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Perkembangan selama periode 2015-2020 Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan peningkatan, dengan peningkatan di Provinsi Papua sebesar 120.741 orang lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Papua barat sebesar 76.336 orang.

Tabel 12:

Perkembangan Angkatan Kerja Antarprovinsi di Wilayah Papua Periode 2015-2020

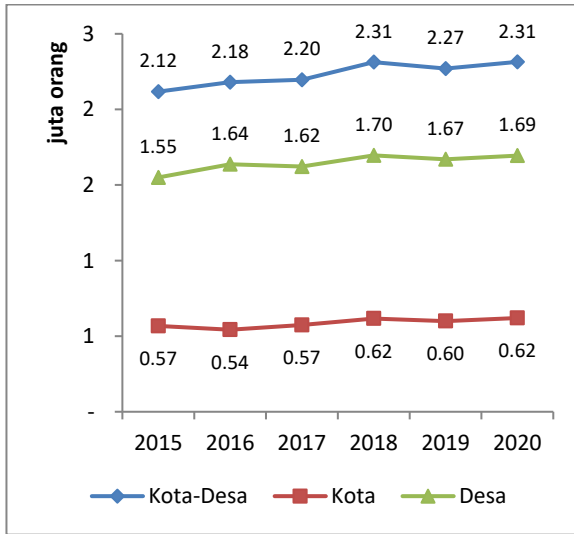
Provinsi	Angkatan Kerja						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Δ('15-'20)
Papua Barat	407.839	436.729	441.731	461.152	461.061	484.175	76.336
Papua	1.709.668	1.743.160	1.753.858	1.851.486	1.808.848	1.830.409	120.741
PAPUA	2.117.507	2.179.889	2.195.589	2.312.638	2.269.909	2.314.584	197.077

Sumber : Sakernas Februari 2015- 2020, BPS

Angkatan Kerja di Perdesaan-Perkotaan. Pada periode 2015-2020, perkembangan angkatan kerja di perdesaan dan perkotaan menunjukkan tren meningkat, dan sedikit terjadi penurunan di tahun 2019. Menurut distribusinya sebanyak 1,69 juta orang berada di perdesaan atau 73,21 persen dari total angkatan kerja. Persentase angkatan kerja di perdesaan Provinsi Papua sebesar 74,41 persen, lebih tinggi dibanding di Provinsi Papua Barat sebesar 68,68 persen.

Gambar 12:

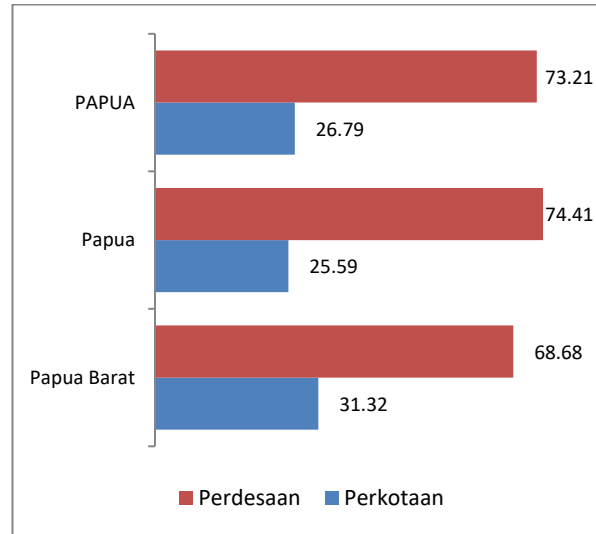
Perkembangan Angkatan Kerja di Wilayah Papua menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2015-2020



Sumber : Sakernas Februari 2015- 2020, BPS

Gambar 13:

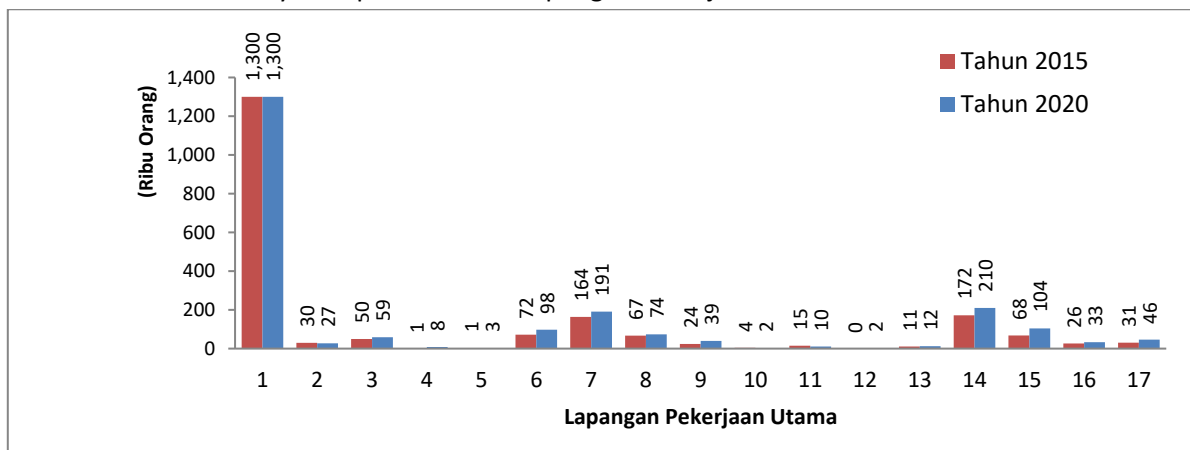
Penyebaran Angkatan Kerja Antarprovinsi menurut Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2020



Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama. Berdasarkan 17 jenis lapangan pekerjaan utama, penduduk wilayah Papua sebagian besar bergerak pada jenis pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan hingga mencapai 1.3 juta orang (58,61%) dari total pekerja. Perkembangan pekerja antara tahun 2015 dan 2020 meningkat sebesar 183.159 orang atau tumbuh sebesar 9,00 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada setiap jenis lapangan pekerjaan utama, kecuali untuk jenis pekerjaan pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi dan jasa keuangan dan asuransi (**Gambar 14**).

Gambar 14:

Penduduk Wilayah Papua menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020,BPS

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2.Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 6.Bangunan; 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Jasa Persewaan Bangunan; 13. Jasa Perusahaan; 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya.

Pada tahun 2020, penduduk wilayah Papua dengan jenis pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 1,30 juta orang, sebagian besar dilakukan di perdesaan (94,51%), dan jenis pekerjaan lainnya yang dominan dilakukan di perdesaan adalah industri pengolahan sebanyak 59.127 orang (70,47%), pertambangan dan penggalian sebanyak 27.172 orang (58,41%). Jenis pekerjaan yang dominan dilakukan di perkotaan adalah jasa persewaan bangunan (100%), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (92,45%), jasa perusahaan (84,58%), penyediaan akomodasi makanan dan minum (73,24%), dan pekerjaan jasa-jasa lainnya.

Perkembangan pekerja antara tahun 2015 dan 2020, pertumbuhan lapangan pekerjaan paling dominan adalah pengadaan listrik dan gas (1.279,44%), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (122,92%). Sementara itu lapangan pekerjaan yang mengalami pertumbuhan negatif adalah informasi dan telekomunikasi (-61,65%), jasa keuangan dan asuransi (-29,21%), dan pertambangan dan penggalian (-9,14%). Lihat **Tabel 13**.

Tabel 13:

Penduduk Wilayah Papua menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Perdesaan- Perkotaan Tahun 2015 dan 2020

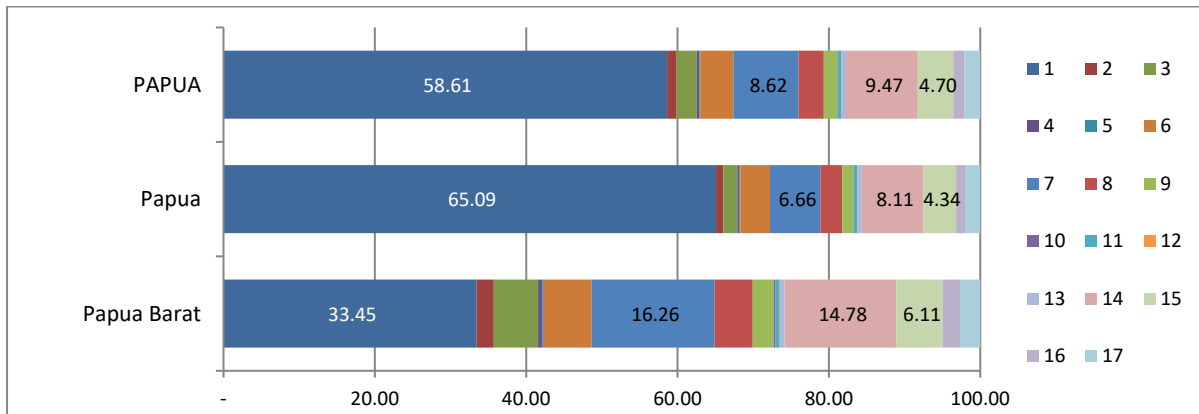
Lapangan Pekerjaan Utama	2015				2020				Δ ('15-'20) (orang)	Tumbuh ('15-'20) (%)
	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)		
	Jumlah (orang)	%			Jumlah (orang)	%				
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.300.141	63,89	7,36	92,64	1.300.194	58,61	5,49	94,51	53	0,00
2. Pertambangan dan Penggalian	29.906	1,47	74,31	25,69	27.172	1,22	41,59	58,41	-2.734	-9,14
3. Industri Pengolahan	49.874	2,45	40,22	59,78	59.127	2,67	29,53	70,47	9.253	18,55
4. Pengadaan Listrik dan Gas	574	0,03	-	100,00	7.918	0,36	72,56	27,44	7.344	1.279,44
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.248	0,06	-	100,00	2.782	0,13	92,45	7,55	1.534	122,92
6. Bangunan	72.200	3,55	52,66	47,34	97.511	4,40	53,26	46,74	25.311	35,06
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	163.983	8,06	52,32	47,68	191.309	8,62	59,28	40,72	27.326	16,66
8. Transportasi dan Pergudangan	66.784	3,28	59,91	40,09	73.765	3,33	63,66	36,34	6.981	10,45
9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	24.085	1,18	86,74	13,26	39.438	1,78	73,24	26,76	15.353	63,75
10. Informasi dan Komunikasi	4.063	0,20	79,03	20,97	1.558	0,07	63,74	36,26	-2.505	-61,65
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	14.703	0,72	79,56	20,44	10.408	0,47	72,93	27,07	-4.295	-29,21
12. Jasa Persewaan Bangunan		-			1.532	0,07	100,00	-	1.532	
13. Jasa Perusahaan	10.946	0,54	74,84	25,16	12.117	0,55	84,58	15,42	1.171	10,70
14. Adm.Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	171.833	8,44	59,84	40,16	210.147	9,47	48,99	51,01	38.314	22,30
15. Jasa Pendidikan	67.566	3,32	53,18	46,82	104.266	4,70	50,49	49,51	36.700	54,32
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26.284	1,29	48,59	51,41	32.889	1,48	62,60	37,40	6.605	25,13
17. Jasa Lainnya	30.900	1,52	71,46	28,54	46.116	2,08	61,91	38,09	15.216	49,24
TOTAL	2.035.090	100,0	25,52	74,48	2.218.249	100,0	25,91	74,09	183.159	9,00

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Lapangan pekerjaan utama paling dominan di Provinsi Papua adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (65,09%), dan pekerjaan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar (8,11%), dan perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (6,66%). Sementara itu, lapangan pekerjaan utama paling dominan di Provinsi Papua Barat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (58,61%), dan pekerjaan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar (9,47%), dan perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (8,62%).

Gambar 15:

Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Papua Tahun 2020



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

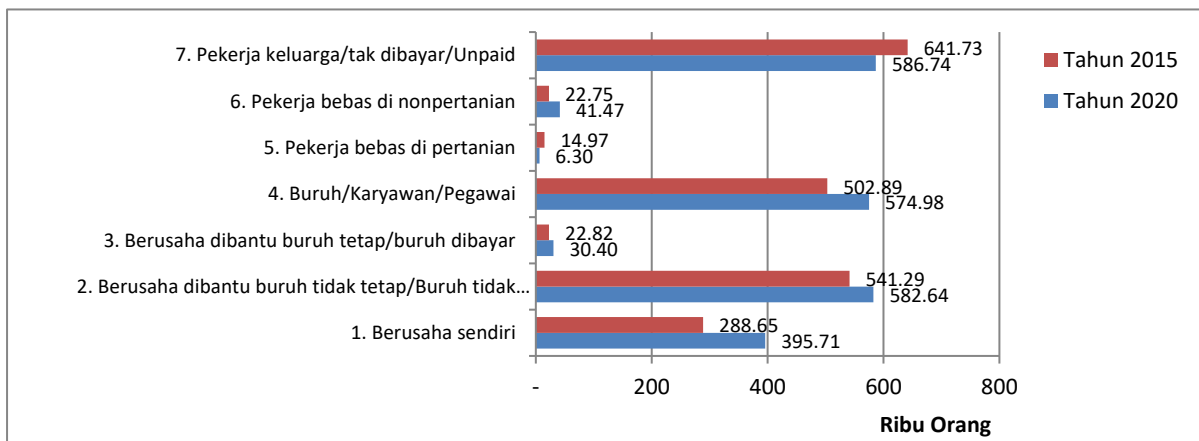
Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; 6. Bangunan; 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Jasa Persewaan Bangunan; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya.

Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama. Berdasarkan 7 jenis status pekerjaan utama pada tahun 2020, penduduk wilayah Papua sebagian besar bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 586,74 ribu orang (26,46%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 582,64 ribu orang (26,27%), serta buruh/karyawan/pegawai sebanyak 574,98 ribu orang (25,92%). Perkembangan status pekerja utama antara tahun 2015 dan 2020 meningkat sebesar 183.159 orang atau tumbuh sebesar 9,00 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada sebagian besar jenis status pekerjaan utama, kecuali pekerja bebas pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -57,93 persen dan -8,57 persen (**Gambar 16**).

Gambar 16:

Penduduk Wilayah Papua menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015 dan 2020



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Pada tahun 2020, sebagian besar status pekerjaan utama dilakukan di perdesaan, kecuali untuk status pekerjaan dominan di perkotaan adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (62,58%), dan buruh/karyawan/pegawai sebanyak (55,30%). Status pekerjaan utama yang sebagian besar dilakukan

di perdesaan, persentase tertinggi adalah pekerja keluarga/tak dibayar (93,51%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (91,12%), dan pekerja bebas di pertanian (89,61%).

Berdasarkan pertumbuhan status pekerjaan pada periode 2015-2020, tertinggi adalah Pekerja bebas di non-pertanian yang tumbuh sebesar 82,31 persen, Berusaha sendiri sebesar 37,09 persen, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebesar 33,25 persen.

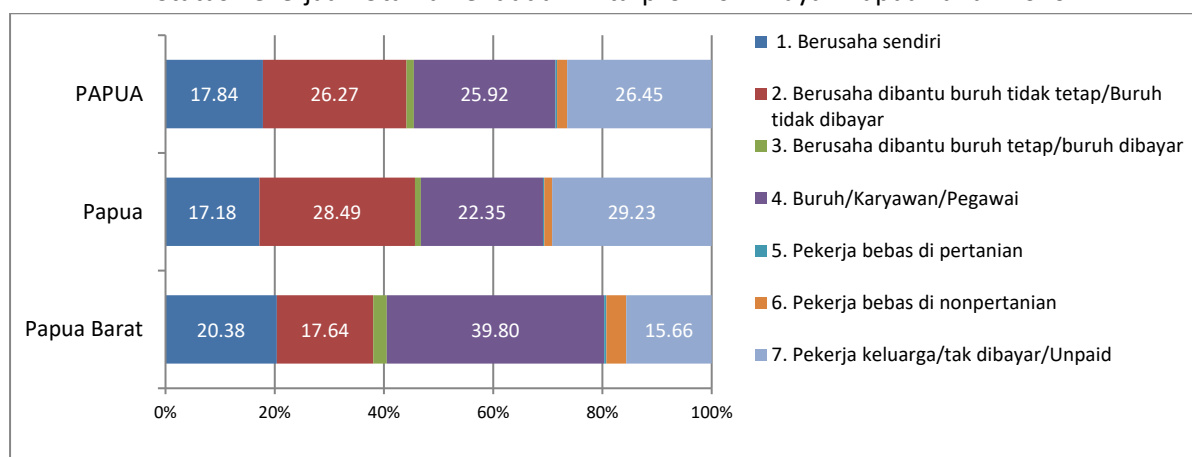
Tabel 14:
Penduduk Wilayah Papua menurut Status Pekerjaan Utama dan Perdesaan-Perkotaan Tahun 2015 dan 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	2015				2020				Δ ('15-'20) (orang)	Tumbuh ('15-'20) (%)
	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)	Pekerja		Kota (%)	Desa (%)		
	Jumlah (orang)	%			Jumlah (orang)	%				
1. Berusaha sendiri	288.645	14,18	41,30	58,70	395.712	17,84	33,08	66,92	107.067	37,09
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	541.293	26,60	8,87	91,13	582.643	26,27	8,88	91,12	41.350	7,64
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	22.818	1,12	59,05	40,95	30.404	1,37	62,58	37,42	7.586	33,25
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	502.893	24,71	57,29	42,71	574.978	25,92	55,30	44,70	72.085	14,33
5. Pekerja bebas di pertanian	14.967	0,74	13,69	86,31	6.296	0,28	10,39	89,61	-8.671	-57,93
6. Pekerja bebas di nonpertanian	22.748	1,12	17,44	82,56	41.472	1,87	39,57	60,43	18.724	82,31
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	641.726	31,53	6,95	93,05	586.744	26,45	6,49	93,51	-54.982	-8,57
PAPUA	2.035.090	100,0	25,52	74,48	2.218.249	100,0	25,91	74,09	183.159	9,00

Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS

Status pekerjaan utama paling dominan di Provinsi Papua adalah pekerja keluarga/tak dibayar (29,23%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (28,49%), dan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai (22,35%). Sementara itu status pekerjaan utama di Provinsi Papua Barat paling dominan adalah buruh/karyawan/pegawai (39,80%), berusaha sendiri (20,38%), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (17,64%).

Gambar 17:
Status Pekerjaan Utama Penduduk Antarprovinsi Wilayah Papua Tahun 2020



Sumber: Sakernas Februari 2015-2020, BPS



PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Pendidikan

- ❖ Rata-rata Lama sekolah (RLS) di Provinsi Papua Barat sebesar 7,44 tahun lebih tinggi dari Provinsi Papua sebesar 6,58 tahun, dan masih berada di bawah RLS Nasional (8,34 tahun).
- ❖ Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua Barat sebesar 12,72 tahun, lebih tinggi dibanding Provinsi Papua (11,05 tahun), dan masih berada di bawah HLS Nasional (12,95 tahun).
- ❖ Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Papua Barat dan Papua tahun 2019 untuk kelompok usia anak 07-12 tahun dan APS kelompok usia 13-15 tahun masih berada di bawah APS Nasional. Untuk APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun Provinsi Papua Barat sudah berada di atas APS nasional, sedangkan di Provinsi Papua masih berada di bawah APS nasional .
- ❖ Rasio murid per rombongan belajar sekolah tahun 2019, di Provinsi Papua menunjukkan angka lebih tinggi dibanding Provinsi Papua Barat, namun masih memenuhi persyaratan rasio yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- ❖ Kondisi bangunan sekolah di wilayah Papua memiliki bangunan rusak (rusak ringan dan berat) hingga melebihi angka di atas 50 persen. Kondisi bangunan rusak berat tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat untuk jenjang SD sebesar 10,85 persen, dan 10,82 persen di Provinsi Papua.
- ❖ Pengguna computer oleh siswa di perkotaan Provinsi Papua telah mencapai 21,74 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Papua Barat (17,06%), sedangkan di perdesaan Provinsi Papua menunjukkan persentase terendah (3,29%), sedangkan di Provinsi Papua Barat (11,91%). Namun
- ❖ Untuk penggunaan internet, persentase tertinggi terdapat di perkotaan Provinsi Papua Barat (55,76%), sementara di Provinsi Papua sebesar 53,11 persen. Untuk perdesaan di Provinsi Papua Barat telah mencapai 31,76 persen, sedangkan di Provinsi Papua baru mencapai 8,35 persen.

Kesehatan

- ❖ Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2019 antarprovinsi di wilayah Papua masih berada di bawah UHH nasional, dengan UHH terendah di Provinsi Papua sebesar 65,65 tahun, dan di Provinsi Papua Barat sebesar 65,90 tahun.
- ❖ Berdasarkan Data Riskesdas 2018, prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Balita usia 0-59 bulan tertinggi di Papua Barat sebesar 19,2 persen dan di Provinsi Papua sebesar 16,5 persen, sedangkan untuk Balita sangat pendek dan pendek (stunting) di Provinsi Papua sebesar 33,1 persen dan di Provinsi Papua Barat sebesar 27,8 persen.
- ❖ Jumlah kasus tuberculosis yang dilaporkan tahun 2019, tertinggi di Provinsi Papua (11.448 kasus) atau 81,87 persen dari total kasus di wilayah papua, dengan peningkatan jumlah kasus tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebanyak 5.560 kasus, dan Papua Barat 1.994 kasus.
- ❖ Jumlah kasus baru HIV kumulatif yang dilaporkan pada periode 2015-2019 antarprovinsi di wilayah Papua mencapai 21.735 kasus, dan untuk jumlah kasus AIDS kumulatif sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 25.339 kasus.
- ❖ Persentase puskesmas memiliki rawat inap di Provinsi Papua sebanyak 72,62 persen (305 puskesmas), dan Papua Barat sebanyak 72,33 persen (115 puskesmas), sedangkan untuk Puskesmas terakreditasi di Provinsi Papua sebanyak 120 puskesmas (28,57 persen), sedangkan di Provinsi Papua Barat sebanyak 72 puskesmas (45,28 persen).
- ❖ Persentase puskesmas kekurangan dokter tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat (63,27%), sementara di Provinsi Papua (58,22%). Puskesmas kekurangan dokter gigi, di Provinsi Papua Barat sebanyak 89,8 persen, dan Provinsi papua sebanyak 87,99 persen.

03 Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat



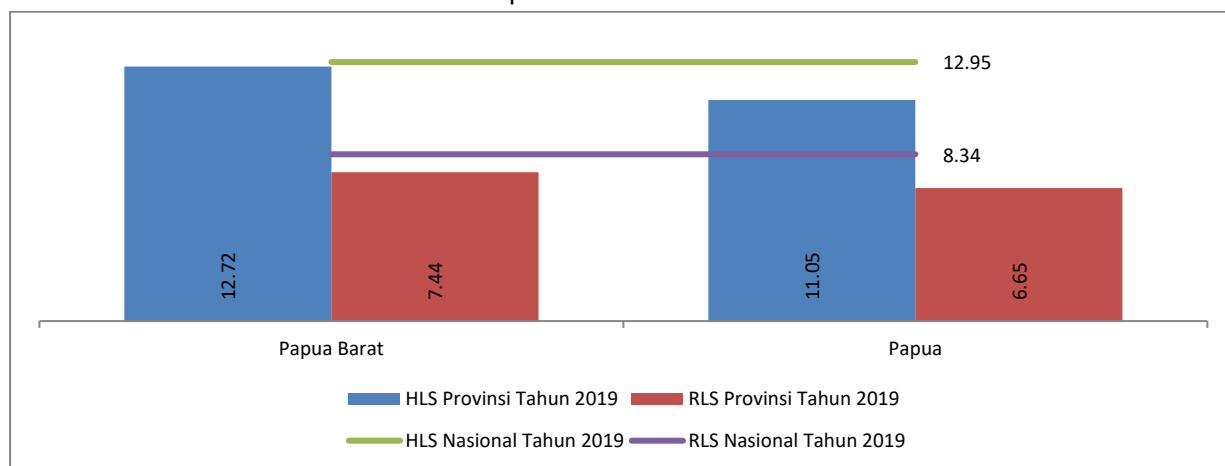
3.1. Pendidikan

3.1.1. Kondisi pendidikan Masyarakat.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) antarprovinsi di wilayah Papua tahun 2019, RLS Provinsi Papua Barat sebesar 7,44 tahun lebih tinggi dari Provinsi Papua sebesar 6,58 tahun, namun masih berada di bawah RLS nasional (8,34 tahun). Sementara itu, berdasarkan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menunjukkan peluang lamanya bersekolah bagi anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal, HLS di Provinsi Papua Barat sebesar 12,72 tahun, lebih tinggi dibanding Provinsi Papua (11,05 tahun), namun masih berada di bawah HLS nasional (12,95 tahun).

Gambar 18 :

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Papua pada Tahun 2019



Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Perkembangan HLS antarprovinsi di wilayah Papua, seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada periode 2015-2019 adalah di Provinsi Papua sebesar 1,10 tahun, sementara di Provinsi Papua Barat sebesar 0,66 tahun. Perkembangan RLS selama periode 2015-2019, Peningkatan di Provinsi Papua sebesar 0,66 tahun dan di Provinsi Papua Barat 0,43 tahun.

Tabel 15:

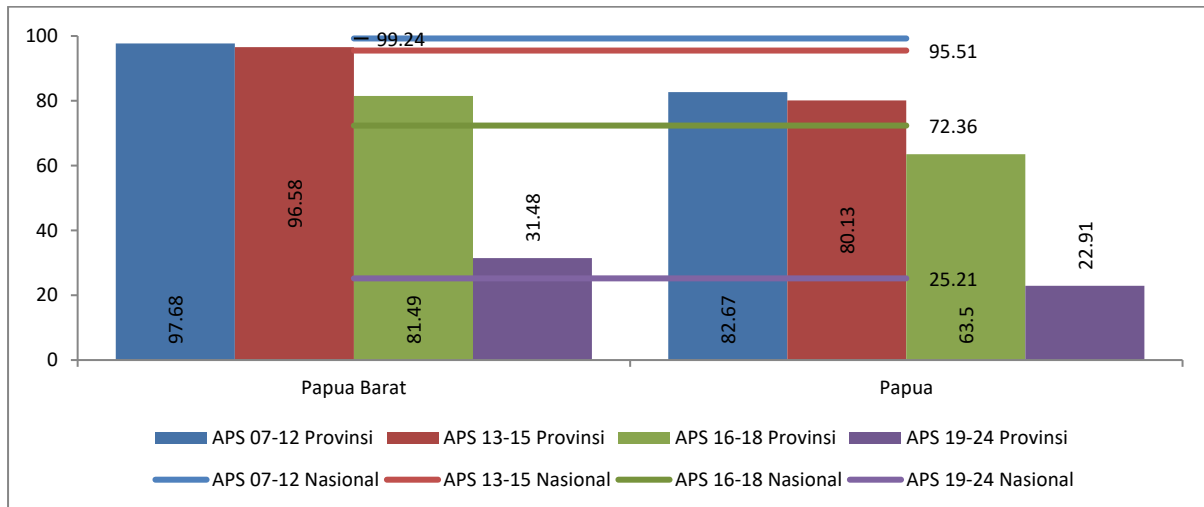
Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 - 2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019		Δ 2015-2019	
	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS	HLS	RLS
Papua Barat	12,06	7,01	12,26	7,06	12,47	7,15	12,53	7,27	12,72	7,44	0,66	0,43
Papua	9,95	5,99	10,23	6,15	10,54	6,27	10,83	6,52	11,05	6,65	1,10	0,66
INDONESIA	12,55	7,84	12,72	7,95	12,85	8,10	12,91	8,17	12,95	8,34	0,40	0,50

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Gambar 19:

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Papua pada Tahun 2019



Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) wilayah Papua tahun 2019 untuk kelompok usia anak 07-12 tahun, Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada di bawah rata-rata nasional (99,24%), dengan APS tertinggi di Provinsi Papua Barat sebesar 97,68 persen, dan Papua 82,67 persen. Untuk APS kelompok usia 13-15 tahun, Provinsi Papua Barat (96,58%) sudah berada di atas APS nasional (95,51%), dan APS Provinsi Papua (80,13%) masih berada di bawah APS nasional. Untuk APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun Provinsi Papua Barat sudah berada di atas APS nasional, dengan rincian APS kelompok usia 16-18 tahun sebesar 81,49 persen, dan untuk APS kelompok usia 19-24 tahun sebesar 96,58 persen. Sementara untuk APS 16-18 tahun dan 19-24 tahun, di Provinsi Papua masih berada di bawah APS nasional.

Tabel 16:

Perkembangan Angka Partisipasi sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019

Provinsi	APS (07-12)			APS (13-15)			APS (16-18)			APS (19-24)		
	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ	2015	2019	Δ
Papua Barat	96,74	97,68	0,94	96,58	96,58	0	79,99	81,49	1,5	29,96	31,48	1,52
Papua	81,04	82,67	1,63	78,14	80,13	1,99	61,96	63,5	1,54	22,55	22,91	0,36
Indonesia	99,09	99,24	0,15	94,72	95,51	0,79	70,61	72,36	1,75	22,95	25,21	2,26

Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2019.

Berdasarkan perkembangan APS menurut kelompok usia selama periode 2015-2019, seluruh provinsi menunjukkan peningkatan APS pada setiap kelompok usia, dengan peningkatan APS pada sebagian besar kelompok usia di Provinsi Papua menunjukkan persentase lebih tinggi dibanding Provinsi Papua Barat, kecuali untuk peningkatan kelompok APS 19-24 tahun di Provinsi Papua Barat sebesar 1,52 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Papua (0,36%).

3.1.2. Pelayanan Pendidikan

Kondisi dan Kecukupan Ruang Kelas. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SM, SMK, menyebutkan bahwa pada jenjang SD satu rombongan layaknya mencakup 20-28 peserta didik (murid), jenjang SMP mencakup

20-32 murid, jenjang SMA mencakup 20-36 murid, dan SMK mencakup 15-36 murid. Berdasarkan batasan tersebut, secara rata-rata rasio murid per rombongan belajar sekolah antarprovinsi di wilayah Papua, rasio di Provinsi Papua menunjukkan angka lebih tinggi dibanding Provinsi Papua Barat, namun telah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam peraturan tersebut.

Tabel 17:

Gambaran Rasio Murid-Guru, Murid-Rombel, Rombel-Kelas menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019 di Wilayah Papua

Provinsi	SD			SMP			SMA			SMK		
	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Rombel	Rasio Rombel-Kelas
Papua Barat	17	19	1,1	12	25	1	12	25	1,02	11	22	1,08
Papua	24	25	1,08	15	28	0,99	14	28	1,04	11	23	1,02
NASIONAL	16	22	1,06	15	28	0,98	15	29	1,01	16	27	1,11
KETENTUAN*	20	20-28	1	20	20-32	1	20	20-36	1	15	15-36	1

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan rasio rombel per kelas, idealnya menunjukkan jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal ini menandakan tidak ada ruang kelas yang digunakan sebagai sarana belajar untuk dua atau lebih rombel yang berbeda. Kondisi tersebut hanya dipenuhi untuk jenjang sekolah SMP di Provinsi Papua Barat (rasio = 1), dan Provinsi Papua (rasio = 0,99). Sementara itu, untuk jenjang Pendidikan lainnya di kedua provinsi masih berada di atas ketentuan (> 1).

Penyediaan sarana dan prasarana sekolah harus sesuai dengan standar mutu pendidikan yang telah ditentukan, sehingga akan mendukung proses pembelajaran yang lebih kondusif. Namun demikian, ruang kelas yang ada masih didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat/total (**Tabel 18**).

Tabel 18:

Kondisi Bangunan Sekolah menurut Jenjang Pendidikan TA. 2018/2019 di Wilayah Papua

Provinsi	SD			SMP			SMA			SMK		
	Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak	
		Ringan/Sedang	Berat/Total		Ringan/Sedang	Berat/Total		Ringan/Sedang	Berat/Total		Ringan/Sedang	Berat/Total
Papua Barat	22,77	66,38	10,85	27,12	66,65	6,23	31,04	64,87	4,09	45,09	51,4	3,51
Papua	22,75	66,44	10,82	22,46	70,27	7,27	25,49	71,02	3,49	43,64	53,85	2,52

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hampir diseluruh provinsi di wilayah Papua di setiap jenjang sekolah memiliki bangunan rusak (rusak ringan dan berat) hingga melebihi angka di atas 50 persen. Kondisi bangunan baik tertinggi antar jenjang pendidikan adalah bangunan SMK dengan persentase sebesar 45,09 persen di Provinsi Papua Barat dan 43,64 persen di Provinsi Papua. Kondisi bangunan rusak berat tertinggi sebagian besar pada jenjang SD, yakni sebanyak 10,85 persen di Provinsi Papua Barat, dan 10,82 persen di Provinsi Papua.

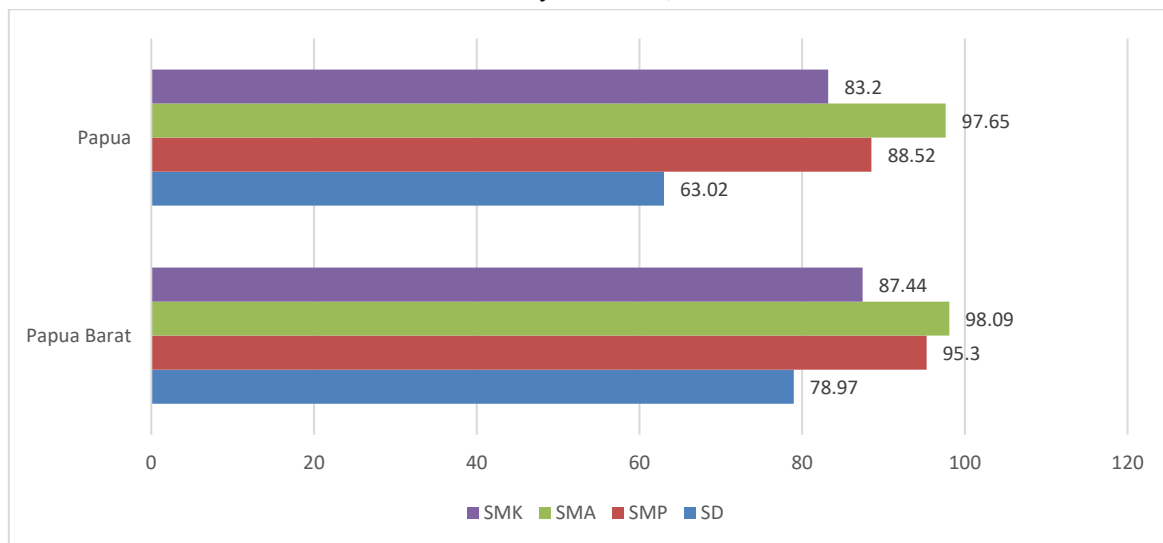
Ketersediaan dan Pendidikan Guru. Beban kerja guru dapat dilihat dengan menghitung rasio murid-guru yang menggambarkan jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen. GTK) telah memiliki acuan dalam menentukan Rasio Murid-Guru pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut rasio

pada agregat per provinsi secara umum telah dipenuhi oleh setiap jenjang pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan aspek pendidikan guru/kepala sekolah yang dianggap layak adalah minimal berpendidikan D4/S1. Untuk guru/kepala sekolah jenjang SMA di Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai di atas 90 persen, dengan persentase tertinggi di Provinsi Papua Barat (98,09%). Disamping itu jenjang SMP di Provinsi Papua Barat telah mencapai 95,330 persen, sementara di Provinsi Papua sebesar 88,52 persen. Untuk jenjang SD masih relatif rendah, terutama di Provinsi Papua baru mencapai 63,02 persen.

Gambar 20:

Persentase Guru/Kepala Sekolah Minimal Berijazah D4/S1 menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2018/2019



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Akses Teknologi Informasi Siswa. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perangkat komputer beserta internet sudah menjadi kebutuhan siswa dalam meningkatkan wawasan pengetahuan umum, serta kemudahan dalam mempelajari dan menggali pengetahuan baru disamping materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan persentase siswa umur 5-24 tahun yang menggunakan komputer dan internet selama tiga bulan terakhir di Indonesia, penggunaan oleh siswa di perkotaan dua kali lipat dibandingkan siswa di perdesaan (31,37 persen berbanding 15,43 persen). Selain itu, persentase penggunaan internet oleh siswa di perkotaan (62,51 persen) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (40,53 persen). Hal yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan antarprovinsi di wilayah Papua.

Penggunaan komputer dan internet oleh siswa umur 5-24 tahun antarprovinsi di wilayah Papua masih lebih rendah dibanding dengan persentase nasional. Penggunaan komputer di perdesaan Provinsi Papua menunjukkan persentase terendah (3,29%), sedangkan di Provinsi Papua Barat (11,91%). Namun demikian, di perkotaan Provinsi Papua penggunaan komputer oleh siswa telah mencapai 21,74 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Papua Barat (17,06%). Sementara untuk penggunaan internet, persentase tertinggi terdapat di perkotaan Provinsi Papua Barat (55,76%), sementara di Provinsi Papua sebesar 53,11 persen. Untuk perdesaan di Provinsi Papua Barat telah mencapai 31,76 persen, sedangkan di Provinsi Papua baru mencapai 8,35 persen.

Tabel 19:

Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer dan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi Tahun 2019

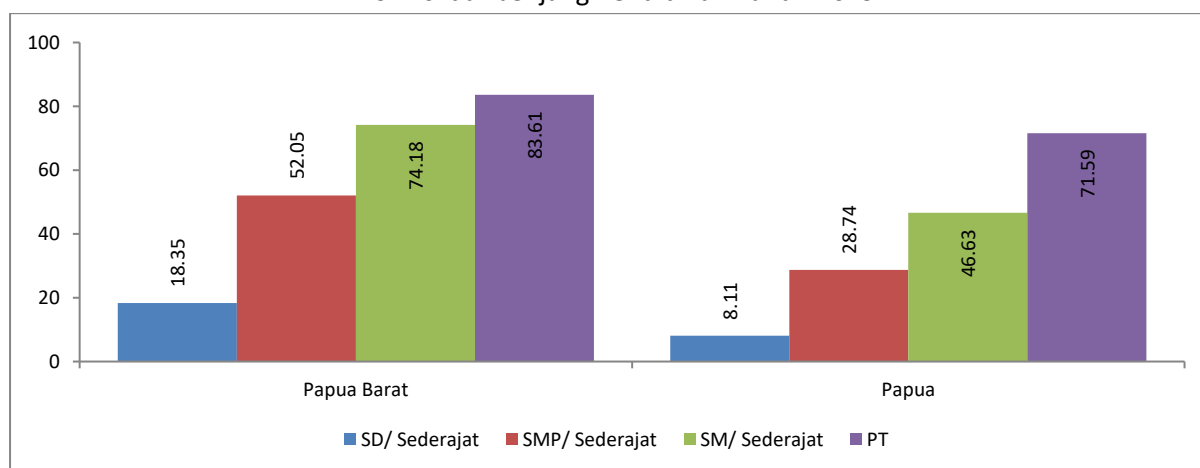
Provinsi	Menggunakan Komputer*			Menggunakan Internet*		
	K	D	K + D	K	D	K + D
Papua Barat	17,06	11,91	14,11	55,28	31,76	41,83
Papua	21,74	3,29	9,26	53,11	8,35	22,83
INDONESIA	31,37	15,43	24,52	62,51	40,53	53,06

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Sementara itu pada **Gambar 21**, penggunaan internet menurut jenjang pendidikan, Provinsi Papua Barat menunjukkan persentase lebih tinggi pada setiap jenjang pendidikan dibanding dengan Provinsi Papua. Persentase tertinggi adalah kelompok jenjang perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat (83,61%), sedangkan persentase terendah pada jenjang pendidikan SD di Provinsi Papua yang baru mencapai 8,11 persen.

Gambar 21:

Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

3.2. Kesehatan

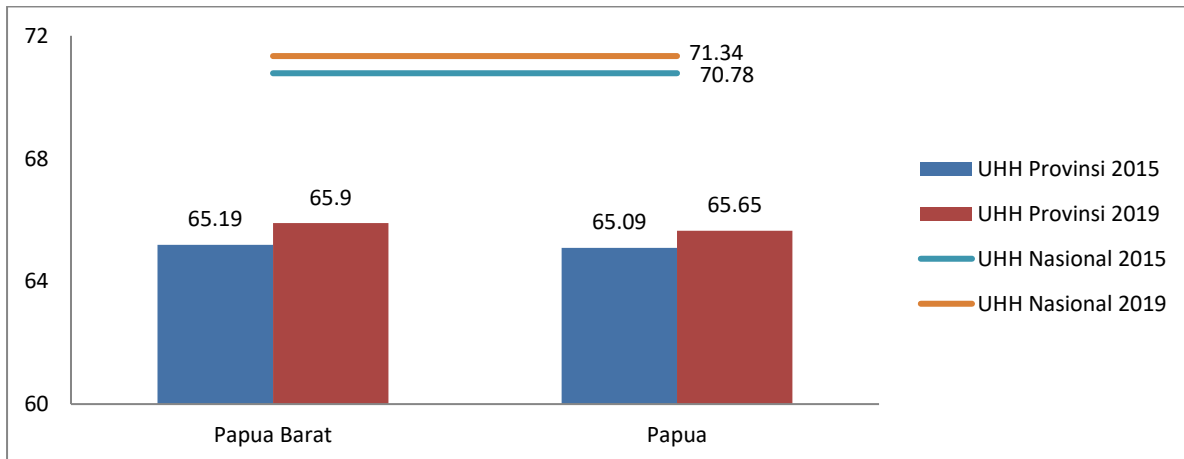
Kesehatan. Perkembangan kondisi kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Papua selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan kondisi perbaikan yang diindikasikan oleh menurunnya status gizi buruk pada balita, dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Sementara untuk prevalensi penyakit menular diindikasikan oleh jumlah kasus Tuberculosis, HIV dan Aids yang masih menunjukkan kecenderungan peningkatan sejalan dengan pelaporan kasus di daerah.

3.2.1. Umur Harapan Hidup

Berdasarkan Umur Harapan Hidup (UHH) antarprovinsi di Wilayah Papua tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional yaitu dari 70,78 tahun menjadi 71,34 tahun. UHH seluruh provinsi di wilayah Papua pada tahun 2019 masih berada di bawah Nasional, dengan UHH terendah di Provinsi Papua sebesar 65,65 tahun, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 65,90 tahun.

Gambar 22:

Umur Harapan Hidup (UHH) Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019



Sumber: Publikasi BPS (bps.go.id) 2020.

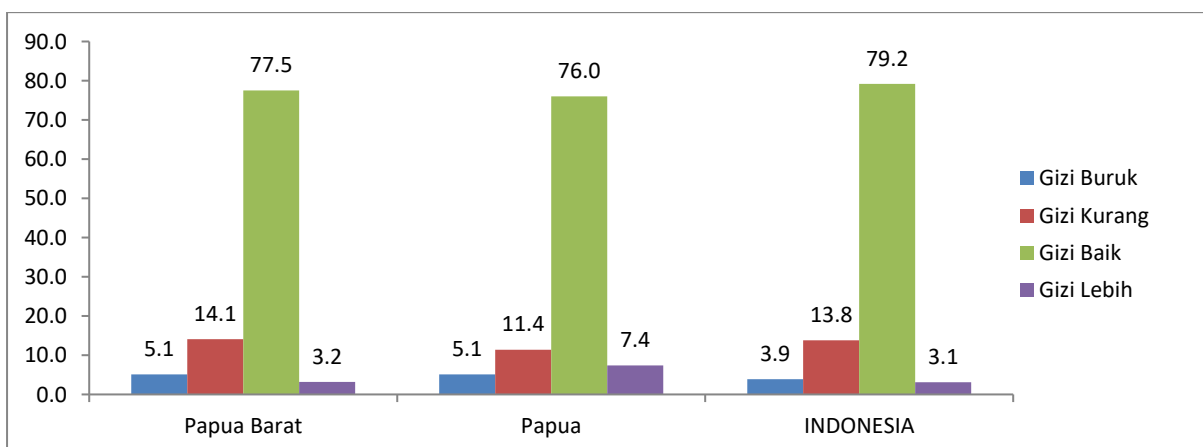
3.2.2. Status Gizi Balita

Gizi Buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (*golden period*) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

Status gizi balita dapat diukur dengan indeks berat badan per umur (BB/U), tinggi badan per umur (TB/U) dan berat badan per tinggi badan (BB/TB). Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang bayi berusia di bawah lima tahun (balita usia 0-59 bulan) di wilayah Papua, angka tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 19,2 persen yang terdiri dari 5,1 persen Gizi Buruk dan 14,1 persen gizi kurang, sedangkan di Provinsi Papua sebesar 16,5 persen yang terdiri dari 5,1 persen Gizi Buruk dan 11,4 persen gizi kurang. Berdasarkan angka status gizi buruk dan sedang tersebut, Provinsi Papua Barat menunjukkan angka lebih tinggi dibanding dengan angka nasional (17,7%).

Gambar 23:

Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (BB)/ Umur (U) di Wilayah Papua Tahun 2018



Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan status gizi balita gizi buruk dan gizi kurang pada periode 2013-2018 seluruh provinsi di wilayah Papua menunjukkan penurunan, dengan penurunan tertinggi di Provinsi Papua Barat, yaitu penurunan gizi buruk sebesar 6,8 persen dan gizi kurang 4,9 persen. Peningkatan gizi baik sebanyak 11,3 persen di Papua Barat, sedangkan di Provinsi Papua sebanyak 4,1 persen. Perkembangan gizi terjadi peningkatan di kedua provinsi dengan peningkatan tertinggi di Provinsi Papua sebesar 1,1 persen.

Tabel 20:

Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks BB/U di Wilayah Papua Tahun 2013 dan 2018

Provinsi	Gizi Buruk			Gizi Kurang			Gizi Baik			Gizi Lebih		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Papua Barat	11,9	5,1	-6,8	19,0	14,1	-4,9	66,2	77,5	11,3	2,9	3,2	0,3
Papua	9,2	5,1	-4,1	12,6	11,4	-1,2	71,9	76,0	4,1	6,3	7,4	1,1
INDONESIA	5,7	3,9	-1,8	13,9	13,8	-0,1	75,9	79,2	3,3	4,5	3,1	-1,4

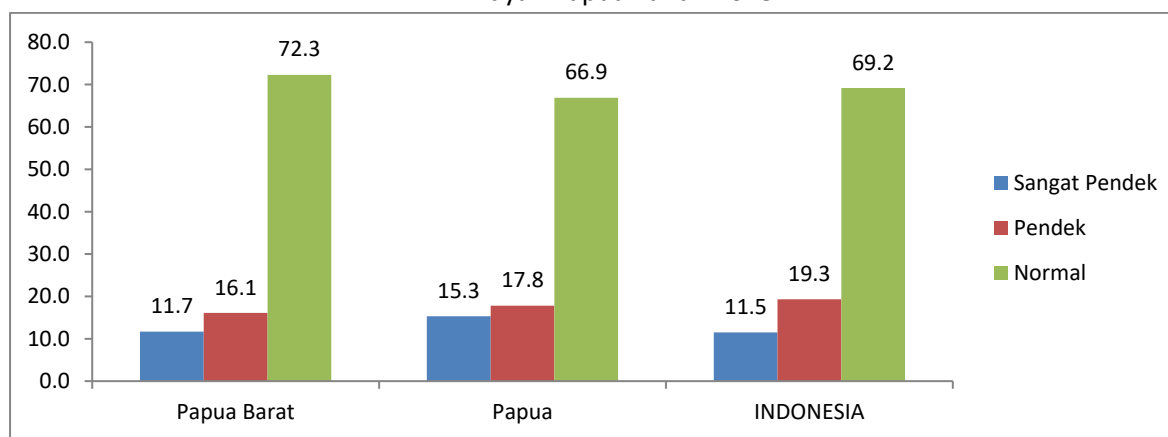
Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Status Gizi Balita dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) - Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek di wilayah Papua, angka tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 33,1 persen yang terdiri dari 15,3 persen balita sangat pendek dan 17,8 persen balita pendek. Angka Stunting di Provinsi Papua lebih tinggi dibanding dengan angka nasional (30,8%). Sementara itu, di Provinsi Papua Barat dengan prevalensi balita stunting sebesar 27,8 persen yang terdiri dari 11,7 persen balita sangat pendek dan 16,1 persen balita pendek.

Gambar 24:

Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Tinggi Badan (TB)/Umur (U) di Wilayah Papua Tahun 2018



Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan proporsi status gizi sangat pendek dan pendek antarprovinsi di wilayah Papua antara tahun 2013-2018, Provinsi Papua Barat menunjukkan penurunan untuk balita sangat pendek (10,2%) dan pendek (6,7%). Sementara itu, di Provinsi Papua menunjukkan penurunan untuk balita sangat pendek, namun untuk balita pendek menunjukkan peningkatan sebesar 2,7 persen. Pada kurun waktu antara tahun 2013-2018, peningkatan balita normal di Provinsi Papua Barat sebesar 16,9 tahun, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Papua sebesar 7 persen.

Tabel 21:

Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks BB/U di Wilayah Papua Tahun 2013 dan 2018

Provinsi	Sangat Pendek			Pendek			Normal		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Papua Barat	21,9	11,7	-10,2	22,8	16,1	-6,7	55,4	72,3	16,9
Papua	25,0	15,3	-9,7	15,1	17,8	2,7	59,9	66,9	7,0
INDONESIA	18,0	11,5	-6,5	19,2	19,3	0,1	62,8	69,2	6,4

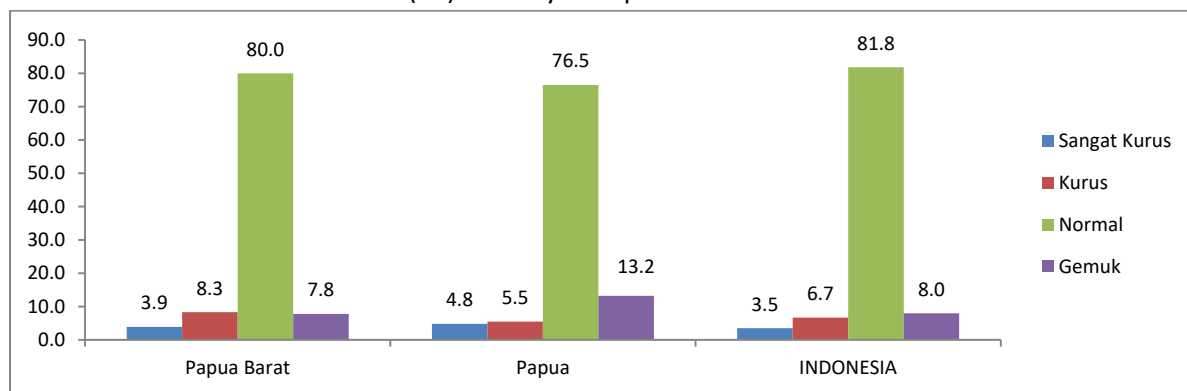
Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (BB)/Tinggi Badan (TB)

Prevalensi Gizi Balita sangat kurus dan kurus di Wilayah Papua, angka tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 12,2 persen yang terdiri dari 3,9 persen balita sangat kurus dan 8,3 persen balita kurus. Berikutnya di Provinsi Papua sebesar 10,3 persen yang terdiri dari 4,8 persen sangat kurus dan 5,5 persen kurus.

Gambar 25:

Persentase Balita Usia 0-59 Bulan menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (BB)/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Papua Tahun 2018



Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

Perkembangan proporsi status gizi balita sangat kurus dan kurus antarprovinsi di wilayah Papua antara tahun 2013-2018 seluruhnya menunjukkan penurunan, dengan penurunan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 4,5 persen yang terdiri dari penurunan balita sangat kurus sebesar 3,2 persen dan balita kurus sebesar 1,3 persen. Untuk perkembangan balita gemuk di Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan sebesar 0,3 persen, sementara di Provinsi Papua menurun sebesar 1,8 persen.

Tabel 1:

Perkembangan Persentase Balita menurut Status Gizi dengan Indeks Berat Badan (BB)/Tinggi Badan (TB) di Wilayah Papua Tahun 2013 dan 2018

Provinsi	Sangat Kurus			Kurus			Normal			Gemuk		
	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)	2013	2018	Δ ('13-'18)
Papua Barat	6,2	3,9	-2,3	9,2	8,3	-0,9	77,1	80,0	2,9	7,5	7,8	0,3
Papua	8,0	4,8	-3,2	6,8	5,5	-1,3	70,2	76,5	6,3	15,0	13,2	-1,8
INDONESIA	5,3	3,5	-1,8	6,8	6,7	-0,1	76,1	81,8	5,7	11,8	8,0	-3,8

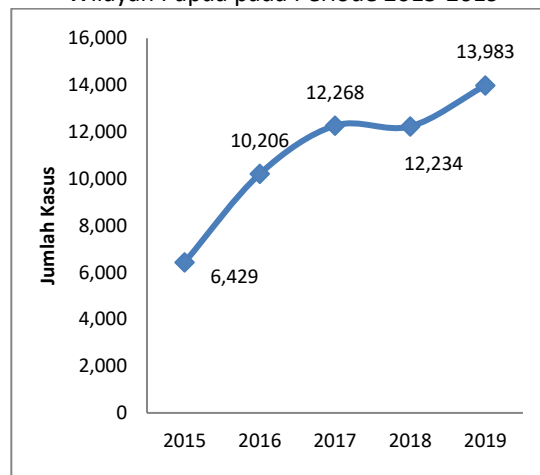
Sumber: Riskesdas 2013, 2018, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes.

3.2.3. Kasus Penyakit Menular

Tuberkulosis. Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*, dan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Jumlah kasus tuberkulosis pada tahun 2019 di wilayah Papua ditemukan sebanyak 13.983 kasus, menunjukkan peningkatan yang signifikan bila dibandingkan kasus tuberkulosis pada tahun 2015 sebesar 6.429 kasus. Peningkatannya mencapai lebih dari 100 persen, yakni sebesar 7.554 kasus.

Berdasarkan jumlah kasus tuberkulosis antarprovinsi yang dilaporkan, tertinggi terdapat di Provinsi Papua (11.448 kasus) atau 81,87 persen dari total kasus di wilayah Papua. Peningkatan jumlah kasus tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebanyak 5.560 kasus, dan Papua Barat 1.994 kasus.

Gambar 26:
Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis di Wilayah Papua pada Periode 2015-2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2019

Tabel 23:

Perkembangan Jumlah Kasus Tuberkulosis Antarprovinsi di Wilayah Papua pada Periode 2015-2019

Provinsi	Tahun					Δ '15-'19
	2015	2016	2017	2018	2019	
Papua Barat	541	1.873	2.084	1.421	2.535	1.994
Papua	5.888	8.333	10.184	10.813	11.448	5.560
PAPUA	6.429	10.206	12.268	12.234	13.983	7.554

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes.

Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate* (CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. **Tabel 24** menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2015-2019. Angka notifikasi semua kasus tuberkulosis pada tahun 2019 tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 603 kasus per 100.000 penduduk, dan di Papua Barat 264 kasus per 100.000 penduduk. Berdasarkan kecenderungan (tren) selama periode 2015-2019, setiap provinsi menunjukkan peningkatan Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis (CNR), dengan peningkatan tertinggi berada di Provinsi Papua (123 per 100.000 penduduk).

Tabel 24:

Perkembangan Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau Case Notification Rate (CNR) Antarprovinsi di Wilayah Papua pada Periode 2015-2019

Provinsi	Tahun					Δ '15-'19
	2015	2016	2017	2018	2019	
Papua Barat	235	210	228	152	264	29
Papua	216	260	312	325	339	123
PAPUA	451	470	540	477	603	152

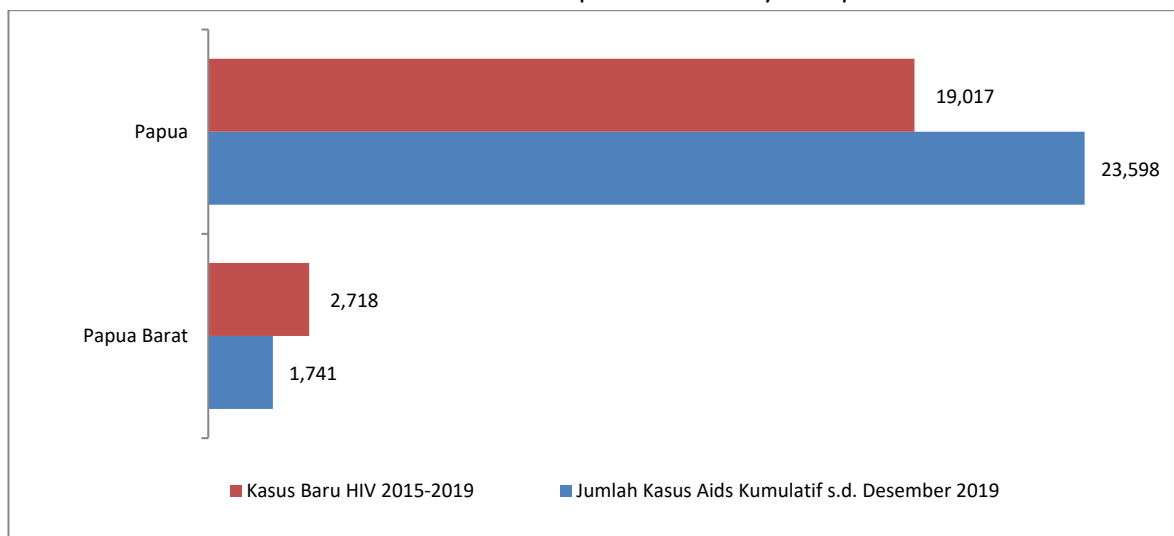
Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes.

Penyakit menular HIV/AIDS, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui layanan konseling dan tes HIV baik secara sukarela (Konseling dan Tes Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanan kesehatan dan Konseling (TIPK). Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu dapat diketahui melalui metode sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Jumlah kasus baru HIV kumulatif yang dilaporkan pada periode 2015-2019 antarprovinsi di wilayah Papua mencapai 21.735 kasus, dan untuk jumlah kasus AIDS kumulatif sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 25.339 kasus. Kasus baru HIV kumulatif tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebanyak 19.017 kasus, dan untuk kasus baru AIDS hingga Desember 2019 sebanyak 23.598 kasus.

Gambar 27:

Kasus Baru HIV dan AIDS Kumulatif Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes.

Pada periode 2015-2019, penambahan kasus baru HIV dan AIDS setiap tahun menunjukkan angka yang fluktuatif, dan cenderung menurun jika dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2015. Peningkatan kasus AIDS tertinggi terjadi di Provinsi Papua sebanyak 2.414 kasus di tahun 2015, dan tahun 2017 sebanyak 2.012 kasus. Untuk kasus HIV baru tertinggi terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2017 sebanyak 4.358 kasus, sementara di Provinsi Papua Barat pada tahun yang sama mencapai 409 kasus.

Tabel 25:

Perkembangan Kasus Baru HIV dan AIDS pada Tahun 2014 – 2018 di Wilayah Papua

Provinsi	Kasus Baru AIDS					Jumlah Kumulatif sd. Des '19	Kasus Baru HIV					Periode '15-'19
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Papua Barat	7	-	-	-	TAD	1.741	702	530	409	380	697	2.718
Papua	2.414	1.584	2.012	1.601	1.061	23.598	3.494	3.866	4.358	3.546	3.753	19.017
PAPUA	2.421	1.584	2.012	1.601	1.061	25.339	4.196	4.396	4.767	3.926	4.450	21.735

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes.

3.2.4. Pelayanan Kesehatan

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Pada periode 2015-2019 jumlah puskesmas di wilayah Papua semakin meningkat, dengan rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2019 sebesar 0,74. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan minimal 1 puskesmas secara kuantitas belum terpenuhi, terutama di Provinsi Papua Barat yang memiliki rasio sebesar 0,28, sedangkan di Provinsi Papua sudah mencapai rasio 1,93 (sudah sangat mencukupi). Namun demikian, kondisi provinsi Papua yang sangat luas perlu diperhatikan terkait aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau puskesmas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, dan kemajuan suatu daerah.

Tabel 26:

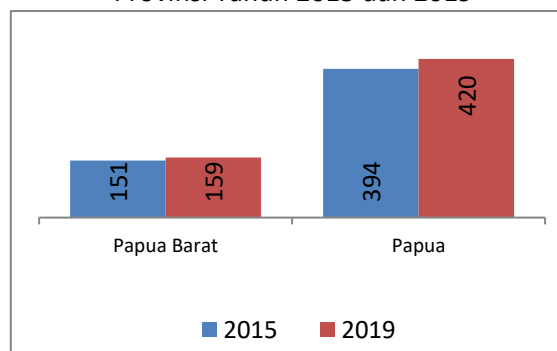
Jumlah Puskesmas dan Rasio dengan Kecamatan menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	Jml Kec.	Jumlah Puskesmas		Rasio Th. 2019
		2015	2019	
Papua Barat	560	151	159	0,28
Papua	218	394	420	1,93
PAPUA	778	545	579	0,74

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Gambar 28:

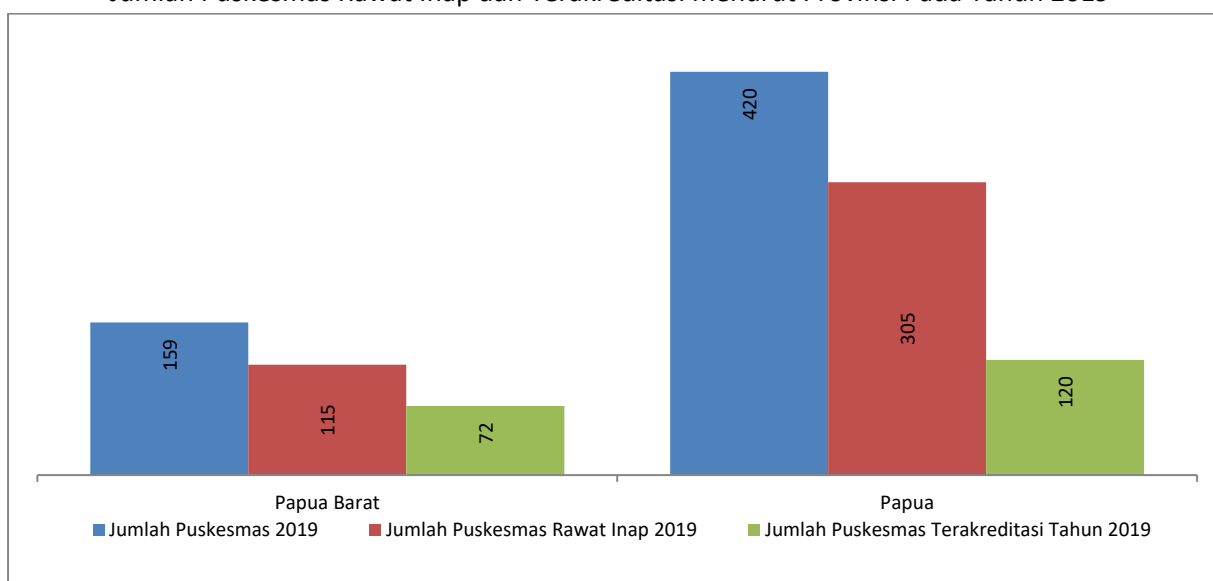
Perkembangan Jumlah Puskesmas menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Gambar 29:

Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi Pada Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Berdasarkan jumlah puskesmas terakreditasi dan ketersediaan fasilitas rawat inap, puskesmas di wilayah Papua masing-masing baru mencapai 420 puskesmas (72,54%) dan 192 (33,16%). Distribusi antarprovinsi untuk persentase puskesmas memiliki rawat inap di Provinsi Papua sebanyak 72,62 persen (305 puskesmas), dan tidak jauh berbeda dengan Provinsi Papua Barat sebanyak 72,33 persen (115 puskesmas). Sementara untuk puskesmas terakreditasi menunjukkan persentase yang masih sangat rendah, terutama di Provinsi Papua sebanyak 28,57 persen (120 puskesmas), sedangkan di Provinsi Papua Barat sebanyak 45,28 persen (72 puskesmas).

Tabel 27:

Jumlah dan Persentase Puskesmas Rawat Inap dan Terakreditasi menurut Provinsi pada Tahun 2019

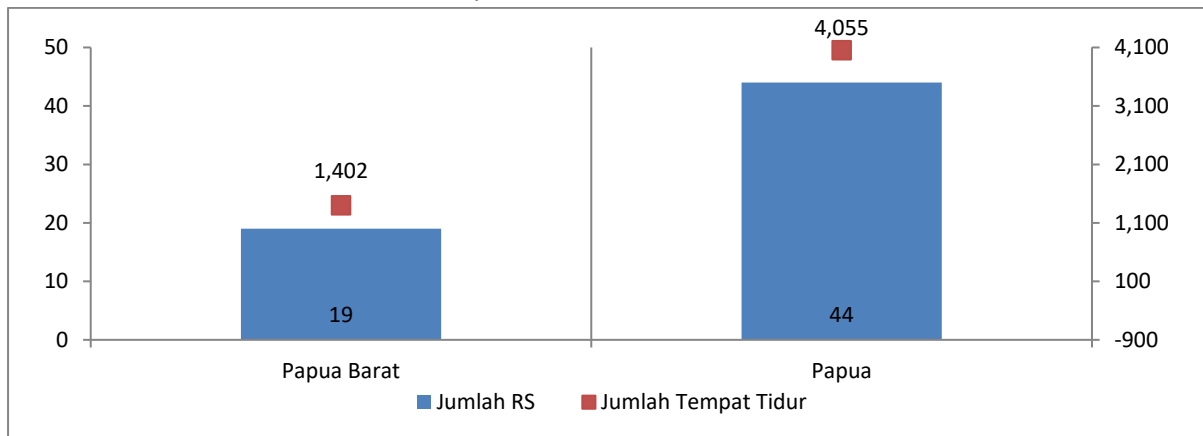
rovinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Rawat Inap		Jumlah Puskesmas Terakreditasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Papua Barat	159	115	72,33	72	45,28
Papua	420	305	72,62	120	28,57
PAPUA	579	420	72,54	192	33,16

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Rumah Sakit. Rumah Sakit di wilayah Papua pada periode 2015-2019 mengalami peningkatan jumlah rumah sakit sebanyak 7 rumah sakit, namun mengalami penurunan jumlah tempat tidur sebanyak 370 tempat tidur. Kondisi penurunan tersebut terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Distribusi rumah sakit dan tempat tidur pada tahun 2019, terbanyak terdapat di Provinsi Papua yakni sebanyak 44 rumah sakit dan 4.055 tempat tidur. Berdasarkan perkembangannya dari tahun 2015, menunjukkan peningkatan sebanyak 4 rumah sakit dan penurunan tempat tidur sebanyak 370 tempat tidur.

Gambar 30:

Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Rumah Sakit menurut Provinsi Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Berdasarkan standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Dengan demikian, kedua besar provinsi di wilayah Papua telah memenuhi standar (rasio di atas 1), walaupun secara kuantitas tempat tidur dan rasio tempat tidur menunjukkan penurunan dibanding tahun 2015. Perkembangan rasio tidur untuk 1.000 penduduk selama periode 2015-2019, di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan rasio sebanyak 0,31 atau berkurang sebanyak 138 tempat tidur, sedangkan di provinsi Papua mengalami penurunan rasio sebanyak 0,16 atau berkurang sebanyak 232 tempat tidur (**Tabel 28**).

Tabel 28:

Jumlah Rumah Sakit dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk

Provinsi	2015			2019			Δ (2015 - 2019)		
	RS	Tempat Tidur		RS	Tempat Tidur		RS	Tempat Tidur	
		Jumlah	Rasio		Jumlah	Rasio		Jumlah	Rasio
Papua Barat	16	1.540	1,77	19	1.402	1,46	3	-138	-0,31
Papua	40	4.287	1,36	44	4.055	1,2	4	-232	-0,16
PAPUA	56	5.827	1,565	63	5457	1,33	7	-370	-0,24

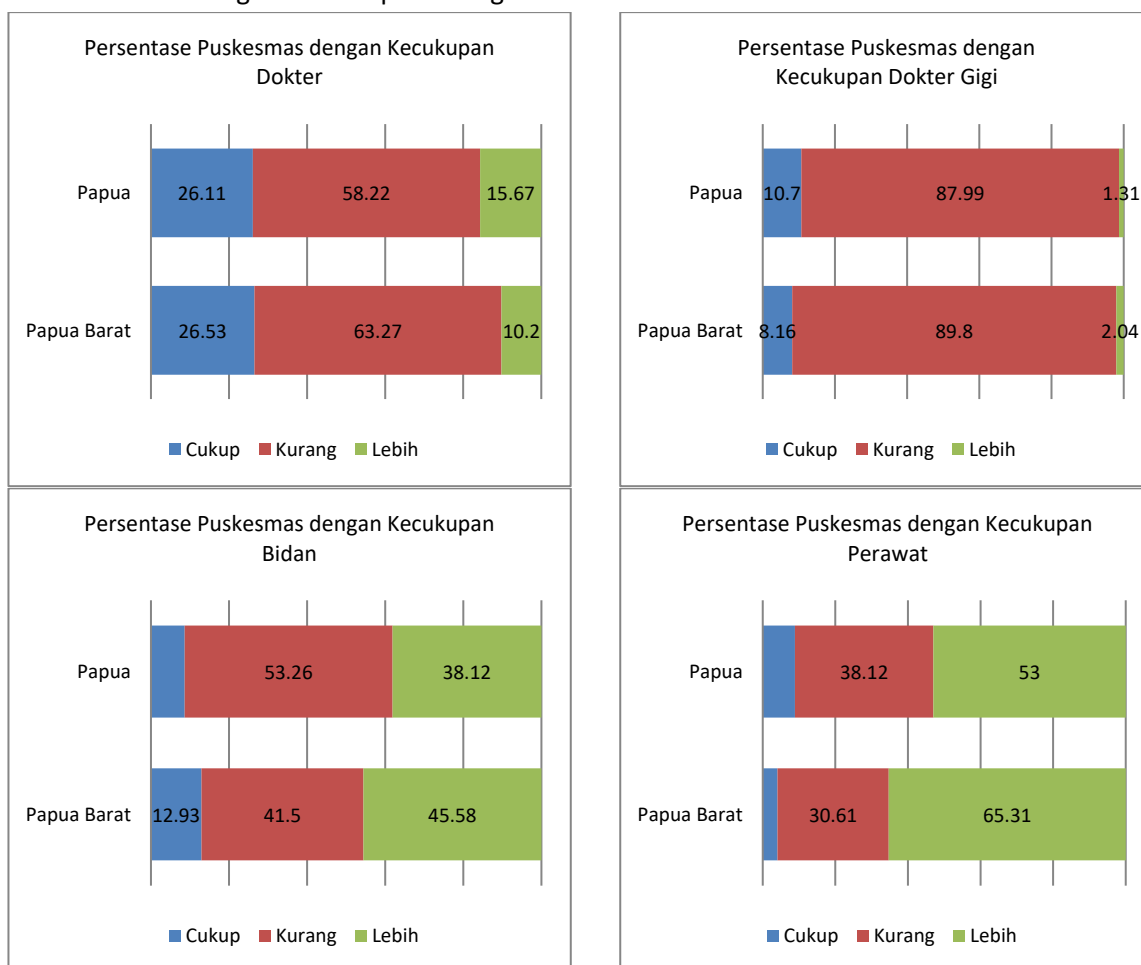
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

3.2.5. Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas

Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas diatur berdasarkan Permenkes, yaitu pada puskesmas non rawat inap minimal jumlah dokter adalah satu orang, sedangkan pada puskesmas rawat inap minimal jumlah dokter dua orang, baik pada wilayah perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Berdasarkan gambaran tingkat kecukupan tersebut, proporsi puskesmas dengan kekurangan dokter dan dokter gigi masih sangat tinggi. Persentase puskesmas kekurangan dokter tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat (63,27%), sementara di Provinsi Papua (58,22%). Kondisi puskesmas kekurangan dokter gigi persentasenya lebih tinggi lagi, yakni di Provinsi Papua Barat sebanyak 89,8 persen, dan Provinsi Papua sebanyak 87,99 persen.

Gambar 31:

Gambaran Tingkat Kecukupan Tenaga Medis di Puskesmas menurut Provinsi Tahun 2019



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019, Kemenkes

Persentase puskesmas kekurangan tenaga kesehatan perawat, tertinggi di Provinsi Papua sebanyak 53,26 persen, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebanyak 41,5 persen. Sementara itu, sebanyak 45,58 persen puskesmas di Provinsi Papua Barat telah mencapai kategori lebih badan. Persentase puskesmas kekurangan perawat di Provinsi Papua sebanyak 38,12 persen, lebih tinggi dibanding dengan Provinsi Papua Barat sebanyak 30,61 persen. Sementara itu, persentase perawat di Provinsi Papua Barat sebanyak 65,31 persen sudah termasuk kategori lebih.

3.3. Ekonomi Masyarakat

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Riil Yang Disesuaikan. Kondisi ekonomi masyarakat diantaranya dapat didekati dengan perhitungan standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao, dan menjadi komponen dalam perhitungan IPM.

Gambaran dari standar hidup layak masyarakat wilayah Papua selama periode 2015-2019 berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menunjukkan tren peningkatan, dengan rata-rata pengeluaran perkapita pada tahun 2019 sebesar Rp. 644.208 perkapita/bulan.

Standar hidup layak masyarakat wilayah Papua antarprovinsi menunjukkan variasi nilai yang beragam, pengeluaran perkapita tahun 2019 tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 677.083,00 perkapita/bulan, dan di Provinsi Papua sebesar Rp. 611,333 perkapita/bulan. Sementara berdasarkan nilai pertumbuhan pengeluaran perkapita selama 5 tahun terakhir, tertinggi di Provinsi Papua Barat sebesar 15,02 persen atau Rp. 88,417,00, dan pertumbuhan di Provinsi Papua sebesar 13,40 persen atau meningkat sebanyak Rp.72.250,00.

Tabel 29:

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Disesuaikan Antarprovinsi Tahun 2015-2019

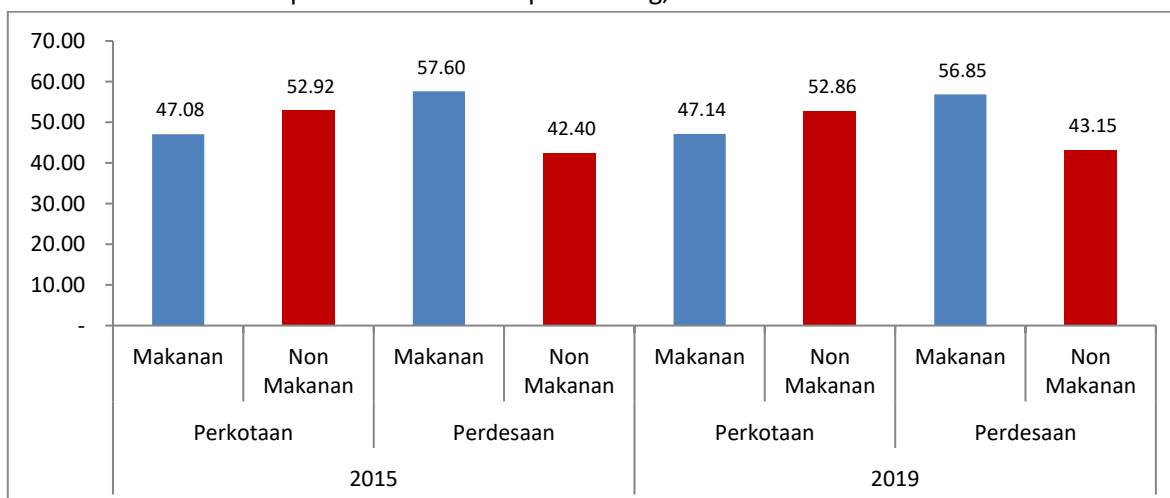
Provinsi	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp./bulan)						Pertumbuhan 2015-2019 (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	Δ (2019-2015)	
Papua Barat	588.667	597.917	624.417	651.333	677.083	88.417	15,02
Papua	539.083	553.083	583.000	596.583	611.333	72.250	13,40
PAPUA	563.875	575.500	603.708	623.958	644.208	80.333	14,25

Sumber: BPS, 2020

Rata-Rata Pengeluaran Untuk Konsumsi. Persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan (Hukum Engel). Porsi pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Porsi pengeluaran pangan semakin kecil, menggambarkan tingkat kesejahteraan yang makin membaik (Trisnowati,2013).

Gambar 32:

Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Papua menurut Kelompok Barang, Tahun 2015 dan 2019



Sumber: Susenas, BPS.

Pada tahun 2015 dan 2019, rata-rata pengeluaran per kapita/bulan masyarakat di perdesaan seluruh provinsi di wilayah Papua sebagian besar untuk makanan, dan sedikit adanya penurunan persentase untuk makanan di tahun 2019 sebanyak 0,74 persen. Sementara itu, untuk persentase rata-rata pengeluaran per kapita/bulan masyarakat di perkotaan sebagian besar untuk bukan makanan, namun terjadi penurunan dari persentase untuk bukan makanan pada tahun 2019 sebesar 0,06 persen dibanding tahun 2015. Berdasarkan gambaran perubahan persentase pengeluaran perkapita/bulan antar tahun 2015 dan 2019, menunjukkan porsi pengeluaran untuk bukan makanan di perdesaan sedikit meningkat, artinya hal ini mengindikasikan adanya sedikit peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, namun sebaliknya jika dibanding dengan perkotaan.

Perubahan persentase pengeluaran untuk makanan antarprovinsi pada tahun 2015 dan 2019, di perkotaan terjadi di Provinsi Papua terjadi penurunan persentase untuk makanan sebanyak 1,17 persen, yang diikuti oleh peningkatan persentase untuk bukan makanan. Sedangkan di perdesaan terjadi penurunan persentase untuk makanan sebanyak 5,77 persen. Di Provinsi Papua Barat menunjukkan kondisi sebaliknya yaitu di perkotaan dan perdesaan terjadi peningkatan persentase untuk makanan masing-masing sebanyak 1,43 persen (perkotaan) dan 2,33 persen (perdesaan).

Tabel 30:

Persentase Pengeluaran Perkapita/Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Perdesaan/Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	2015				2019				Δ (2019-2015)			
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan		Perdesaan	
	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
Papua Barat	46,71	53,29	52,46	47,54	48,14	51,86	54,79	45,21	1,43	-1,43	2,33	-2,33
Papua	47,41	52,59	64,90	35,10	46,24	53,76	59,13	40,87	-1,17	1,17	-5,77	5,77
PAPUA	47,08	52,92	57,60	42,40	47,14	52,86	56,85	43,15	0,06	-0,06	-0,74	0,74

Sumber: Susenas, BPS tahun 2019.



PEREKONOMIAN DAERAH

- ❖ Ekonomi wilayah Papua periode 2015-2020 dari sisi lapangan usaha didominasi sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi cenderung menurun, sebaliknya sektor industri pengolahan mengalami peningkatan.
- ❖ Transformasi struktur ekonomi wilayah Papua relatif lambat, dan menunjukkan adanya pergeseran dari sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pertanian ke sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran.
- ❖ Perekonomian wilayah Papua dari sisi pengeluaran didominasi oleh konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah dengan kecenderungan menurun, sebaliknya kontribusi dari komponen ekspor dan impor luar negeri cenderung meningkat.
- ❖ Nilai realisasi PMA dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dengan nilai realisasi investasi terbesar terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2019 sebesar 83,6 persen.
- ❖ Perdagangan wilayah Papua didominasi non-migas rata-rata mencapai 53,64 persen, dengan proporsi nilai ekspor terbesar dari Provinsi Papua. dan sebaliknya untuk ekspor migas terbesar dari Provinsi Papua Barat.
- ❖ Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan perikanan budidaya tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 kecuali budidaya kolam, keramba, jaring apung dan sawah. Daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar berada di Provinsi Papua dan untuk perikanan budidaya di Provinsi Papua Barat.
- ❖ Rasio kemandirian daerah Provinsi Papua dan Papua Barat pada periode 2015-2019 menunjukkan tren yang fluktuatif, dan menunjukkan penurunan pada periode tahun 2018-2019, dan meningkat Kembali di tahun 2019.
- ❖ Peningkatan rasio kemandirian di Provinsi Papua Barat (0,78%) lebih tinggi dari Provinsi Papua (0,28%).
- ❖ Kapasitas fiskal di Provinsi Papua menunjukkan penurunan dari kategori sedang (tahun 2015) menjadi kategori sangat rendah (tahun 2019), sedangkan di Provinsi Papua Barat menunjukkan penurunan kategori kapasitas fiskal sangat tinggi (2015-2016) menjadi sedang (2017-2019)



4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peran dan Struktur Ekonomi Papua. Nilai PDRB wilayah Papua tahun 2015 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 213,2 triliun meningkat menjadi Rp. 274,1 triliun pada tahun 2019, dan berdasarkan harga konstan (2015) sebesar Rp. 182,7 triliun meningkat menjadi Rp. 196,7 triliun pada tahun 2019 (**Tabel 31**). Peran perekonomian wilayah Pulau Papua terhadap pembentukan PDB nasional selama periode 2015-2020 Triwulan II rata-rata sebesar 1,83 persen, dengan peran yang cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2020 triwulan II. Sementara untuk kontribusi perekonomian wilayah Papua terbesar disumbang dari Provinsi Papua, yaitu rata-rata sebesar 71,10 persen, dan kontribusi Provinsi Papua Barat rata-rata sebesar 28,90 persen (**Tabel 32**).

Tabel 31:

Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2020, (dalam triliun rupiah)

Provinsi	Nilai ADHB						Nilai ADHK					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Papua Barat	62,9	66,6	71,8	79,6	84,3	41,2	52,3	54,7	56,9	60,5	62,1	30,5
Papua	150,3	173,2	188,9	210,8	189,7	94,3	130,3	142,2	148,8	159,8	134,7	65,7
PAPUA	213,2	239,8	260,7	290,4	274,1	135,5	182,7	196,9	205,7	220,3	196,7	96,2

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Tabel 32:

Peran Ekonomi Wilayah Papua terhadap Perekonomian Nasional ADHB
Tahun 2015-2020, (dalam persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_Tr II	Rata-Rata
Papua Barat	0,54	0,53	0,52	0,53	0,52	0,53	0,53
Papua	1,29	1,37	1,37	1,41	1,18	1,21	1,31
PAPUA	1,83	1,90	1,90	1,94	1,70	1,73	1,83

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Tabel 33:

Peran Ekonomi Provinsi terhadap Perekonomian Wilayah Papua ADHB
Tahun 2015-2020, (dalam persen)

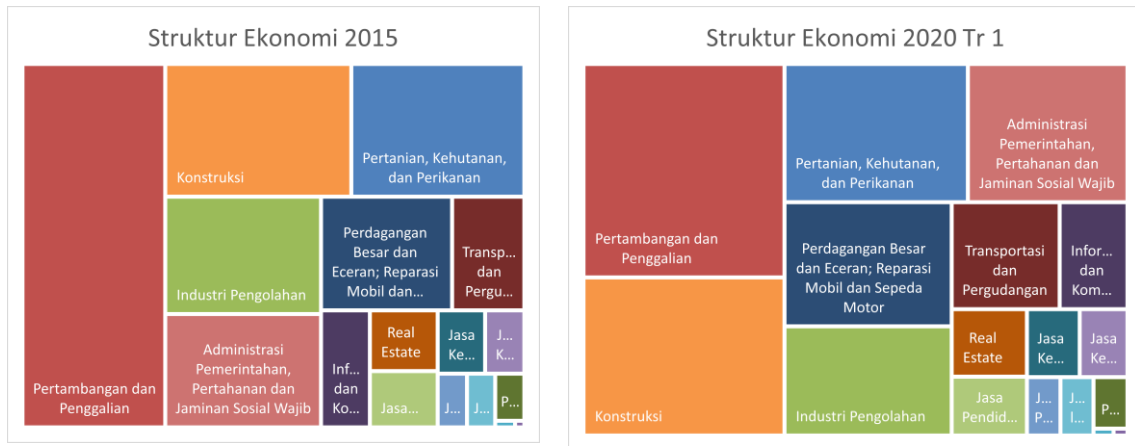
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020_Tr II	Rata-rata
Papua Barat	29,50	27,78	27,53	27,43	30,78	30,38	28,90
Papua	70,50	72,22	72,47	72,57	69,22	69,62	71,10

Sumber: PDRB Provinsi 2015-2020, BPS

Struktur perekonomian wilayah Papua selama 2015-2020 Triwulan I relatif belum mengalami perubahan yang signifikan, dimana sumbangan ekonomi terbesar dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, dan sektor administrasi pemerintahan (**Gambar 33**). Sementara untuk kontribusi perekonomian provinsi, kontribusi perekonomian Provinsi Papua Barat dan Papua terbesar disumbang dari sektor industri pengolahan (Papua Barat), sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor administrasi pemerintahan (**Gambar 34**).

Gambar 33:

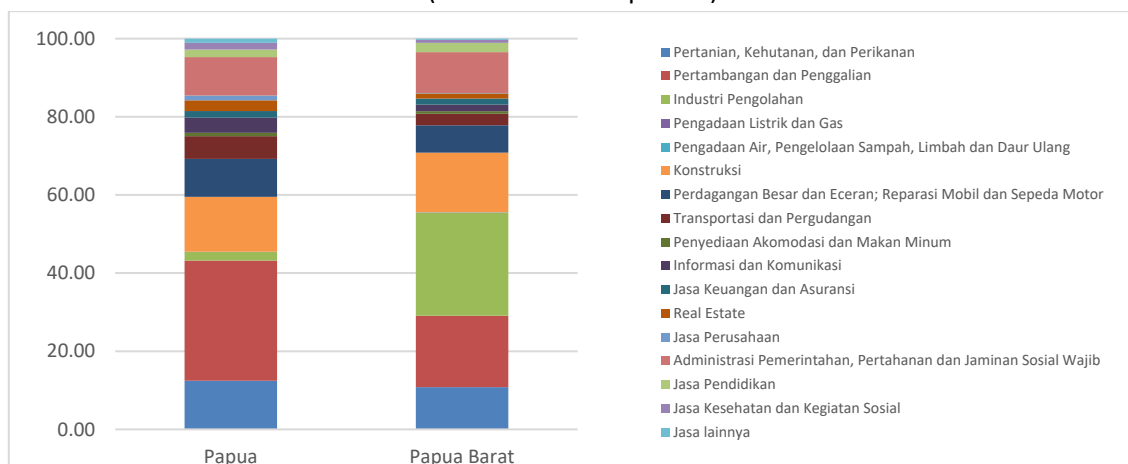
Perkembangan Struktur Perekonomian Wilayah Papua ADHB Tahun 2015 dan 2020 Triwulan I, (dalam persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

Gambar 34:

Struktur Perekonomian Provinsi di Wilayah Papua ADHB Tahun 2015-2020, (rata-rata dalam persen)



Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2015-2020, BPS

PDRB Perkapita, Perkembangan PDRB perkapita provinsi di wilayah Papua selama periode 2015-2019 rata-rata tumbuh positif, kecuali di Provinsi Papua tumbuh -17,13 pada tahun 2019 (**Tabel 35**). Perkembangan PDRB perkapita provinsi cenderung meningkat, sementara dari perbandingan PDRB perkapita antarprovinsi pada tahun 2019, menunjukkan adanya ketimpangan cukup besar, yakni PDRB perkapita Provinsi Papua sebesar Rp. 64.683 ribu/jiwa, sedangkan PDRB perkapita di Provinsi Papua Barat 2019 sebesar Rp. 39.854 ribu/jiwa (**Tabel 36**).

Tabel 35:

Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK (2010) menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2016-2019, (persen)

Provinsi	2016	2017	2018*	2019**
Papua Barat	1,96	1,52	3,74	0,29
Papua	7,17	2,79	5,52	-17,13

Sumber: PDRB 2019, BPS

Tabel 36:

Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB menurut Provinsi di Wilayah Papua
Tahun 2015-2019, (Rp. ribu/jiwa)

Provinsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
Papua Barat	60.064	61.242	62.170	64.498	64.683
Papua	41.377	44.342	45.577	48.093	39.854

Sumber: PDRB 2019, BPS

PDRB Pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua selama periode 2015-2019 dari sisi pengeluaran sebagian besar komponen pengeluaran tumbuh positif, kecuali ekspor dan impor luar negeri dan perubahan inventori tumbuh negatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen net-ekspor antardaerah yang tumbuh sebesar 16,87 persen, dan konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 14,92 persen. Sementara pertumbuhan pada tahun 2020 Triwulan I bersamaan dengan pandemi Covid 19, hampir semua komponen tumbuh negatif, kecuali komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan PMTB masih tumbuh positif (**Tabel 36**).

Tabel 36:

Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Papua
Tahun 2015-2020 Triwulan I, (dalam persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr1	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,01	6,02	5,68	5,62	3,96	2,99	5,05
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,53	6,24	9,49	5,94	14,92	(13,99)	4,52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,93	1,44	2,40	1,46	3,93	1,55	2,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,93	6,07	4,82	6,10	3,87	1,67	5,08
5. Perubahan Inventori	(170,44)	91,35	48,89	(19,80)	(113,22)	(136,07)	(49,88)
6. Ekspor Luar Negeri	24,40	(6,41)	(6,15)	35,61	(37,45)	(29,07)	(3,18)
7. Impor Luar Negeri	(20,24)	10,98	(36,74)	12,33	(24,01)	(21,78)	(13,24)
8. Net Ekspor Antar Daerah	424,32	(59,34)	1,29	143,61	16,87	(51,62)	79,19
PDRB	6,41	7,82	4,46	7,06	(10,67)	2,63	2,95

Sumber: PDRB 2019, BPS

Sumber utama pertumbuhan ekonomi wilayah Papua dari sisi pengeluaran terbesar dari konsumsi rumah tangga dengan andil rata-rata sebesar 1,87 persen, diikuti komponen PMTB rata-rata sebesar 1,26 persen, dan konsumsi pemerintah rata-rata sebesar 0,47 persen (**Tabel 37**). Sementara sumber pertumbuhan utama Provinsi Papua terbesar dari komponen konsumsi rumah tangga dan komponen PMTB, sementara andil terbesar Provinsi Papua Barat bersumber dari komponen net-ekspor antardaerah, konsumsi rumah tangga, dan PMTB (**Tabel 39**).

Tabel 37:

Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Papua
Tahun 2015-2020 Triwulan I, (dalam persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr1	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,21	2,21	2,05	2,05	1,43	1,27	1,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,06	0,09	0,13	0,09	0,21	(0,29)	0,05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,94	0,27	0,42	0,25	0,65	0,26	0,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,95	1,51	1,18	1,50	0,94	0,45	1,26
5. Perubahan Inventori	1,54	0,55	0,52	(0,30)	(1,28)	2,59	0,60
6. Ekspor Luar Negeri	6,79	(2,09)	(1,74)	9,04	(12,04)	(7,94)	(1,33)
7. Impor Luar Negeri	(1,39)	0,56	(1,95)	0,40	(0,81)	(0,77)	(0,66)
8. Net Ekspor Antar Daerah	(8,48)	5,85	(0,05)	(5,17)	(1,38)	5,51	(0,62)
PDRB	6,41	7,82	4,46	7,06	(10,67)	2,63	2,95

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

Tabel 38:
Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi di Wilayah Papua
Provinsi di Pulau Papua Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)

Komponen Pengeluaran	Papua	Papua Barat
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,89	5,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,97	2,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,92	1,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,20	4,61
5. Perubahan Inventori	630,91	267,06
6. Ekspor Luar Negeri	(9,76)	0,46
7. Impor Luar Negeri	(18,68)	26,29
8. Net Ekspor Antar Daerah	(121,33)	(9,87)
PDRB	2,38	4,46

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

Tabel 39:
Sumber Pertumbuhan PDRB Pengeluaran ADHK (Tahun 2010) Provinsi di Wilayah Papua
Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)

Komponen Pengeluaran	Papua	Papua Barat
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,02	1,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,06	0,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,54	0,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,42	0,85
5. Perubahan Inventori	1,02	(0,24)
6. Ekspor Luar Negeri	(1,60)	(0,53)
7. Impor Luar Negeri	(1,05)	0,28
8. Net Ekspor Antar Daerah	(2,13)	2,86
PDRB	2,38	4,46

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

Struktur perekonomian wilayah Papua dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar disumbang dari konsumsi rumah tangga rata-rata sebesar 64,18 persen; diikuti komponen pengeluaran konsumsi pemerintah rata-rata 34,20 persen, PMTB sebesar 35,06 persen; dan komponen impor barang dan jasa sebesar 17,66 persen; dan komponen ekspor sebesar 11,46 persen (**Tabel 40**). Hal yang sama untuk struktur perekonomian provinsi, penyumbang terbesar dari konsumsi rumah tangga, komponen PMTB, konsumsi pemerintah, dan komponen ekspor dan impor luar negeri (**Tabel 41**).

Tabel 40:
Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB (Tahun 2010) Wilayah Papua
Tahun 2015-2020 Triwulan I, (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Tr 1	Rata-rata
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64,79	65,84	65,16	63,22	63,18	62,89	64,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,75	1,80	1,82	1,85	2,02	2,05	1,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	37,11	36,44	35,38	34,18	33,05	29,04	34,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,71	29,24	30,81	32,86	40,77	48,96	35,06
5. Perubahan Inventori	(0,33)	0,66	0,12	0,97	(0,51)	3,34	0,71
6. Ekspor Luar Negeri	6,02	6,21	9,82	16,50	18,05	12,17	11,46
7. Impor Luar Negeri	9,91	12,19	11,58	14,90	24,02	33,38	17,66
8. Net Ekspor Antar Daerah	(27,14)	(27,99)	(31,54)	(34,68)	(32,54)	(25,07)	(29,83)

Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

Tabel 41:

Share PDRB menurut Pengeluaran ADHB Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2020 Triwulan I, (rata-rata persen)

Komponen Pengeluaran	Papua	Papua Barat
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49,80	28,40
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	2,12	0,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21,28	19,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,24	20,64
5. Perubahan Inventori	(0,90)	1,82
6. Ekspor Luar Negeri	15,48	42,94
7. Impor Luar Negeri	4,68	2,02
8. Net Ekspor Antar Daerah	(15,33)	(12,27)

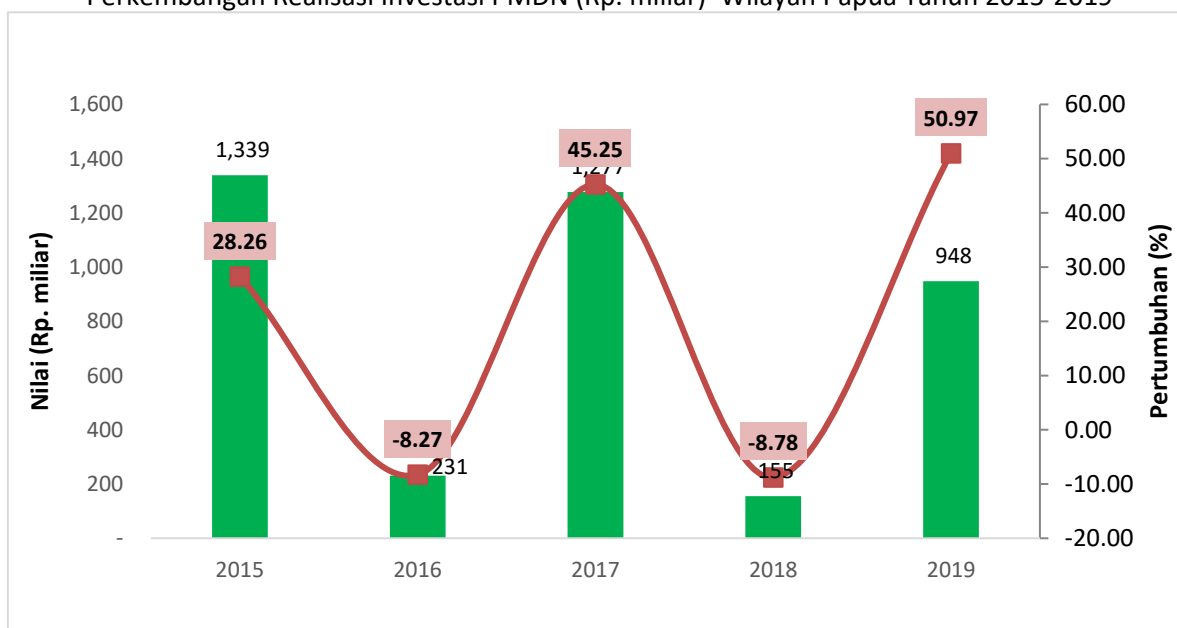
Sumber: PDRB Pengeluaran, BPS 2020

4.2. Investasi PMA dan PMDN

Investasi PMDN dan PMA. Nilai PMDN wilayah Papua Tahun 2019 mencapai 965,5 miliar rupiah atau rata-rata (2015-2019) sekitar 0,35 persen dari total realisasi PMDN nasional. Perkembangan realisasi investasi PMDN di wilayah Papua selama periode 2015-2019 cukup fluktuatif dan mengalami peningkatan cukup tajam di tahun 2017 dengan nilai PMDN sebesar Rp. 1.202,9 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp. 3.289,8 miliar (**Gambar 35**). Secara spasial penyebaran Investasi PMDN di wilayah Papua relatif merata, proporsi PMDN di Papua Barat sebesar 49,9 persen dan di Provinsi Papua sebesar 50,1 persen (**Gambar 36**).

Gambar 35:

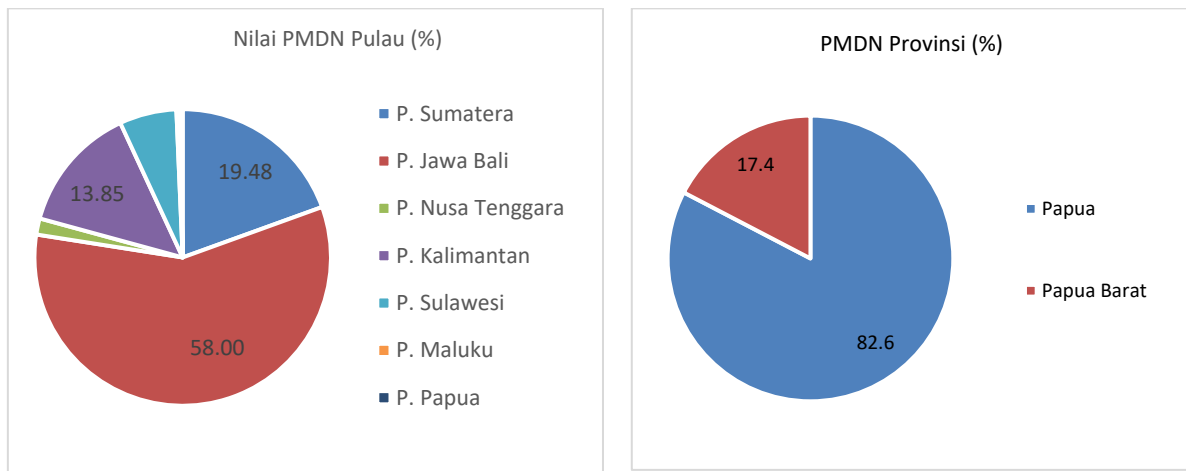
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. miliar) Wilayah Papua Tahun 2015-2019



Sumber: BKPM, Tahun 2019

Gambar 36:

Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMDN (%) menurut Wilayah dan Provinsi Tahun 2015-2019

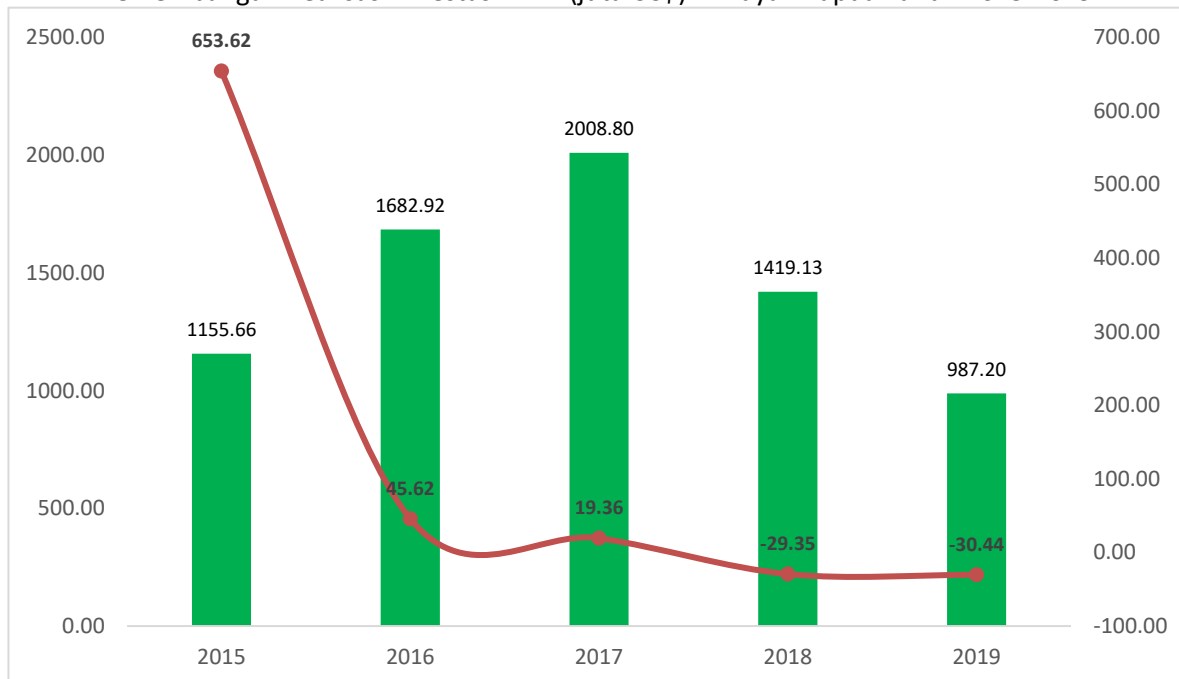


Sumber : BKPM, Tahun 2019

Nilai realisasi PMA wilayah Papua tahun 2019 mencapai 1.041 juta US\$ atau rata-rata (2015-2019) sekitar 1,83 persen dari total realisasi PMA nasional. Perkembangan realisasi investasi PMA di wilayah Papua selama periode 2015-2019 terakhir mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2018, namun pada akhir tahun 2019 PMA tumbuh sebesar 180 persen dari tahun 2018 (**Gambar 37**). Secara spasial penyebaran Investasi PMA di wilayah Papua terbesar di Provinsi Papua Barat yaitu rata-rata sebesar 68,1 persen lebih tinggi dibandingkan nilai PMA di Povinsi Papua (**Gambar 38**).

Gambar 37:

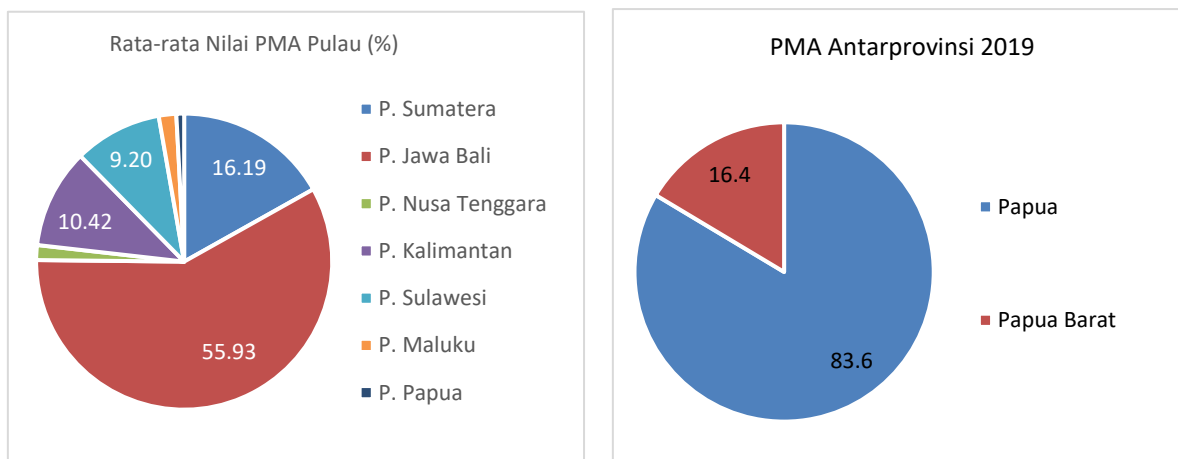
Perkembangan Realisasi Investasi PMA (juta US\$) Wilayah Papua Tahun 2015-2019



Sumber : BKPM, Tahun 2019

Gambar 38:

Distribusi Nilai Realisasi Investasi PMA (%) menurut Wilayah dan Provinsi Tahun 2015-2019



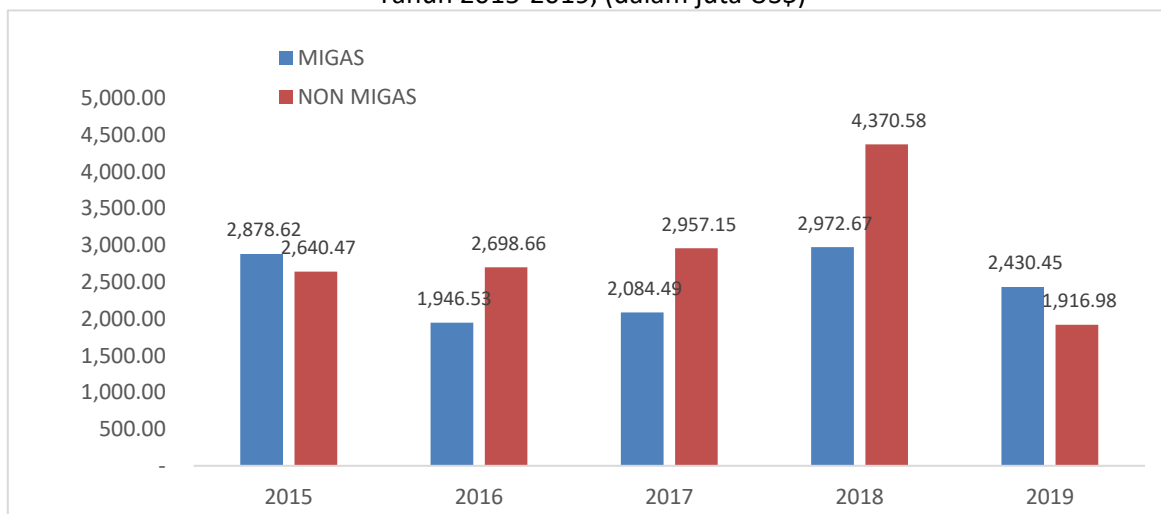
Sumber : BKPM, Tahun 2019

4.3. Ekspor dan Impor

Perdagangan Ekspor-Impor. Perkembangan perdagangan wilayah Papua selama periode 2015-2019 didominasi perdagangan non-migas dengan porsi rata-rata mencapai 53,64 persen. Pada Tahun 2019 tercatat nilai perdagangan non-migas sebesar 1.910,98 juta US\$ menurun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.370,58 juta US\$. Hal yang sama untuk nilai perdagangan migas menurun pada tahun 2019 tercatat sebesar 2.430,45 juta US\$ menurun dari tahun 2018 yang mencapai 2.972,67 juta US\$ (**Gambar 39**). Secara spasial perdagangan migas lebih didominasi dari Provinsi Papua Barat yaitu rata-rata mencapai 93,04 persen, sebaliknya untuk perdagangan non-migas didominasi Provinsi Papua rata-rata mencapai 93,48 persen dari total perdagangan non-migas wilayah Papua (**Gambar 40**).

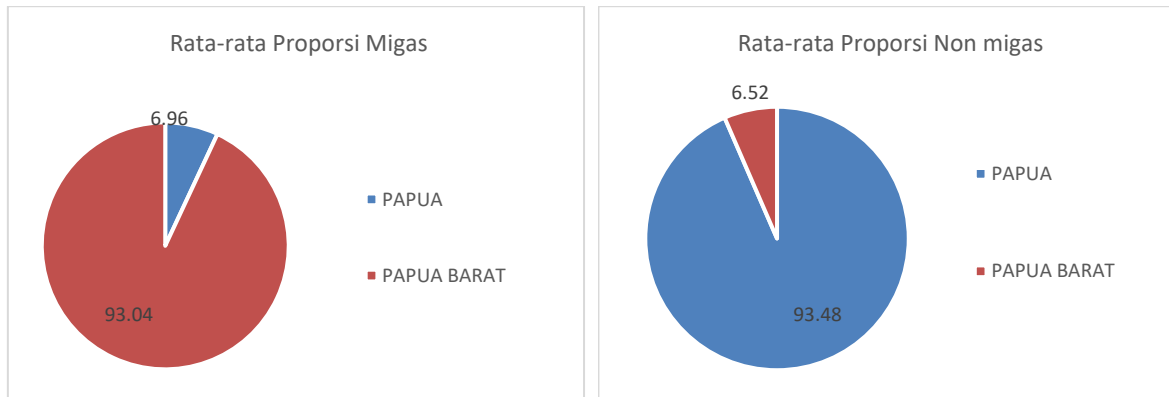
Gambar 39:

Perkembangan Perdagangan Migas dan Non-migas Wilayah Papua dan Provinsi Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan 2019

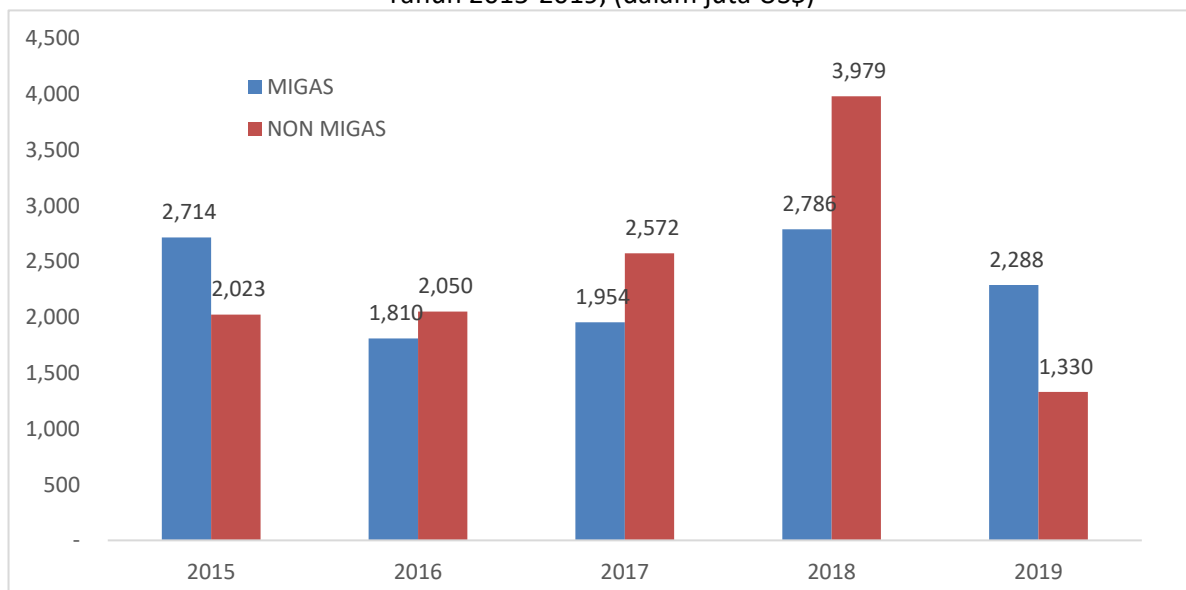
Gambar 40:
Perdagangan Migas dan Non-migas menurut Provinsi di Wilayah Papua
Tahun 2015-2019, (rata-rata dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan tahun 2019

Nilai ekspor wilayah Papua 2019 mencapai 3.617,77 juta US\$ meningkat dibandingkan dari nilai ekspor tahun 2018 yang mencapai 6.765,46 juta US\$. Nilai ekspor wilayah Papua dari migas tahun 2019 mencapai 2.288 juta US\$ menurun dibandingkan nilai ekspor migas tahun 2018 yang mencapai 2.786 juta US\$. Hal yang sama untuk perkembangan nilai ekspor non-migas terjadi penurunan, tahun 2019 tercatat sebesar 1.330 juta US\$ menurun dari tahun 2018 yang mencapai 3.979 juta US\$ (**Gambar 41**). Secara spasial nilai ekspor non-migas terbesar dari Provinsi Papua rata-rata mencapai 98,42 persen, sementara untuk nilai ekspor migas terbesar dari Papua Barat rata-rata mencapai 99,13 persen, (**Gambar 42**).

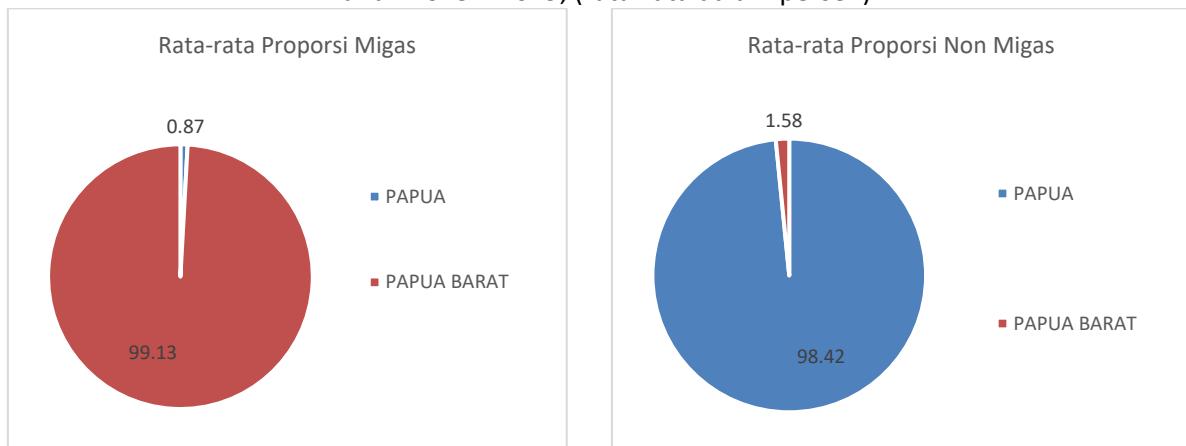
Gambar 41:
Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non-migas Wilayah Papua
Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan Tahun 2019

Gambar 42:

Kontribusi Nilai Ekspor Migas dan Non-migas menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 – 2019, (rata-rata dalam persen)

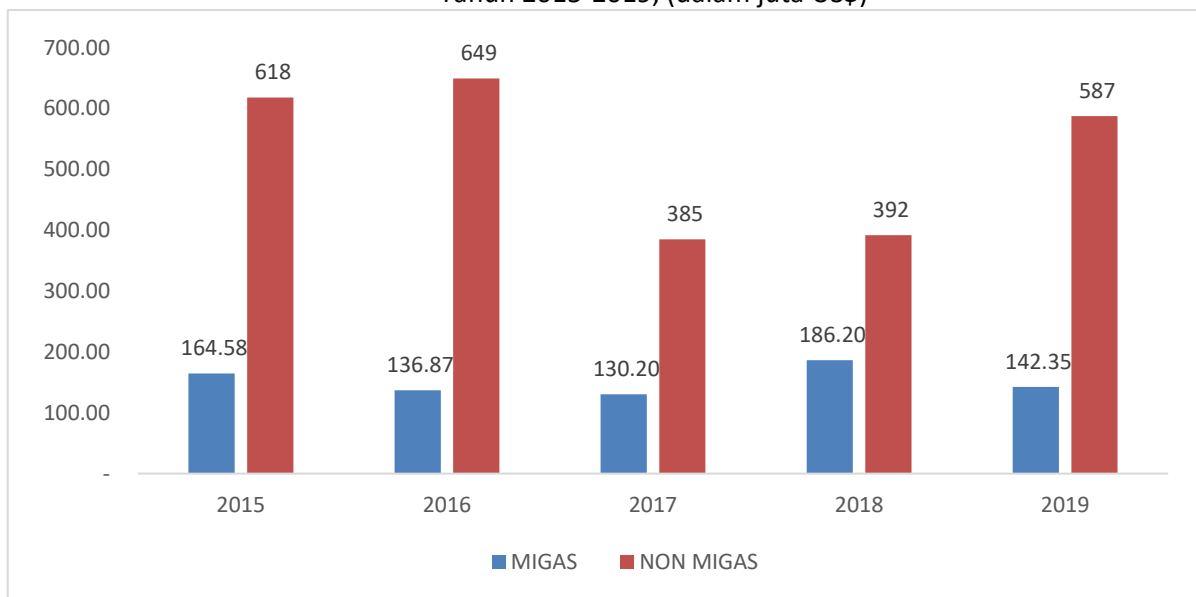


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan Tahun 2018

Nilai total Impor wilayah Papua 2019 mencapai 729,65 juta US\$ meningkat dari nilai impor tahun 2018 yang mencapai 577,80 juta US\$. Nilai impor masih didominasi oleh impor non-migas rata-rata mencapai 76,91 persen, nilai impor non-migas tahun 2019 mencapai 587 juta US\$ meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara untuk nilai impor migas tahun 2019 tercatat sebesar 143,20 juta US\$ sedikit menurun dari tahun 2018 yang mencapai 186,20 juta US\$ (**Gambar 43**). Secara spasial nilai impor non-migas dan migas terbesar dari Provinsi Papua, impor non-migas Provinsi Papua rata-rata tercatat sebesar 78,07 persen dan migas rata-rata sebesar 98,74 persen (**Gambar 44**).

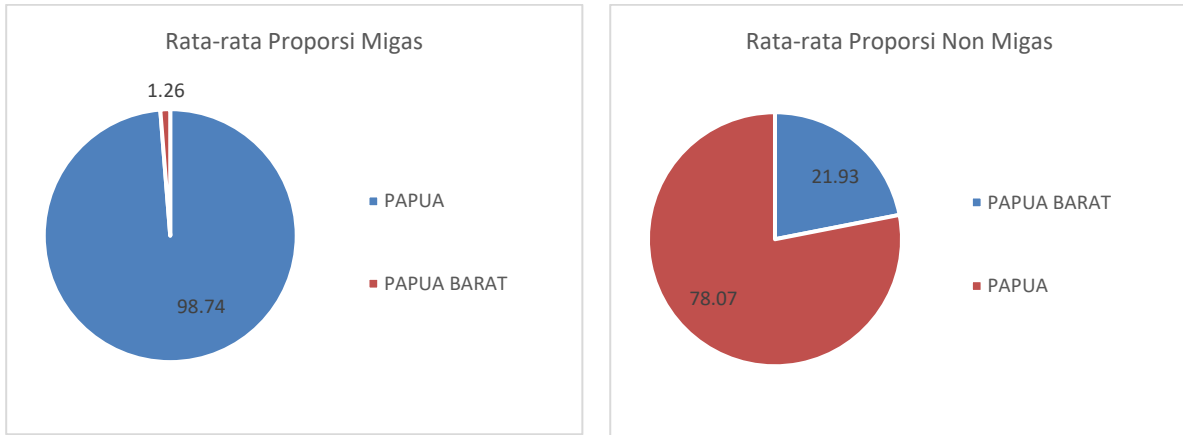
Gambar 43:

Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non-migas Wilayah Papua Tahun 2015-2019, (dalam juta US\$)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian perdagangan Tahun 2019

Gambar 44:
Perkembangan Kontribusi Nilai Impor Migas dan Non-migas Wilayah Papua
Tahun 2015-2019, (dalam persen)

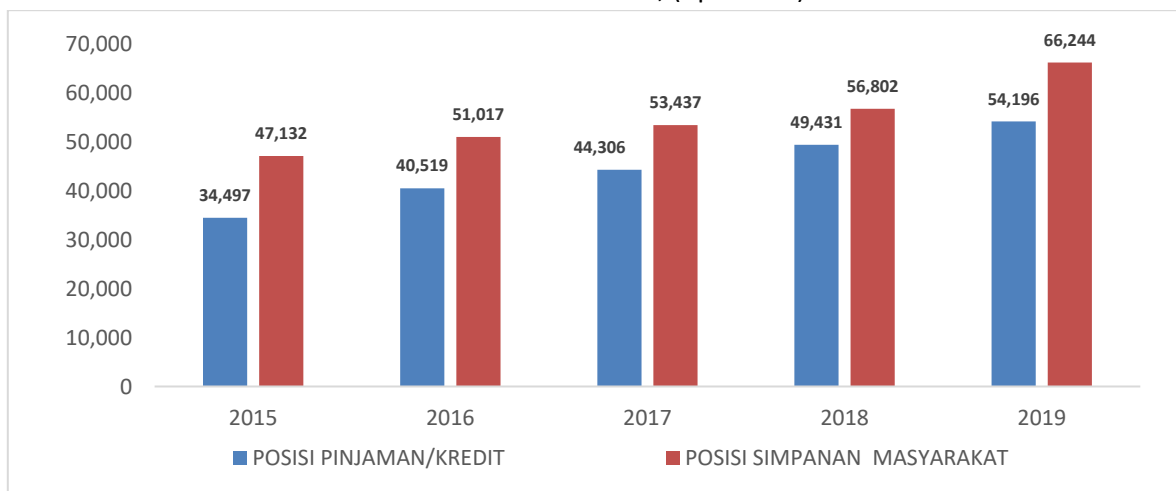


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian perdagangan Tahun 2019

4.4. Perbankan

Sektor perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dimana peranan penting perbankan yaitu dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah. Selama periode 2015-2019, jumlah tabungan masyarakat menurut rupiah dan valas Bank Umum dan BPR di wilayah Papua mengalami peningkatan, tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 47.132 miliar dan meningkat menjadi Rp 66.244 miliar pada tahun 2019. Hal yang sama untuk nilai pinjaman/kredit mengalami peningkatan, tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 34.497 miliar dan meningkat menjadi Rp 54.196 miliar (**Gambar 45**). Secara spasial distribusi nilai tabungan dan pinjaman terbesar terdapat di Provinsi Papua, nilai simpanan di Provinsi Papua 2019 tercatat sebesar Rp. 45.975 miliar dan nilai pinjaman sebesar Rp. 32.986 miliar. Sementara nilai simpanan di Provinsi Papua Barat tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 20.269 miliar, dan nilai pinjaman sebesar Rp. 21.216 miliar (**Gambar 46**).

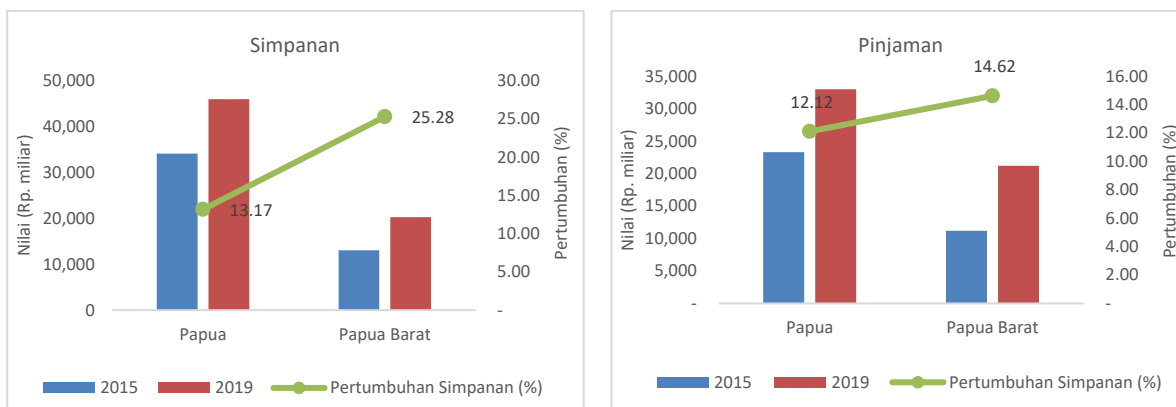
Gambar 45:
Perkembangan Nilai Pinjaman/Kredit dan Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR Tahun 2015-2019, (Rp. miliar)



Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019

Gambar 46:

Posisi Pinjaman/Kredit yang Diberikan Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi Tahun 2015-2019, (Rp. miliar)

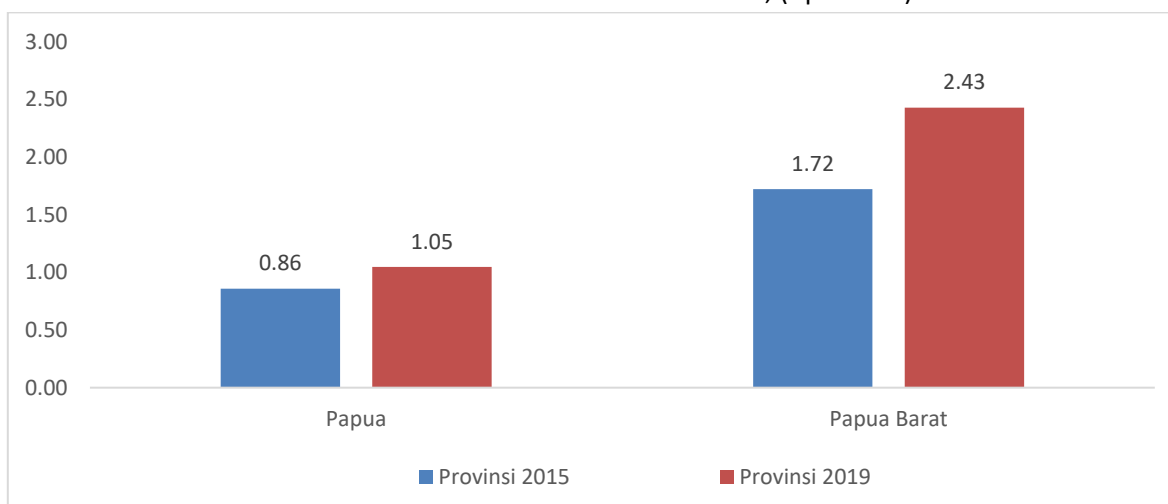


Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019

Sementara berdasarkan rasio pinjaman terhadap simpanan masyarakat Rupiah dan Valas pada Bank Umum dan BPR rata-rata sudah mencapai di atas 90 persen. Pada tahun 2019, tercatat rasio pinjaman terhadap simpanan di Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan peningkatan. Peningkatan rasio pinjaman terhadap simpanan di Provinsi Papua Barat lebih besar dibandingkan di Provinsi Papua. Tahun 2015 rasio pinjaman terhadap simpanan sebesar 1,72 meningkat di tahun 2019 menjadi 2,43, dan rasio pinjaman terhadap simpanan di Provinsi Papua tahun 2015 sebesar 0,87 meningkat di tahun 2019 menjadi 1,05 (**Gambar 47**).

Gambar 47:

Rasio Pinjaman/Kredit terhadap Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valas Bank Umum dan BPR menurut Provinsi Tahun 2015 dan 2019, (Rp. miliar)

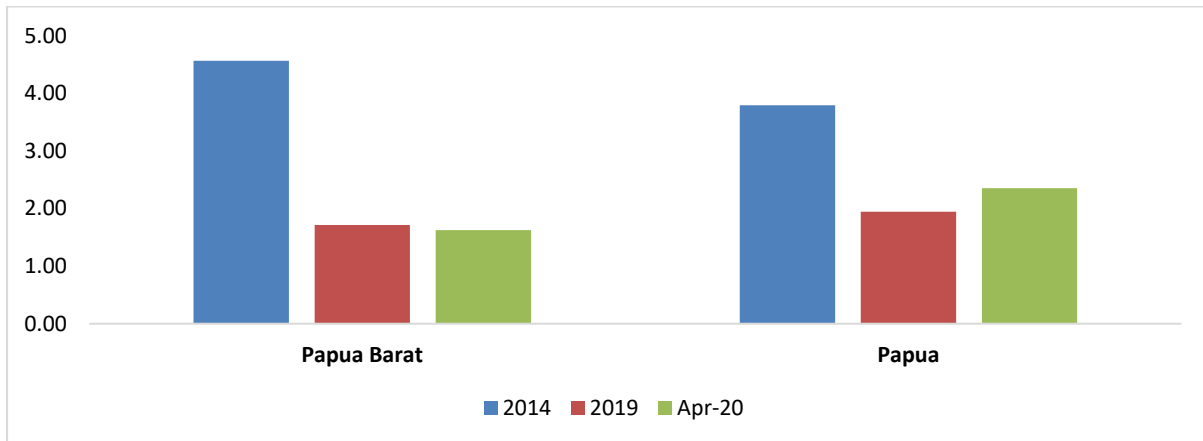


Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019

Sementara berdasarkan rasio kredit bermasalah terhadap jumlah pinjaman/kredit di wilayah Papua pada tahun 2019, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat cenderung turun jika dibandingkan dengan tahun 2014. Di masa pandemi covid 19, hanya Provinsi Papua Barat yang rasio kredit bermasalahnya menurun terhadap jumlah pinjaman pada April 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 (**Gambar 48**).

Gambar 48:

Rasio Kredit Bermasalah terhadap Pinjaman/Kredit menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2019



Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2018

4.5. Pembangunan Sektor Unggulan

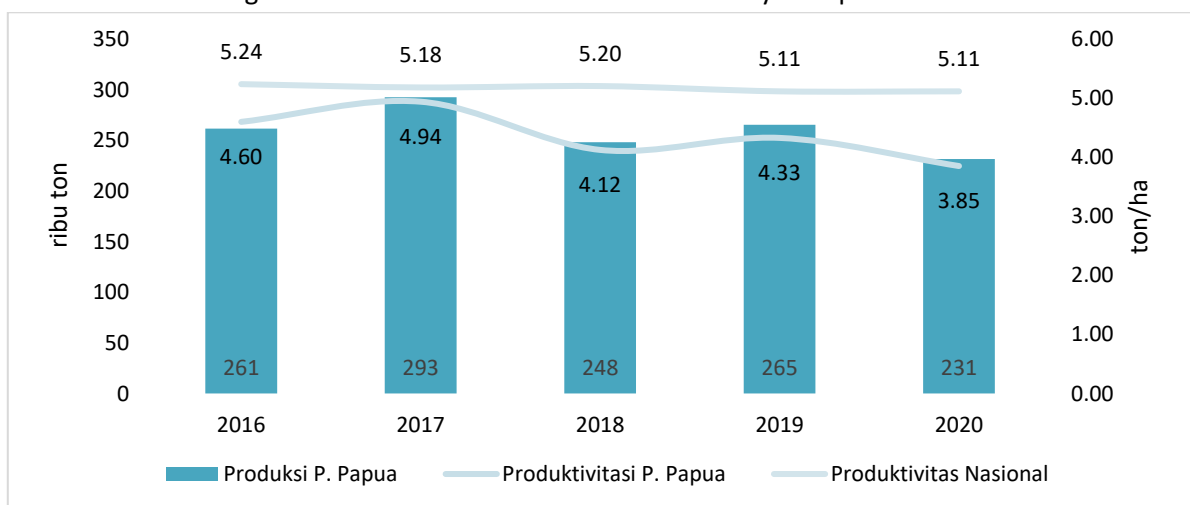
Pengembangan Sektor Pangan dan Perkebunan

Tanaman Pangan. Produksi padi tahun 2020 mencapai 231 ribu ton atau 0,42 persen dari total produksi padi Nasional, dengan produktivitas 3,85 ton/ha, masih lebih rendah dari produktivitas padi nasional (**Gambar 49**). Perkembangan produksi padi selama 2016-2020 rata-rata menurun 7,4 ribu ton per tahun dengan rata-rata pertumbuhan per tahun turun 2,28 persen per tahun. Tahun 2018 menjadi tahun dengan penurunan tertinggi sebesar 44,5 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan luas panen rata-rata 816 ha per tahun. Peningkatan luas panen tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai 2,36 ribu ha, tetapi hal ini tidak mempengaruhi produksi di tahun-tahun selanjutnya, dikarenakan setelah tahun 2017 produksinya tidak bertambah signifikan. Produksi padi terbesar berada di Provinsi Papua mencapai 205 ribu ton atau 88,8 persen dari produksi padi di wilayah Papua (**Gambar 50**).

Gambar 49:

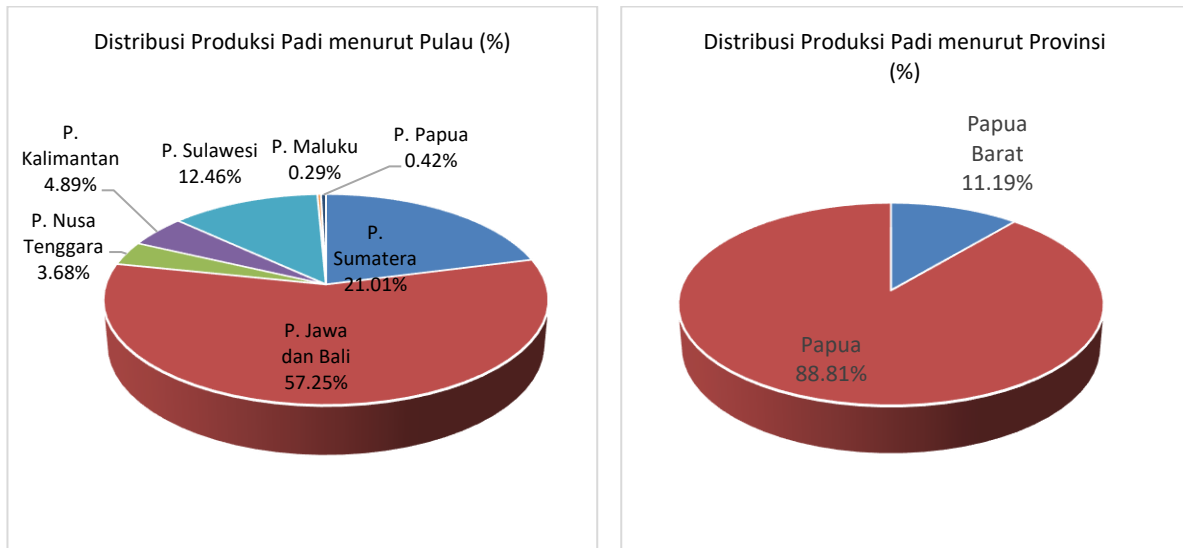
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi di Wilayah Papua Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Tahun 2020

Gambar 50 :

Distribusi Produksi Padi menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2020

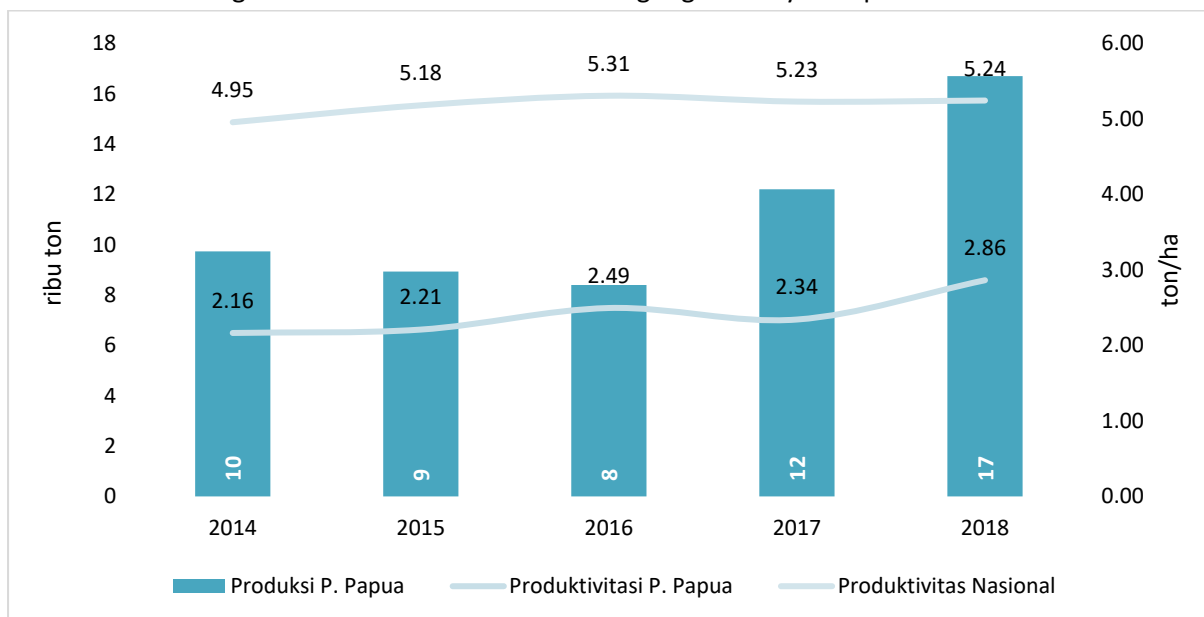


Sumber: BPS, Tahun 2020

Produksi jagung tahun 2018 mencapai 16,7 ribu ton atau sekitar 0,06 persen dari total produksi jagung nasional, dengan produktivitas sebesar 2,86 ton/ha lebih rendah dari produktivitas jagung nasional (5,24 ton/ha). Produksi jagung selama periode 2015-2018 rata-rata meningkat sebesar 1,7 ribu ton per tahun. Untuk luas panen juga terjadi peningkatan luas panen rata-rata sebesar 334 ha per tahun. Produksi jagung terbesar terdapat di Provinsi Papua diikuti oleh Provinsi Papua Barat, yaitu masing-masing mencapai 12,48 ribu ton (74,73 persen) dan 4,22 ribu ton (25,27 persen) dari produksi jagung wilayah Papua.

Gambar 51:

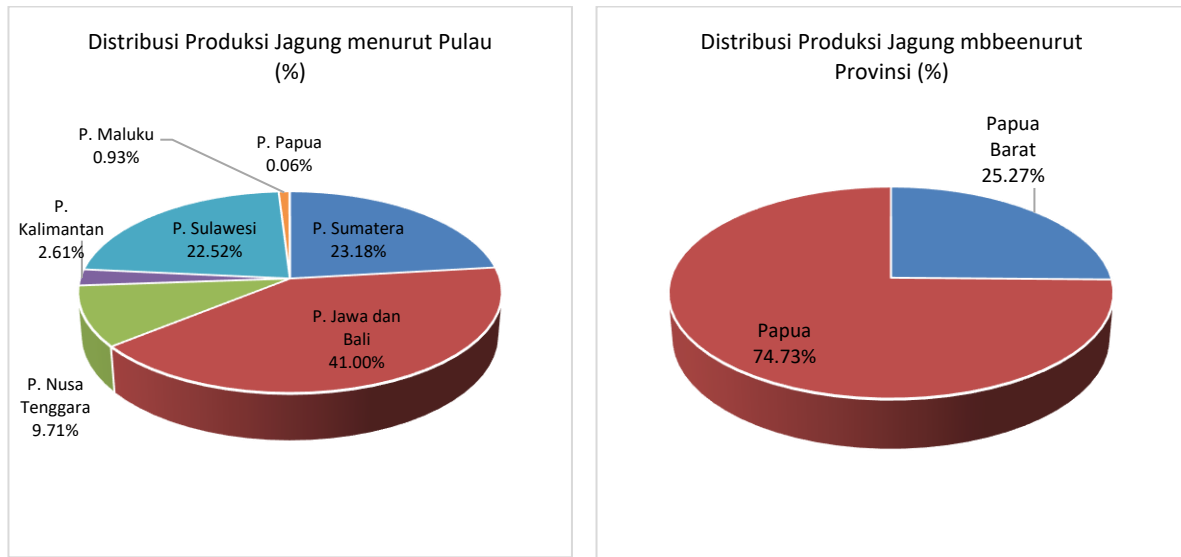
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jagung di Wilayah Papua Tahun 2014-2018



Sumber: BPS, Tahun 2020

Gambar 52 :

Distribusi Produksi Jagung menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2018.



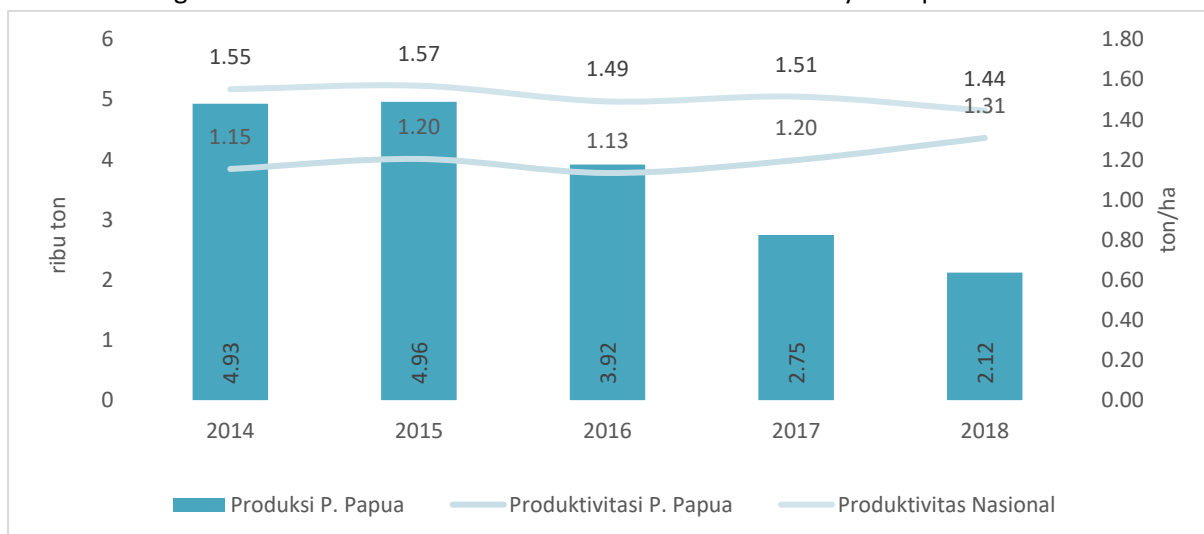
Sumber: BPS, Tahun 2019

Produksi kedelai tahun 2018 mencapai 2,12 ribu ton atau sekitar 0,22 persen dari total produksi kedelai nasional, dengan produktivitas sebesar 1,31 ton/ha atau lebih rendah dibandingkan produktivitas kedelai nasional (1,44 ton/ha). Produksi kedelai selama periode 2015-2018 mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan sebesar 702 ton per tahun atau 18,27 persen per tahun.

Terjadi penurunan produksi di tahun 2018 sebesar 627 ton atau sekitar 22,82 persen dari tahun sebelumnya. Untuk luas panen juga mengalami penurunan di tahun 2018 hingga 1,62 ribu ha dimana tahun sebelumnya 2,3 ribu ha, dengan share 0,24 persen terhadap luas lahan nasional. Produksi kedelai terbesar tahun 2018 di wilayah Papua terdapat di Provinsi Papua sebesar 1.7 ribu ton (83,07 persen), dan di Provinsi Papua Barat sebesar 359 ton (16,93 persen) dari produksi kedelai wilayah Papua.

Gambar 53:

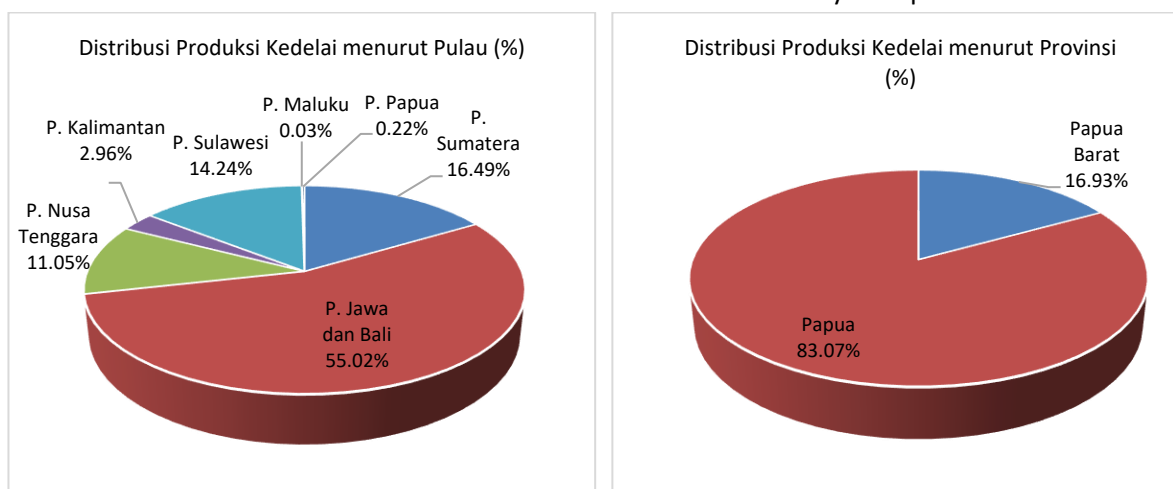
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kedelai di Wilayah Papua Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 54:

Distribusi Produksi Kedelai menurut Pulau dan Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2018



Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 42 :

Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Padi Tahun 2020 dan Jagung serta Kedelai Tahun 2018 menurut Provinsi di Wilayah Papua

Provinsi	Padi			Jagung			Kedelai		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Papua Barat	7.420	25.897	3,49	1,375	4,218	3.07	342	359	1.05
Papua	52.713	205.576	3,90	4,457	12,476	2.80	1,279	1,761	1.38

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tanaman Perkebunan. Komoditas terbesar yang dihasilkan di wilayah Papua antara lain kelapa sawit, kelapa, kakao, dan kopi (**Tabel 43**). Produksi kelapa sawit di wilayah Papua tahun 2019 sebesar 476,2 ribu ton atau 1,04 persen dari produksi kelapa sawit nasional, meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015. Selain kelapa sawit, komoditas lainnya adalah kelapa dengan produksi mencapai 31,5 ribu ton atau sekitar 1,11 persen dari total produksi kelapa nasional. Sementara kakao menghasilkan produksi sebesar 16,1 ribu ton atau 2,05 persen dari produksi kakao nasional. Komoditas lain yang juga memiliki *share* tinggi yaitu kopi sebesar sebesar 2,8 ribu ton atau 0,37 persen dari produksi nasional.

Tabel 43 :

Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Utama Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019

Komoditi	P. Papua (000 ton)		Nasional (000 ton)		Share (%)	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Kelapa Sawit	0.0	476.2	42,447.2	45,861.0	0.0	1.0
Kelapa	31.3	31.5	2,920.7	2,828.4	1.1	1.1
Karet	2.7	4.1	3,145.3	3,449.0	0.1	0.1
Kopi	2.0	2.8	639.2	761.1	0.3	0.4
Kakao	11.9	16.1	593.2	784.1	2.0	2.1
Tebu	0.0	0.0	2498.1	2258.2	0.0	0.0
Teh	0.0	0.0	132.5	137.8	0.0	0.0
Tembakau	0.0	0.0	193.7	197.4	0.0	0.0

Sumber: BPS, Tahun 2020

Produksi kelapa sawit terbesar terdapat di Provinsi Papua diikuti oleh Provinsi Papua Barat dengan produksi masing-masing sebesar 370,8 ribu ton dan 105,4 ribu ton. Sedangkan produksi kelapa terbesar di Provinsi Papua Barat dengan produksi sebesar 16,3 ribu ton atau 51,7 persen dari total produksi kelapa di Papua. Sementara produksi kakao dan kopi terbesar di wilayah Papua terdapat di Provinsi Papua, yaitu kakao sebesar 10,8 ribu ton dan kopi sebesar 2 ribu ton (**Tabel 44**).

Tabel 44 :

Penyebaran Produksi Tanaman Perkebunan Utama menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2019

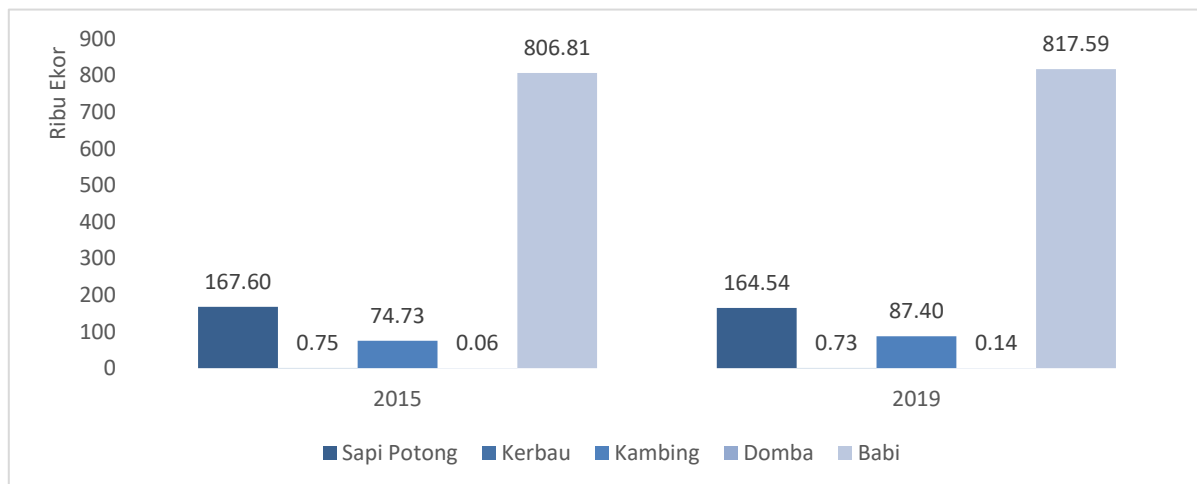
Provinsi	Kelapa Sawit		Kelapa		Kakao		Kopi	
	ribu ton	%	ribu ton	%	ribu ton	%	ribu ton	%
Papua Barat	105.4	22.1	16.3	51.7	5.3	32.9	0.0	0.0
Papua	370.8	77.9	15.2	48.3	10.8	67.1	2.0	100.0
TOTAL	476.20	100.00	31.50	100.00	16.10	100.00	2.00	100.00

Sumber: BPS, Tahun 2020

Peternakan. Populasi ternak besar paling banyak diusahakan meliputi jenis babi, sapi potong, kambing, dan kerbau. Populasi ternak babi tahun 2019 mencapai 817 ribu ekor, sapi potong sebanyak 164 ribu ekor dan kambing sebanyak 87 ribu ekor (**Gambar 55**). Penyebaran populasi ternak babi, sapi potong, kambing dan kerbau didominasi oleh Provinsi Papua, dengan populasi ternak babi berjumlah 728 ribu ekor, sapi potong 112 ribu ekor, dan kambing sejumlah 67 ribu ekor (**Tabel 45**).

Gambar 55 :

Perkembangan Populasi Ternak Besar di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019, (dalam ribu ekor)



Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 45:

Populasi Ternak Besar menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2019 (ekor)

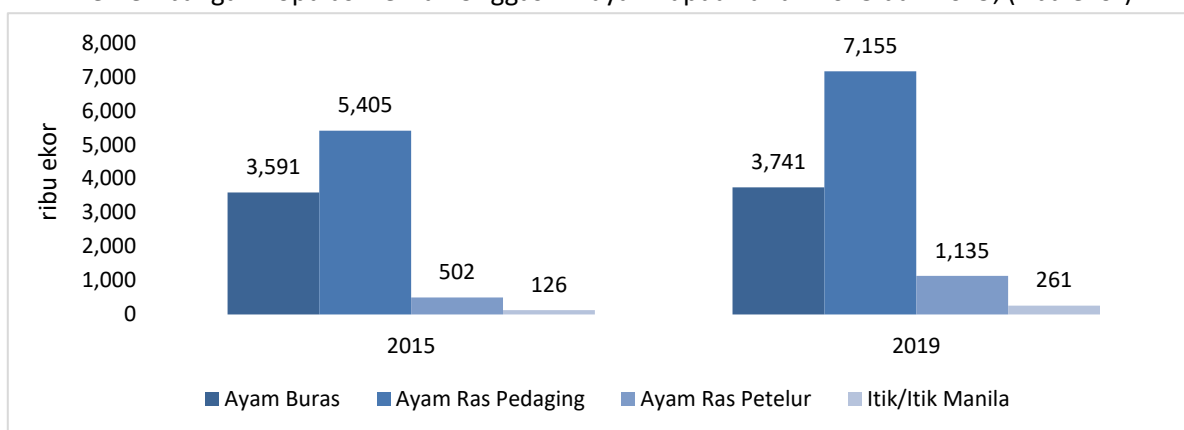
Provinsi	2019				
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
Papua Barat	51,738	0	20,248	23	89,378
Papua	112,803	731	67,156	116	728,213
TOTAL	164,541	731	87,404	139	817,591

Sumber: BPS, Tahun 2020

Populasi ternak unggas terbesar meliputi jenis ras pedaging dan ayam buras dengan populasi pada tahun 2019 sebesar 7,1 juta ekor ayam ras pedaging dan 3,7 juta ekor ayam buras. Jika diperhatikan pada (**Gambar 56**), populasi unggas di wilayah Papua terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2019 terutama untuk ayam ras pedaging yang artinya kebutuhan akan protein hewani dari ayam permintaannya semakin meningkat di pulau Papua. Hampir semua populasi unggas, seperti ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik manila terbesar didominasi di Provinsi Papua (**Tabel 46**).

Gambar 56:

Perkembangan Populasi Ternak Unggas Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019, (ribu ekor)



Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 46 :

Perkembangan Populasi Ternak Unggas menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019, (ribu ekor)

Provinsi	Ayam Buras		Ayam Ras Pedaging		Ayam Ras Petelur		Itik/Itik Manila	
	2015	2019	2015	2019	2015	2019	2015	2019
Papua Barat	1,732	1,436	1,425	721	66	457	53.9	101.1
Papua	1,859	2,305	3,980	6,433	436	678	71.8	160.1
TOTAL	3,591	3,741	5,405	7,155	502	1,135	126	261

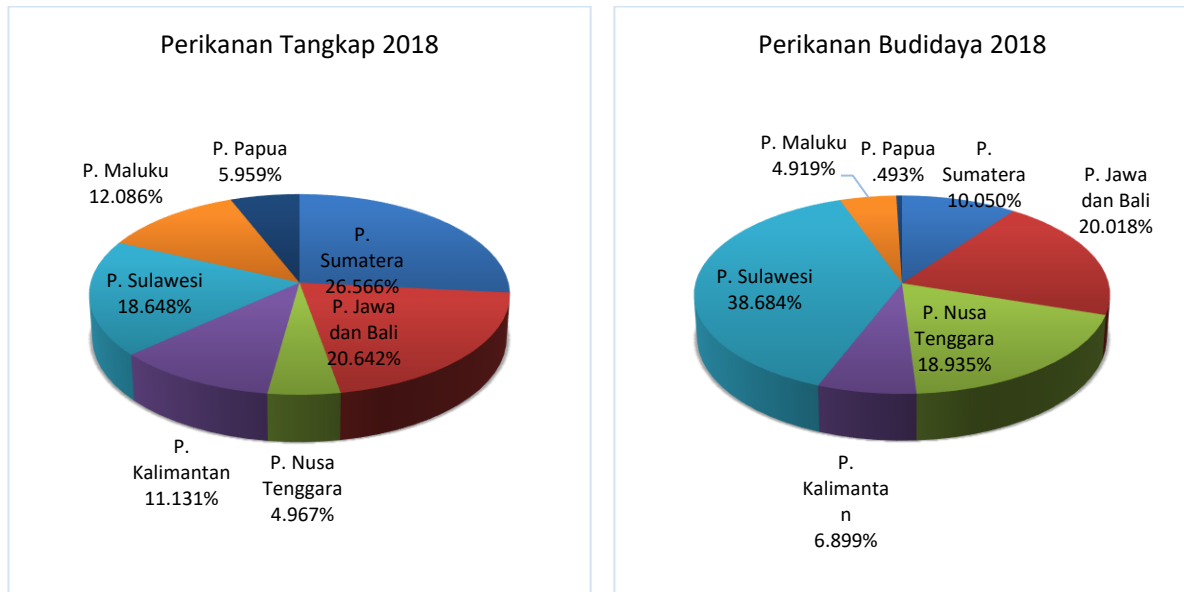
Sumber: BPS, Tahun 2020

Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan.

Perikanan dan Kelautan. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan perikanan budidaya tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 kecuali budidaya kolam, keramba, jaring apung dan sawah. Produksi perikanan tangkap 2018 mencapai 438 ribu ton atau sekitar 5,96 persen dari produksi perikanan tangkap nasional, sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 77,7 ribu ton atau sekitar 0,51 persen dari produksi perikanan budidaya nasional. Produksi perikanan tangkap tahun 2018 didominasi oleh perikanan laut sebesar 427 ribu ton atau 97,3 persen dari total perikanan tangkap di wilayah Papua. Daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar berada di Provinsi Papua. Sedangkan untuk perikanan budidaya, produksi tahun 2018 didominasi oleh budidaya laut sebesar 52,1 ribu ton atau sekitar 67,1 persen dari total produksi perikanan budidaya di wilayah Papua. Provinsi dengan produksi perikanan budidaya terbesar adalah Provinsi Papua Barat.

Gambar 57:

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Berdasarkan Wilayah di Indonesia, (ton)



Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 47:

Perkembangan Perikanan Tangkap di Wilayah Papua Tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi, (dalam ton)

Provinsi	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Papua Barat	119.984	204.180	219	324	120.203	204.504
Papua	290.438	222.925	9.829	11.251	300.267	234.176
TOTAL	410.422	427.105	10.048	11.575	420.470	438.680

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 48:

Perkembangan Perikanan Budidaya di Wilayah Papua tahun 2014 dan 2018 berdasarkan Provinsi, (dalam ton)

Provinsi	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Jaring Tancap		Sawah	
	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018	2014	2018
Papua Barat	57.760	51.581	2.988	397	1.777	3.565	-	-	-	1.088	-	-	-	-
Papua	51	596	1.209	1.499	8.552	18.186	-	1	731	833	-	-	-	16
TOTAL	57.811	52.177	4.197	1.896	10.329	21.752	-	1	731	1.921	-	-	-	16

Sumber: BPS, Tahun 2020

Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang tersebar luas menjadikan wilayah Indonesia unggul dalam sektor pariwisata. Keberadaan destinasi-destinasi potensial seperti wisata budaya, wisata alam, agro wisata, desa wisata dan wisata-wisata tematik lainnya. Perkembangan pariwisata di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari perkembangan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagai produk unggulan daerah dimasa mendatang, pemerintah harus melakukan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang lebih memadai.

Salah satu indikator kinerja sektor pariwisata dapat ditunjukkan dengan perkembangan jumlah wisatawan baik yang berasal dari mancanegara maupun domestik. Perkembangan jumlah tamu asing dan domestik dari tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan tamu asing di wilayah Papua mencapai 36.159 orang dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 9,2 persen per tahun dengan share 0,25 persen dari total Indonesia. Jumlah tamu asing terbesar ada di Provinsi Papua Barat dibanding dengan Provinsi Papua (**Tabel 49**).

Sementara untuk perkembangan jumlah tamu domestik tahun 2019 mencapai 1,4 juta orang, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 2015-2019 sebesar 23,6 persen per tahun. Jumlah tamu domestik terbesar menurut Provinsi ada di Provinsi Papua (**Tabel 50**).

Tabel 1 :

Jumlah Tamu Asing Pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2015-2019, (orang)

Provinsi	Tamu Asing Hotel Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan
Papua Barat	5.734	6.513	9.520	13.666	21.022	39,3%
P a p u a	21.210	15.825	14.821	13.314	15.137	-7,1%
PAPUA	26.945	22.338	24.341	26.980	36.159	9,2%
INDONESIA	11.936.138	14.011.814	15.276.184	20.118.749	14.590.705	6,6%
SHARE (%)	0,19	0,19	0,15	0,12	0,18	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 50 :

Jumlah Tamu Domestik pada Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2015-2019, (orang)

Provinsi	Tamu Domestik Hotel Berbintang dan Non Berbintang					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan
Papua Barat	166.686	405.394	447.616	461.340	480.991	40,2%
P a p u a	525.503	884.756	1.037.046	1.030.931	897.741	18,0%
PAPUA	692.189	1.290.150	1.484.662	1.492.271	1.378.732	23,6%
INDONESIA	68.908.048	118.392.155	128.376.800	132.689.627	131.437.282	20,7%
SHARE (%)	1,00	1,09	1,16	1,12	1,05	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Untuk perkembangan jumlah akomodasi/hotel, secara nasional di Indonesia terdapat 28.230 unit hotel dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2014-2018 sebesar 15,57 persen. Di wilayah Papua sendiri pada tahun 2018 jumlah hotel yang tercatat sebanyak 476 unit dengan share terhadap nasional sebesar 1,69 persen yang didominasi oleh hotel non-bintang dengan persentase 89,9 persen dari total hotel yang ada di wilayah Papua. Provinsi dengan jumlah hotel terbesar ada di Provinsi Papua. Untuk jumlah kamar di wilayah pulau Papua tersedia sebanyak 15.887 kamar dengan jumlah kamar terbanyak berada di Provinsi Papua.

Tabel 2 :

Jumlah Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Akomodasi Berbintang dan Non Bintang					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
Papua Barat	100	107	117	125	215	23.8%
P a p u a	172	177	178	179	261	12.5%
PAPUA	272	284	295	304	476	17.0%
INDONESIA	16,685	17,484	18,353	18,829	28,230	15.6%
SHARE (%)	1.63	1.62	1.61	1.61	1.69	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 3:

Jumlah kamar Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2014-2018

Provinsi	Jumlah Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
Papua Barat	3,600	3,585	4,339	4,278	5,874	14.13%
P a p u a	6,593	7,578	7,541	7,488	10,013	11.87%
PAPUA	10,193	11,163	11,880	11,766	15,887	12.50%
INDONESIA	664,843	706,436	744,233	775,243	1,044,312	12.62%
SHARE (%)	1.53	1.58	1.60	1.52	1.52	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Sektor perhotelan berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 652 ribu orang di tahun 2018, baik yang berkerja di hotel bintang dan non-bintang dengan pertumbuhan rata-rata 25,50 persen pertahun. Pertumbuhan tenaga kerja rata-rata tertinggi berada di Provinsi Papua Barat, dan menurut jumlah tenaga kerja di tahun 2018 terbanyak di Provinsi Papua.

Tabel 53:

Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi/Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2014-2018

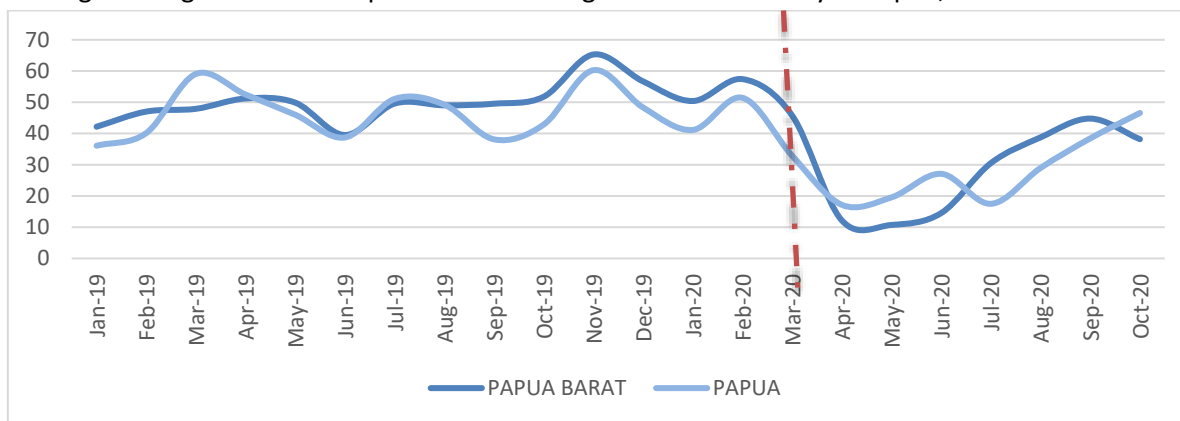
Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Akomodasi Bintang dan Non Bintang					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2018	Pertumbuhan
Papua Barat	1,523	1,575	1,840	1,692	2,789	19.27%
P a p u a	2,979	3,013	3,117	3,030	5,349	19.58%
PAPUA	4,502	4,588	4,957	4,722	8,138	19.39%
INDONESIA	307,280	326,315	333,123	340,416	652,018	25.50%
SHARE (%)	1.47	1.41	1.49	1.39	1.25	

Sumber: BPS, Tahun 2020

Berdasarkan penghunian kamar pada Hotel Bintang wilayah Papua dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan. Pada bulan April 2020 tingkat penghunian kamar pada Hotel Bintang sebesar 14,7 poin, menurun dari tahun sebelumnya (April 2019) sebesar 51,8 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi covid sangat berpengaruh terhadap aktiitas perhotelan di provinsi papua. Akan tetapi dari gambar terlihat tren hingga oktober 2020 terus meningkat artinya sektor perhotelan sudah mulai bangkit walaupun masih lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 58 :

Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2019-2020



Sumber: BPS, Tahun 2020

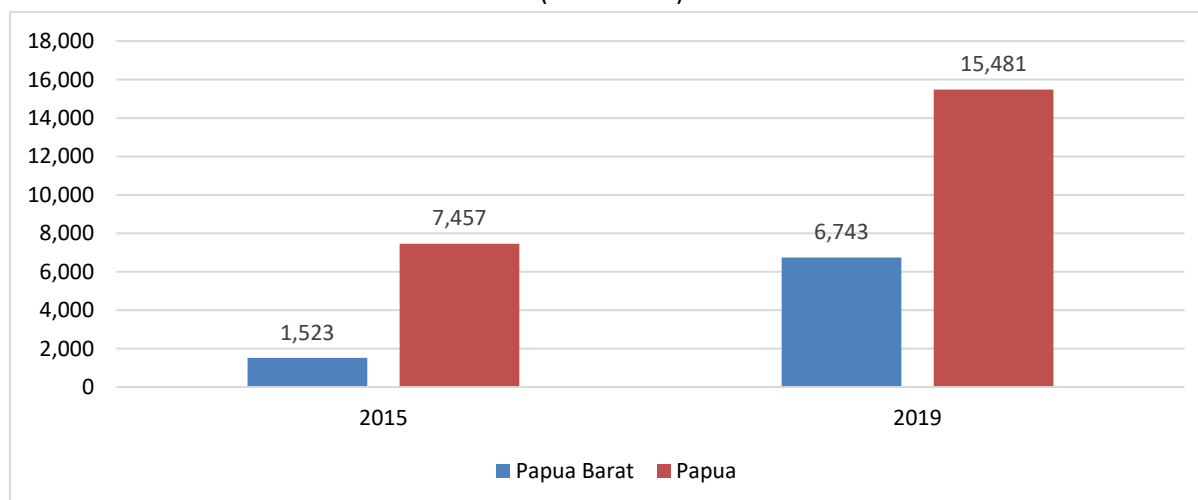
Industri Mikro Kecil (IMK)

Perkembangan jumlah IMK di wilayah Papua dalam 5 tahun terakhir mengalami Peningkatan. Peningkatan jumlah IMK tahun 2019 sebanyak 22.224 unit, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8.980 unit pada tahun 2015, artinya ada selisih peningkatan sebesar 13.244 unit sepanjang tahun 2015-2019. Jumlah IMK terbanyak terdapat di Provinsi Papua dengan jumlah IMK sebanyak 15.481 unit pada tahun 2019, kemudian diikuti oleh Provinsi Papua Barat dengan jumlah IMK sebanyak 6.743 unit (**Gambar 59**).

Sementara untuk total pendapatan (*revenue*) IMK wilayah Papua tahun 2019 sebesar 2,7 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2015 (1,6 triliun rupiah), dengan *revenue* terbesar di Provinsi Papua. *Revenue* yang meningkat mengindikasikan bahwa IMK cenderung berkembang di wilayah Papua. Sementara untuk penyerapan jumlah tenaga kerja IMK, total tenaga kerja yang terserap tahun 2019 mencapai 39 ribu orang meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 22 ribu orang. Penyerapan jumlah tenaga kerja IMK paling besar terdapat di Provinsi Papua (**Tabel 54**).

Gambar 59:

Perkembangan Jumlah Industri Usaha Mikro-Kecil (IMK) Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019, (dalam unit)



Sumber: BPS, Tahun 2020

Tabel 54:

Perkembangan Jumlah Pendapatan dan Tenaga Kerja Industri Mikro-Kecil menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019.

Provinsi	Pendapatan (juta Rp)			Tenaga Kerja (orang)		
	2015	2019	D 2015-2019	2015	2019	D 2015-2019
Papua Barat	257.319	1.043.855	786.536	3.215	12.437	9.222
Papua	1.432.720	1.675.378	242.658	19.158	27.333	8.175
PAPUA	1.690.039	2.719.234	1.029.195	22.373	39.770	17.397

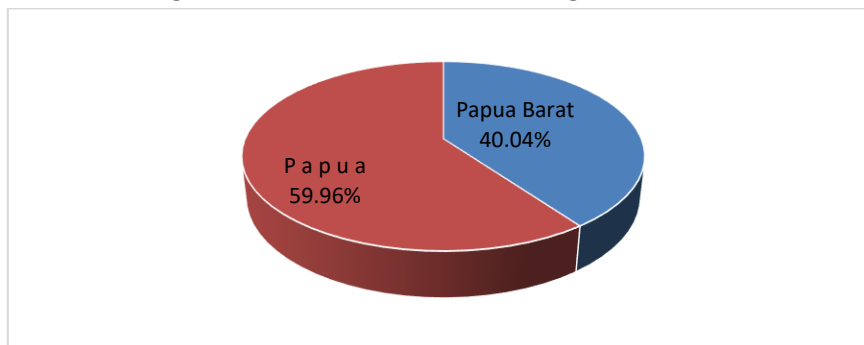
Sumber: BPS, Tahun 2020

Industri Menengah dan Besar

Perkembangan industri menengah besar di wilayah Papua pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kontribusi wilayah Papua terhadap total penciptaan nilai tambah nasional sebesar 0,03 persen setara dengan 9,7 triliun rupiah. Provinsi yang berkontribusi paling besar di wilayah Papua adalah Provinsi Papua dengan kontribusi sebesar 5,8 triliun rupiah kemudian diikuti oleh Provinsi Papua Barat dengan kontribusi sebesar 3,8 triliun rupiah. Dari sisi tenaga kerja, industri menengah besar di Provinsi Papua menyerap tenaga kerja sebesar 9.051 orang dengan komposisi 6.600 orang laki-laki dan 2.451 orang perempuan. Sedangkan di Provinsi Papua Barat menyerap tenaga kerja lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Papua (4800 orang). Hal ini menunjukkan bahwa industri di Provinsi Papua termasuk industri yang padat karya.

Gambar 60:

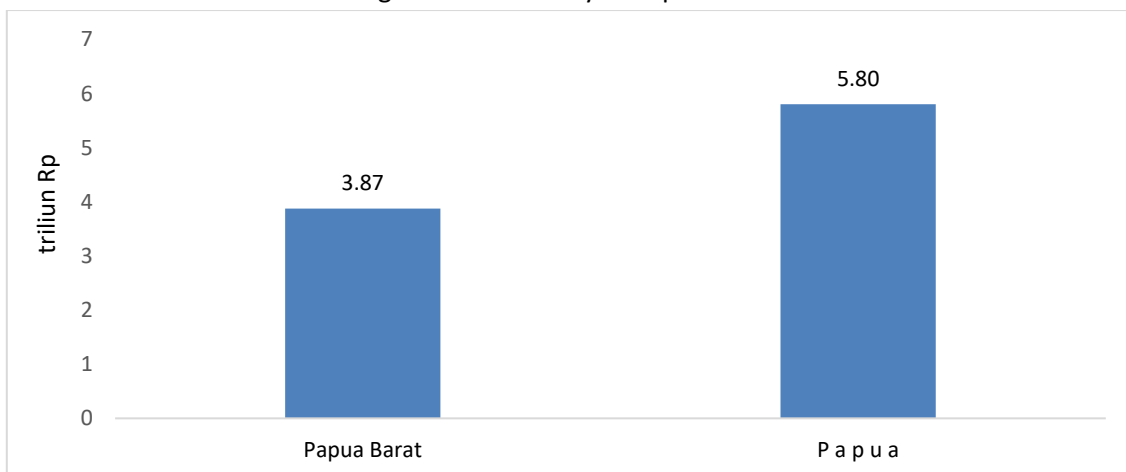
Komposisi Perkembangan Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Indonesia Tahun 2017



Sumber: Survey Industri, BPS

Gambar 61:

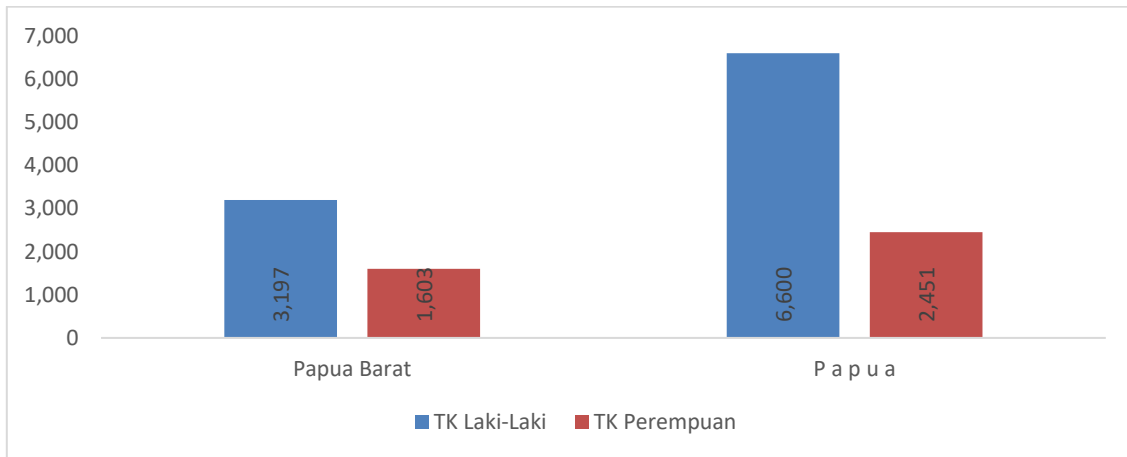
Nilai Tambah Industri Menengah Besar di Wilayah Papua berdasarkan Provinsi Tahun 2017



Sumber: Survey Industri, BPS

Gambar 62:

Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Wilayah Papua berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017



Sumber: Survey Industri, BPS

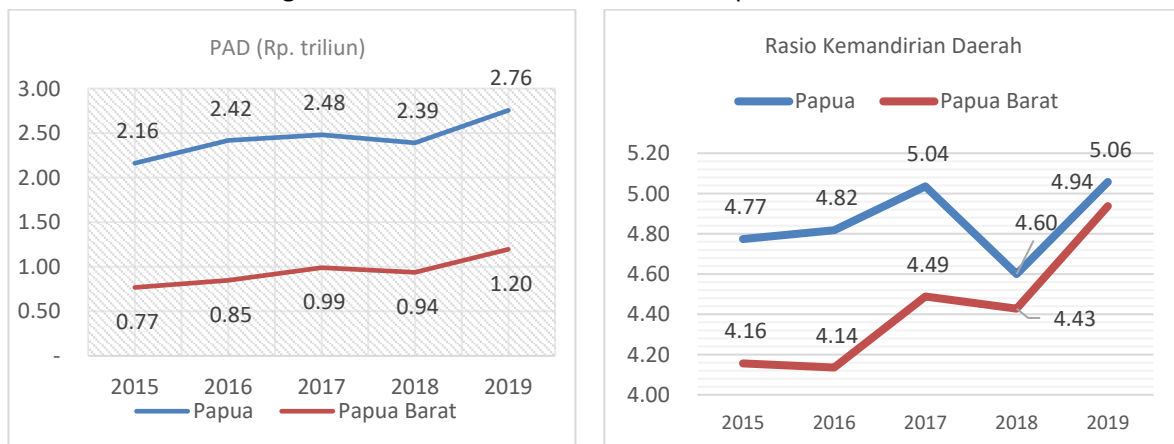
4.6. Perkembangan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Komponen utama pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Untuk menggambarkan perkembangan keuangan daerah antarprovinsi di wilayah Papua digunakan data gabungan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota (Se-Provinsi).

Jumlah PAD antarprovinsi di wilayah Papua tahun 2019, tertinggi di Provinsi Papua sebesar 2,76 triliun, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 1,20 triliun. **Gambar 63**, perkembangan PAD antarprovinsi di wilayah Papua pada periode 2015-2019 secara umum menunjukkan tren meningkat, dan menunjukkan sedikit penurunan dari tahun 2017-2018. Pertumbuhan PAD selama periode 2015-2019, tertinggi di Provinsi NTT sebesar 39,16 persen, sedangkan NTB tumbuh sebesar 32,62 persen.

Gambar 63:

Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Antarprovinsi Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut, dan sebaliknya.

Rasio kemandirian daerah Provinsi Papua dan Papua Barat pada periode 2015-2019 menunjukkan tren yang fluktuatif, dan menunjukkan penurunan pada periode tahun 2018-2019, dan meningkat kembali di tahun 2019. Peningkatan rasio kemandirian di Provinsi Papua Barat (0,78%) lebih tinggi dari Provinsi Papua (0,28%).

Tabel 55:
Perkembangan PAD dan Rasio Kemandirian Antarprovinsi Tahun 2015-2019

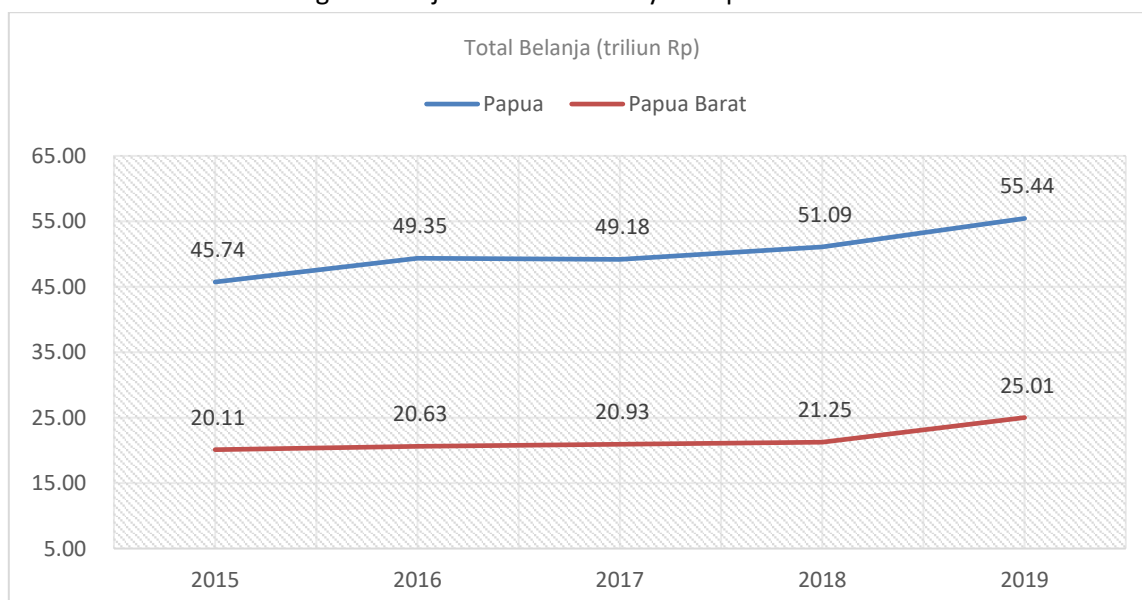
Provinsi	PAD (Rp. triliun)					Tumbuh ('15-'19)	RASIO PAD/APBD (%)					Δ ('15-'19)
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Papua	2,16	2,42	2,48	2,39	2,76	27,43	4,77	4,82	5,04	4,60	5,06	0,28
Papua Barat	0,77	0,85	0,99	0,94	1,20	55,75	4,16	4,14	4,49	4,43	4,94	0,78
PAPUA	2,93	3,26	3,47	3,33	3,95	34,85	4,59	4,62	4,87	4,55	5,02	0,43

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Belanja Daerah diseluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua (se-Papua) pada tahun 2019 sebesar Rp. 80,46 triliun meningkat sebesar Rp. 14,61 triliun dibanding tahun 2015 (Rp. 65,85 triliun). Belanja daerah se-provinsi tertinggi pada tahun 2019 berada di Provinsi Papua sebesar Rp. 55,44 triliun, dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 25,01 triliun.

Gambar 64:
Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Papua Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Tabel 56:

Perkembangan Belanja di Seluruh Wilayah Papua Tahun 2015-2019

Provinsi	Tahun					Δ ('15-'19)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Papua	45,74	49,35	49,18	51,09	55,44	9,71
PapuaBarat	20,11	20,63	20,93	21,25	25,01	4,90
PAPUA	65,85	69,98	70,10	72,34	80,46	14,61

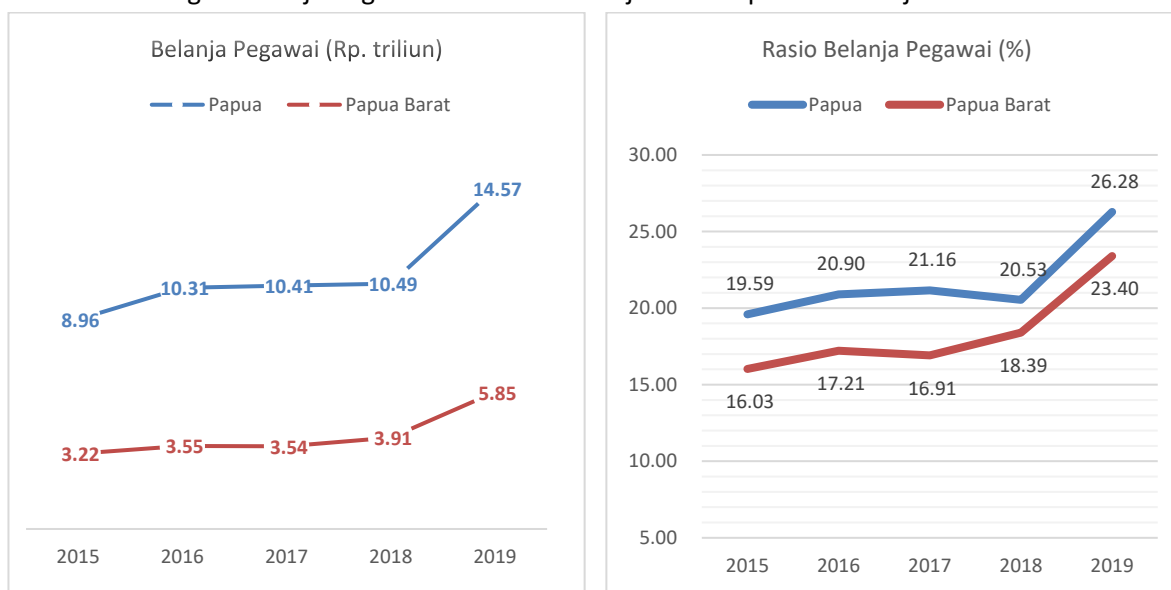
Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio Belanja Pegawai yang mencerminkan porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah, diharapkan dapat semakin menurun porsinya, sehingga dapat dioptimalkan untuk belanja modal dan belanja produktif lainnya yang dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja perekonomian daerah. Total belanja pegawai antarprovinsi pada periode 2015-2019 seluruhnya menunjukkan peningkatan, dengan belanja pegawai tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar Rp. 14,57 triliun, sedangkan di provinsi Papua Barat sebesar Rp. 5,85 triliun. Pertumbuhan belanja pegawai di Provinsi Papua Barat sebesar 81,59 persen, dan lebih tinggi dibanding Provinsi Papua sebesar 62,60 persen.

Gambar 65:

Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio belanja pegawai di Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan tren meningkat, dengan rasio tertinggi di tahun 2019 terdapat di Provinsi Papua sebesar 26,28 persen, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 23,40 persen.

Tabel 57:

Perkembangan Belanja Pegawai dan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019

Provinsi	Belanja Pegawai (Rp. triliun)					Tumbuh ('15-'19)	RASIO Belanja Pegawai/ Total Belanja (%)					Δ ('15-'19)
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Papua	8,96	10,31	10,41	10,49	14,57	62,60	19,59	20,90	21,16	20,53	26,28	6,69
Papua Barat	3,22	3,55	3,54	3,91	5,85	81,59	16,03	17,21	16,91	18,39	23,40	7,37
PAPUA	12,18	13,86	13,94	14,40	20,42	67,63	18,50	19,81	19,89	19,91	25,38	6,88

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

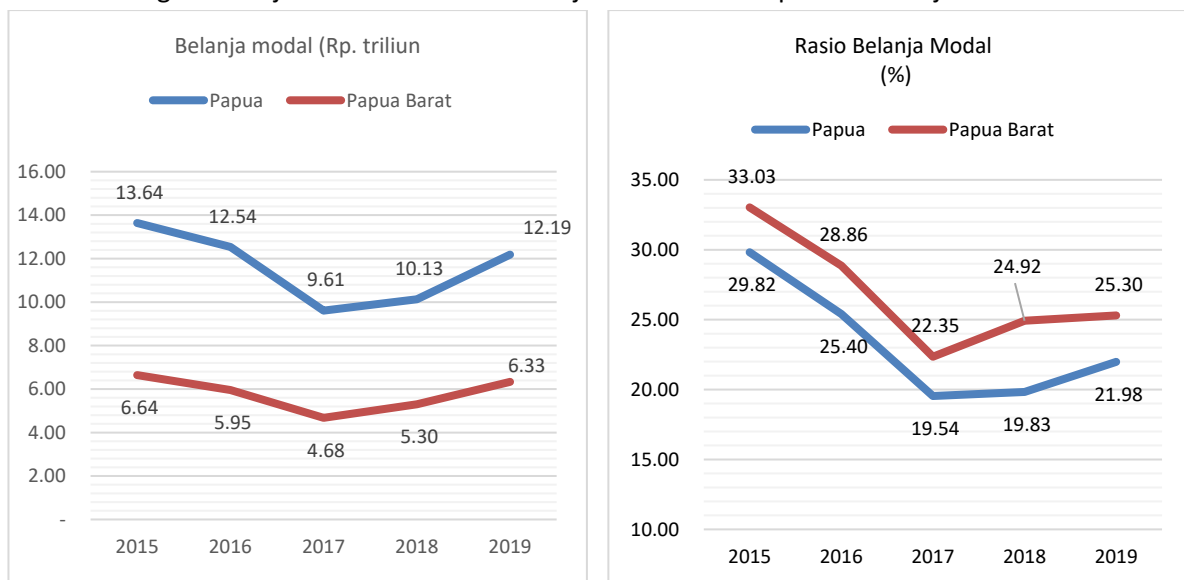
Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio Belanja modal dapat menunjukkan porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka investasi daerah untuk pembangunan, termasuk pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, rasio belanja modal semakin tinggi menunjukkan kinerja belanja daerah semakin produktif.

Secara absolut, belanja modal tahun 2019 tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar Rp. 12,19 triliun, dan Papua Barat sebesar Rp. 6,33 triliun. Pertumbuhan belanja modal antarprovinsi pada periode 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan negatif, dengan angka penurunan tertinggi di Provinsi Papua sebesar (-10,65%), sedangkan di Provinsi Papua Barat (-4,72%).

Gambar 66:

Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2019, tertinggi di Provinsi Papua Barat sebesar 25,30 persen, dan Provinsi Papua sebesar 21,98 persen. Berdasarkan perkembangan selama periode 2015-2019, rasio belanja modal Provinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan tren menurun, dengan angka penurunan masing-masing sebesar (-7,84%) dan (-7,73%).

Tabel 58:

Perkembangan Belanja Modal dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2015-2019

Provinsi	Belanja Modal (Rp. triliun)					Tumbuh ('15-'19)	RASIO Belanja Modal/ Total Belanja (%)					Δ ('15-'19)
	2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
Papua	13,64	12,54	9,61	10,13	12,19	-10,65	29,82	25,40	19,54	19,83	21,98	-7,84
PapuaBarat	6,64	5,95	4,68	5,30	6,33	-4,72	33,03	28,86	22,35	24,92	25,30	-7,73
PAPUA	20,28	18,49	14,29	15,43	18,52	-8,71	30,80	26,42	20,38	21,33	23,01	-7,79

Sumber: DJPK, Kemenkeu, 2020

Keterangan: Berdasarkan Data APBD Realisasi (2015-2018), APBD Anggaran 2019 (data Se-Provinsi)

Kapasitas Fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, dan untuk menunjukkan keberbandingannya digunakan Indeks Kapasitas Fiskal. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: (a). pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; (b). penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/ atau (c). penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambaran peta kapasitas fiskal ini menggambarkan APBD provinsi di wilayah Papua.

Kapasitas fiskal di provinsi Papua menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yakni pada periode 2015-2017 menunjukkan tren meningkat dari kategori sedang menjadi sangat tinggi, namun di tahun 2018 menurun menjadi kategori sedang dan tahun 2019 menjadi kategori sangat rendah. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat menunjukkan penurunan kategori kapasitas fiskal sangat tinggi (2015-2016) menjadi sedang (2017-2019)

Tabel 59:

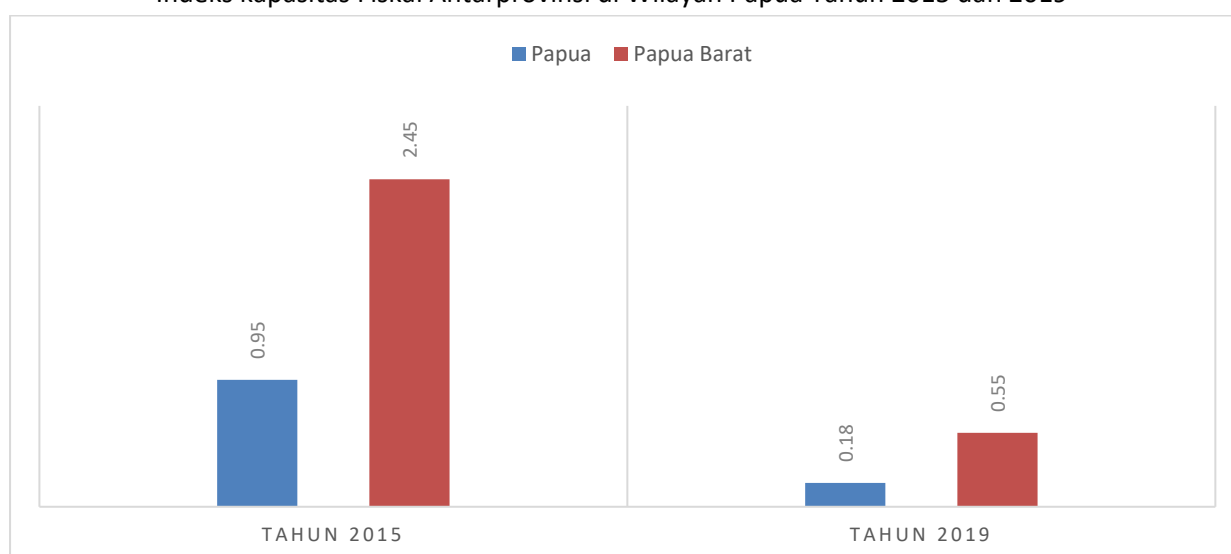
Peta Kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015-2019

Provinsi	2015		2016		2017		2018		2019	
	IKF	Kategori	IKF	kategori	IKF	kategori	IKF	kategori	IKF	Kategori
Papua	0,95	sedang	1,61	tinggi	2,00	Sangat Tinggi	0,77	Sedang	0,18	Sangat Rendah
Papua Barat	2,45	sangat tinggi	2,99	sangat tinggi	0,83	Sedang	0,63	Sedang	0,55	Sedang

Sumber: www. Jdih.kemenkeu.go.id

Gambar 67:

Indeks kapasitas Fiskal Antarprovinsi di Wilayah Papua Tahun 2015 dan 2019



Sumber: www. Jdih.kemenkeu.go.id



PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

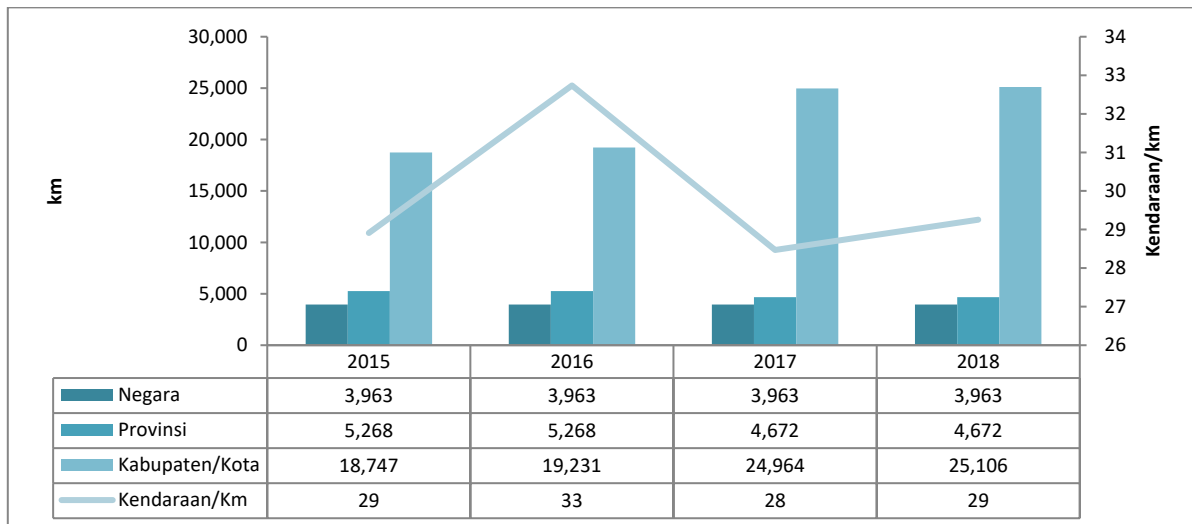
- ❖ Pada tahun 2018 total panjang jalan di wilayah Papua tercatat sepanjang 33.741 km dengan panjang jalan negara sebesar 3.963 km, jalan provinsi sebesar 4.672 km, dan jalan kabupaten sebesar 25.106 km dengan kualitas jalan termasuk ke dalam kategori mantap (baik+sedang), yaitu mencapai 55,62 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 44,38 persen dari total panjang jalan.
- ❖ Rata-rata persentase panjang jalan (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dengan kualitas mantap terbesar dicapai oleh Provinsi Papua Barat dengan persentase yaitu mencapai 59,46 persen, dan untuk kualitas jalan dengan kelompok tidak mantap mencapai 48,22 persen.
- ❖ Perkembangan produksi energi listrik di Wilayah Papua meningkat. Produksi listrik tahun 2018 mencapai 1,46 ribu GWh atau turun sebesar 3,8 persen dari produksi tahun 2017. Produksi energi listrik di Wilayah Papua sebagian besar dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- ❖ Perkembangan rasio elektrifikasi, dalam kurun waktu 2016-2019 di Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional, walaupun sudah di atas angka 90 persen dan menunjukkan tren meningkat..

5.1. Jalan

Perkembangan panjang jalan dalam empat tahun terakhir mengalami banyak kenaikan di tahun 2015-2017 (**Gambar 68**). Pada tahun 2018 total panjang jalan di wilayah Papua tercatat sepanjang 33.741 km dengan panjang jalan negara sepanjang 3.963 km, jalan provinsi sepanjang 4.672 km, dan jalan kabupaten sepanjang 25.106 km. Jika dirasiokan dengan jumlah kendaraan di wilayah Papua, dalam setiap kilometer menampung 29 kendaraan pada tahun 2018, dan terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2018.

Gambar 68:

Perkembangan Panjang Jalan menurut Kewenangan di Wilayah Papua Tahun 2015-2018, (dalam km)



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2020

Kondisi kualitas jalan di wilayah Papua pada tahun 2018 rata-rata termasuk kedalam kategori mantap (baik+sedang), yaitu mencapai 55,62 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 44,38 persen dari total panjang jalan. Rata-rata persentase panjang jalan (provinsi, kabupaten dan kota) dengan kualitas mantap terbesar dicapai oleh Provinsi Papua Barat dengan persentase yaitu mencapai 59,46 persen, dan untuk kualitas jalan dengan kelompok tidak mantap mencapai 48,22 persen (**Tabel 60**).

Tabel 60:

Kualitas Jalan menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2018

Provinsi	Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Kota	
	% Mantap	% Tidak Mantap	% Mantap	% Tidak Mantap	% Mantap	% Tidak Mantap
Papua Barat	63,3	36,7	30,3	69,7	84,86	15,14
Papua	49,6	50,4	33,8	66,2	71,92	28,08

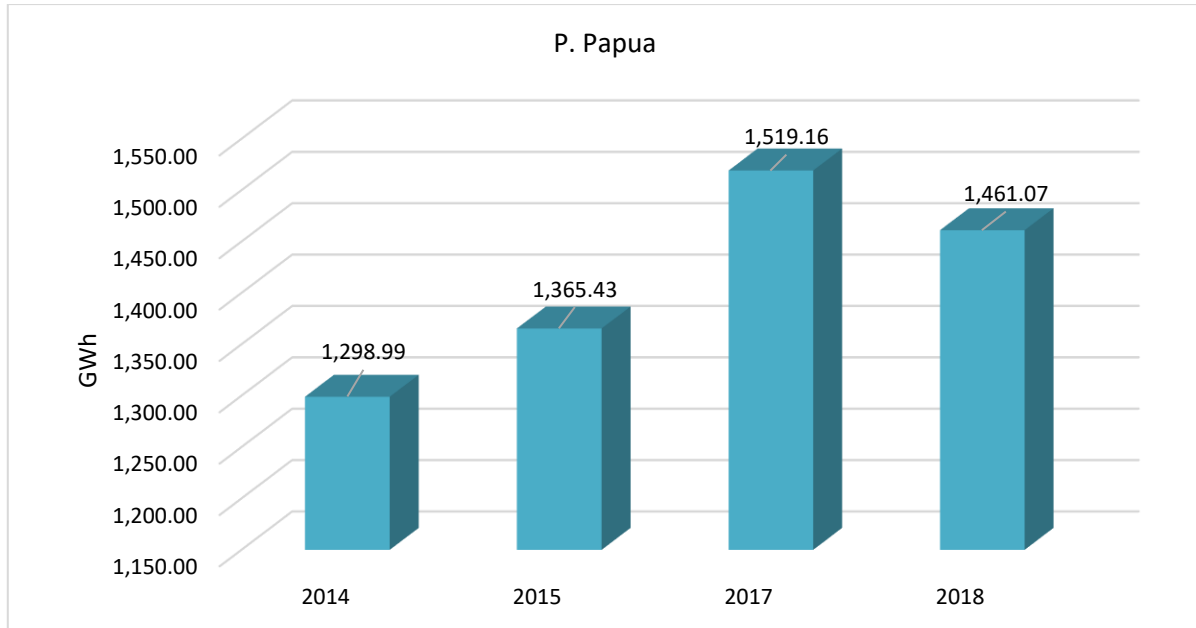
Sumber: Statistik Perhubungan, BPS

5.2. Listrik

Perkembangan produksi energi listrik di wilayah Papua meningkat. Produksi listrik tahun 2018 mencapai 1,46 ribu GWh atau turun sebesar 3,8 persen dari produksi tahun 2017 (**Gambar 69**). Produksi energi listrik di wilayah Papua sebagian besar dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yaitu mencapai 74 persen dan PLTA sebesar 26 persen (**Gambar 70**).

Gambar 69:

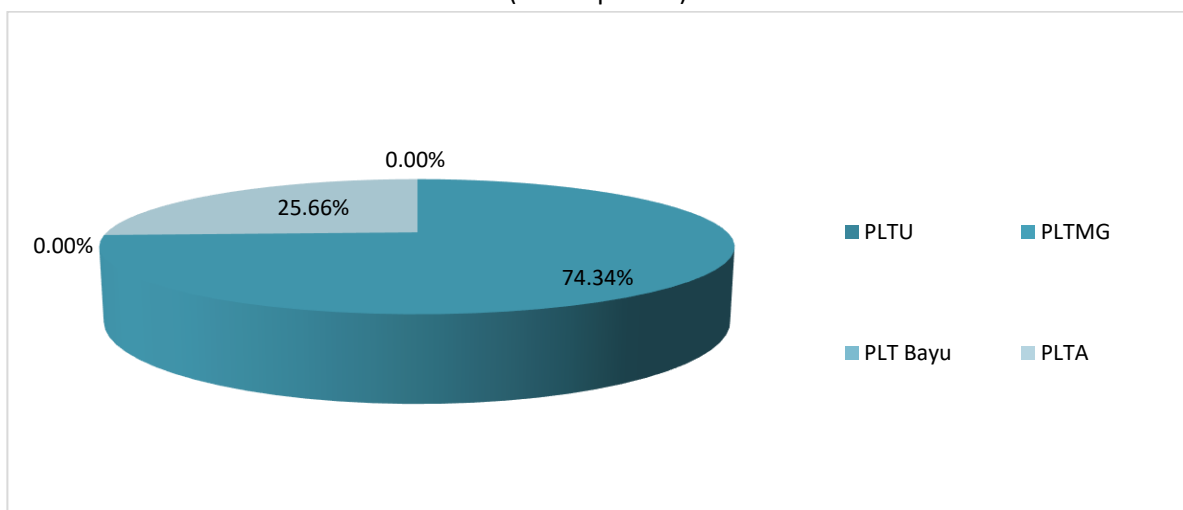
Perkembangan Energi yang Diproduksi di Wilayah Papua Tahun 2013-2017, (dalam GWh)



Sumber: BPS, 2020

Gambar 70:

Komposisi Produksi Energi Listrik menurut Jenis Pembangkit di Wilayah Papua Tahun 2013, (dalam persen)

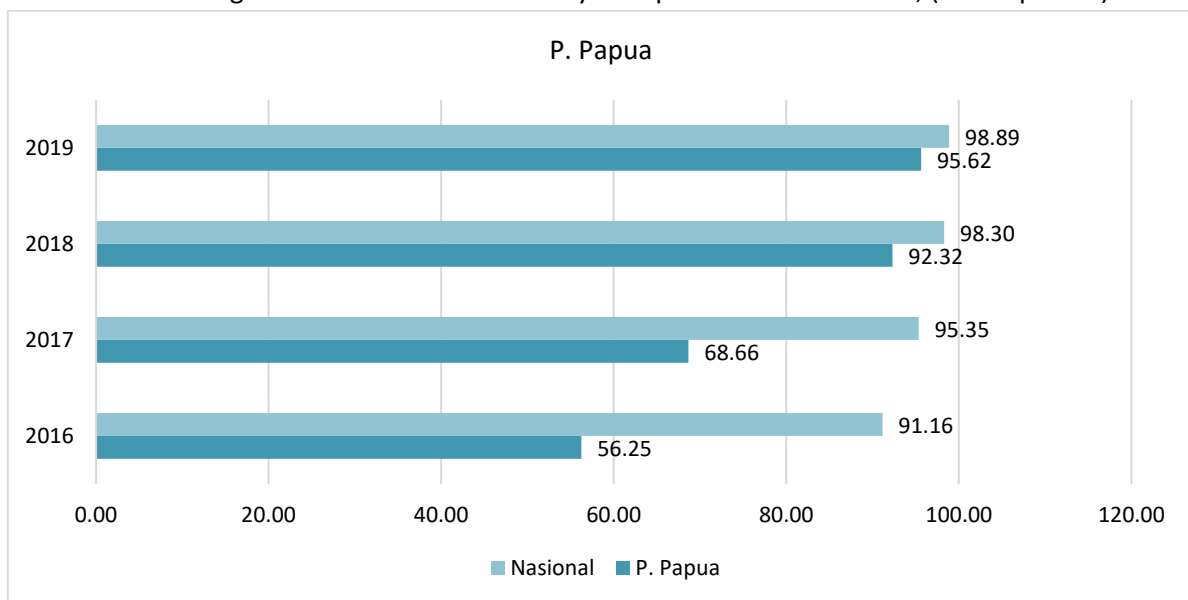


Sumber : BPS, 2020

Perkembangan rasio elektrifikasi, dalam kurun waktu 2016-2019 di wilayah Papua meningkat walaupun masih berada di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Capaian rasio elektrifikasi tahun 2016 mencapai 56,25 persen, dan di tahun 2019 mengalami peningkatan 39,37 persen. Pada tahun 2019 semua provinsi di wilayah Papua yang memiliki angka rasio elektrifikasi di atas 90 persen. (Gambar 72).

Gambar 71:

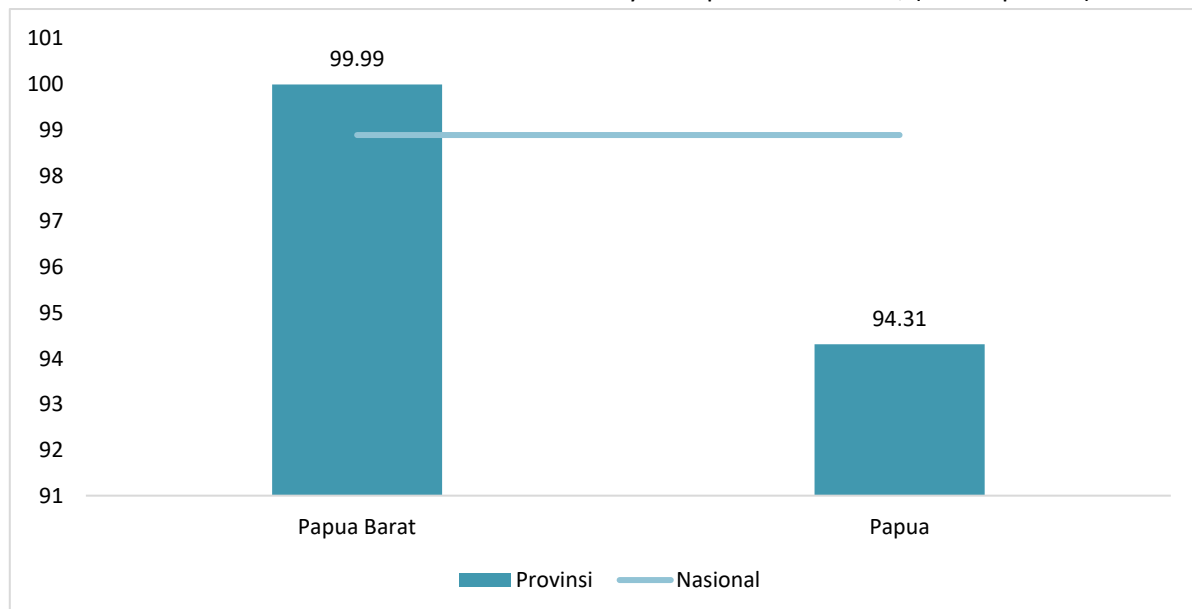
Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Papua Tahun 2016-2019, (dalam persen)



Sumber: BPS, 2020

Gambar 72:

Rasio Elektrifikasi menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2018, (dalam persen)



Sumber: BPS, 2020



PENGEMBANGAN WILAYAH



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, BAPPENAS 2020

KEK Sorong

KEK Sorong terdiri dari 3 (tiga) zona yaitu zona pengolahan ekspor, zona logistik, dan zona industri. KEK Sorong memiliki 6 (enam) kegiatan utama yakni Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan, Industri Pengolahan Nikel, Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Hasil Hutan dan Perkembunan, Logistik, dan Penyedia Infrastruktur Kawasan.

Badan usaha pembangunan dan pengelola (BUPP) KEK Sorong adalah PT Malamoi Olom Wobok yang merupakan perusahaan daerah berdasarkan Keputusan Bupati Sorong

Status: Operasional Bermasalah

DAERAH TERTINGGAL DI WILAYAH PAPUA

Daerah tertinggal di Wilayah Papua meliputi 30 kabupaten sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Papua Barat	Teluk Wondama	16	Papua	Yahukimo
2	Papua Barat	Teluk Bintuni	17	Papua	Pegunungan Bintang
3	Papua Barat	Sorong Selatan	18	Papua	Tolikara
4	Papua Barat	Sorong	19	Papua	Keerom
5	Papua Barat	Tambrauw	20	Papua	Waropen
6	Papua Barat	Maybrat	21	Papua	Supiori
7	Papua Barat	Manokwari Selatan	22	Papua	Mamberamo Raya
8	Papua Barat	Pegunungan Arfak	23	Papua	Nduga
9	Papua	Jayawijaya	24	Papua	Lanny Jaya
10	Papua	Nabire	25	Papua	Mamberamo Tengah
11	Papua	Paniai	26	Papua	Yalimo
12	Papua	Puncak Jaya	27	Papua	Puncak
13	Papua	Boven Digoel	28	Papua	Dogiyai
14	Papua	Mappi	29	Papua	Intan Jaya
15	Papua	Asmat	30	Papua	Deiyai

6.1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Papua



Di wilayah Pulau Papua terdapat 1 KEK yaitu KEK Sorong yang berstatus operasional bermasalah.

Gambar 73:

Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Papua

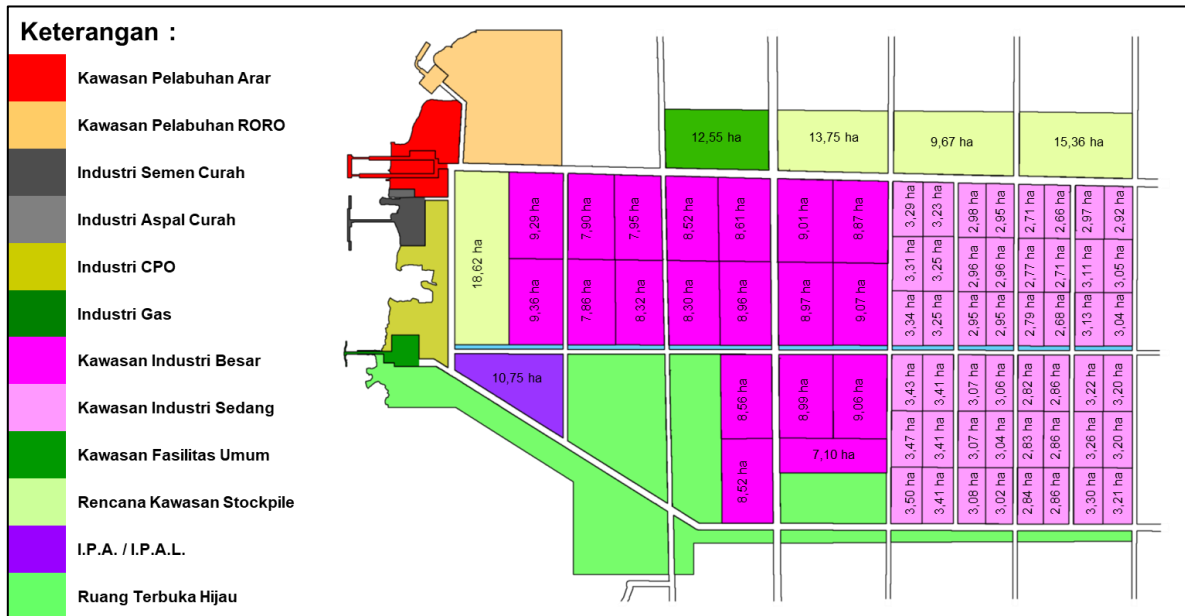


Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, BAPPENAS 2020

KEK Sorong ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. KEK Sorong berlokasi di distrik Mayamuk Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. KEK Sorong diusulkan oleh Pemerintah kabupaten Sorong. Badan usaha pembangunan dan pengelola (BUPP) KEK Sorong adalah PT Malamoi Olom Wobok yang merupakan perusahaan daerah berdasarkan Keputusan Bupati Sorong 600/Kep.302 – MOW / X/ Tahun 2016. KEK Sorong ditetapkan sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2016 dan telah diresmikan beroperasi sejak ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2019. KEK Sorong memiliki luas 523,7 ha dengan status HPL sejumlah 195,5 ha yang berada di distrik Mayamuk. KEK Sorong terdiri dari 3 (tiga) zona yaitu zona pengolahan ekspor, zona logistik, dan zona industri. KEK Sorong memiliki 6 (enam) kegiatan utama yakni Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan, Industri Pengolahan Nikel, Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Hasil Hutan dan Perkembunan, Logistik, dan Penyedia Infrastruktur Kawasan.

KEK Sorong yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geo-ekonomi, yaitu potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agro industri serta pertambangan. Berdasarkan potensi yang dimiliki, KEK Sorong dikembangkan dengan basis kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistik. KEK Sorong diperkirakan akan menarik investasi sebesar Rp 32,2 triliun hingga tahun 2025.

Gambar 74:
Masterplan KEK Sorong



Di dalam cakupan lahan yang direncanakan dimasterplan KEK Sorong, terdapat lahan HGB seluas 16,7 ha milik PT Inti Kebun Makmur (10 ha), PT Henrison Inti Persada (1,7 ha), PT Semen Bosowa (5 ha), dan lahan Hak Pakai seluas 4 ha milik Kementerian Perhubungan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sorong dalam proses sertifikasi lahan seluas 100 ha. Sedang menunggu surat pernyataan antara Pemda Kab. Sorong dengan pelaku usaha eksisting yang memiliki sertifikat HGB dan Hak Pakai.

Tabel 614 :
Perkembangan Investasi KEK MBTK

NO	INVESTOR	JENIS KEGIATAN	STATUS / PROGRES
1.	PT Semen Gresik (Anak Usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk)	Pengemasan semen	Sudah beroperasi
2.	PT Bumi Sarana Utama (Kalla Group)	Aspal Curah	Sudah beroperasi
3.	PT Henrison Inti Persada (The Capitol Group)	Pengolahan kayu dan sawit	Sudah beroperasi
4.	PT Pelindo IV	Pergudangan, logistik, pembangunan dermaga, <i>trestle</i> , <i>causeway</i> , dan reklamasi	Menunggu penyelesaian Kerja Sama Sewa dengan KSOP
5.	PT Gag Nikel (Anak Usaha PT Antam Tbk)	Smelter nikel, produk turunan : <i>ferronickel</i> dan <i>stainless steel</i>	Sudah menyelesaikan dokumen studi kelayakan
6.	PT Inti Kebun Makmur	<i>CPO Bulking Terminal</i> , <i>Kernel Crushing Plant</i>	Sudah memiliki HGB di KEK, berencana mengembangkan usaha dengan membangun Refinery
7.	PT Megapura Prima Industri	Niaga batubara	Sudah perjanjian sewa lahan

Pelaku usaha eksisting berjumlah 7 perusahaan. Untuk PT Inti Kebun Makmur tahun ini akan membangun pabrik CPO, sudah ada lahan 10 ha. Perusahaan-perusahaan yang sedang dalam tahap MoU antara lain PT Raja G & G International, PT Temasek Perikanan International, PT Perahu Catamaran Papua, PT Indonesia Power.

Tabel 5 :
Calon Investor Potensial Di KEK MBTK

NO	INVESTOR	JENIS KEGIATAN	PERKEMBANGAN INVESTASI
1.	PT Mahkota Properti Indo	Pembangunan Gudang dan Fasilitas Pasokan Logistik	Sudah menyampaikan surat minat
2.	PT Henson Putra Jaya	Pembangkit Listrik	Sudah menyampaikan surat minat
3.	PT Sientratek Energi Indonesia	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Terintegrasi	Sudah menyampaikan surat minat
4.	PT Titis Sampoerna	Pembangunan Mini Plan LNG dan Monetisasi Gas	Sudah menyampaikan surat minat
5.	PT Infra Daya Energia	Pembangunan dan Penyediaan Pembangkit Listrik, Pembangunan Pipa Gas, Penyediaan Air, Penyediaan Steam, Penyediaan Sewage	Sudah menyampaikan surat minat
6.	PT Momax Energi	Pembangkit Listrik di dalam Kawasan	Sudah menyampaikan surat minat
7.	CV Green Papua Jaya	Pengolahan Limbah Domestik, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pengolahan Sampah B3 dari industri minyak dan gas bumi serta dari berbagai industri yang lainnya	Sudah menyampaikan minat secara lisan
8.	PT Ratson	Galangan kapal	Sudah menyampaikan minat secara lisan
9.	PT Raja G & G International	Industri Pelabuhan & Perikanan	Sedang dalam tahap awal MoU
10.	PT Temasek Perikanan Internasional	Kapal Dockyard	Sedang dalam tahap awal MoU
11.	PT Perahu Catamaran Papua	Pembuatan Kapal/Speed Boat Fiber Glass	Sudah mengirim formulir pendaftaran

Tabel 6 :
Realisasi Investasi di KEK Sorong

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Luas Lahan (ha)	Status Lahan	Nilai Investasi (Rp)	Perkembangan
1.	PT Semen Gresik (Anak Usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk)	Pengemasan semen	2,00	Sewa	159.300.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah beroperasi sebelum KEK ditetapkan ▪ Kendala yang dihadapi adalah Sering terjadi pemalangan jalan poros, Listrik sering black out, tidak ada fasilitas air bersih
2.	PT Bumi Sarana Utama (Kalla Group)	Aspal Curah	0,80	Sewa	n.a.	Sudah beroperasi sebelum KEK ditetapkan
3.	PT Henrison Inti Persada (The Capitol Group)	CPO	1,76	HGB	37.161.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah beroperasi sebelum KEK ditetapkan ▪ Kendala yang dihadapi adalah seringnya terjadi pemalangan jalan
			8,24	Sewa		

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Luas Lahan (ha)	Status Lahan	Nilai Investasi (Rp)	Perkembangan
						dan kepastian hukum terkait status lahan
4.	PT Megapura Prima Industri	Niaga batubara	-	Sewa	n.a.	Data belum masuk
Total					196.461.000.000,00	

Tabel 7 :
Status Terakhir KEK Sorong

Status Akhir 2020	Operasional Bermasalah
Status Lahan (Clear and Clean)	Lahan yang sudah dibebaskan di KEK Sorong 64,54%, namun sertifikatnya untuk luas 100 Ha sampai sekarang belum diterima oleh pengelola. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan investor yang saat ini sedang dibuatkan MoU-nya
Dukungan Infrastruktur	Dalam Kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Terbangun jalan utama kawasan, jalan lingkungan kawasan sepanjang 6,5 km • Terkait listrik dari PT Indonesia Power berkomitmen memasok listrik untuk KEK Sorong sebesar 40 MW. Pada Bulan Juli – Oktober sudah disiapkan 6 MW, dan pada Oktober 2020 akan disiapkan 2 MM. • Air bersih : dari BWS Papua Barat sudah menyiapkan kapasitas 5 L/detik, sementara jaringan pipanya sudah sampai ke gerbang KEK Sorong. Untuk dari gerbang sampai dengan masuk ke dalam KEK sedang dalam proses lelang, dengan anggaran APBD dari Dinas PU Kab Sorong dengan kapasitas tambahan 15 L/detik. Pada pertengahan tahun ini sudah dapat tersambung. • Air baku : sumber air baku dari Sungai Klasafet di Distrik Klamono dengan jarak 30 – 40 km dari KEK Sorong, memiliki kapasitas 500 L/detik yang dianggarkan tahun 2021. • Fasilitas Pelabuhan : Untuk Pelabuhan Arar belum ada kejelasan terkait untuk perizinan dan tahapan kedua dari Amdal. Pengembangan Pelabuhan Arar kedepannya akan ada kendala karena terdapat pulau-pulau kecil yang akan mengganggu alur pelayaran, sehingga diarahkan ke pengembangan Pelabuhan Sorong yang butuh didukung oleh jalan lingkar Kota Sorong
	Luar Kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Bandara Sorong Dominique Edward Osok berjarak 30 km • Pelabuhan Peti Kemas Sorong berjarak 35 km • Jalan nasional ruas Pelabuhan Sorong-Aimas-Pelabuhan Arar • PLTM Arar dengan kapasitas 33 MW berjarak 15 km, PLTMG Waymon dengan kapasitas 33 MW berjarak 5 km
Regulasi / Kelembagaan	RTRW/ Regulasi <p>Pada September 2018, RTRW Kabupaten Sorong yang telah disusun belum menetapkan pembangunan yang menjadi kebijakan nasional untuk masuk dalam RTRW Kabupaten Sorong yaitu KEK Sorong. Akan adanya tindak lanjut terkait RTRW Kabupaten Sorong</p>
	Organisasi/ Badan Pengelola <p>PT Malamoi Olom Wobok</p>
Rekomendasi	Percepatan Operasionalisasi



6.2. Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, telah ditetapkan sebanyak 62 daerah (kabupaten). Berdasarkan jumlah kabupaten tersebut, maka selama periode 2015-2019 telah berhasil mengentaskan sebanyak 60 kabupaten dari 122 kabupaten tertinggal. Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, yaitu: (a). perekonomian masyarakat; (b). sumber daya manusia; (c). sarana dan prasarana; (d). kemampuan keuangan daerah; (e). aksesibilitas; dan (f). karakteristik daerah. Daerah tertinggal di wilayah Papua meliputi 30 kabupaten disajikan pada **Tabel 65**.

Tabel 65:
Daerah Tertinggal di Wilayah Papua Tahun 2015-2019

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Papua Barat	Teluk Wondama	16	Papua	Yahukimo
2	Papua Barat	Teluk Bintuni	17	Papua	Pegunungan Bintang
3	Papua Barat	Sorong Selatan	18	Papua	Tolikara
4	Papua Barat	Sorong	19	Papua	Keerom
5	Papua Barat	Tambrau	20	Papua	Waropen
6	Papua Barat	Maybrat	21	Papua	Supiori
7	Papua Barat	Manokwari Selatan	22	Papua	Mamberamo Raya
8	Papua Barat	Pegunungan Arfak	23	Papua	Nduga
9	Papua	Jayawijaya	24	Papua	Lanny Jaya
10	Papua	Nabire	25	Papua	Mamberamo Tengah
11	Papua	Paniai	26	Papua	Yalimo
12	Papua	Puncak Jaya	27	Papua	Puncak
13	Papua	Boven Digoel	28	Papua	Dogiyai
14	Papua	Mappi	29	Papua	Intan Jaya
15	Papua	Asmat	30	Papua	Deiyai

Provinsi Papua memiliki kabupaten daerah tertinggal terbanyak yaitu 22 kabupaten, sedangkan di Papua Barat sebanyak 8 kabupaten. Ketertinggalan daerah-daerah di wilayah Papua secara umum disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial, belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, tingginya persentase penduduk miskin, serta perekonomian masyarakat masih tertumpu pada sektor primer (seperti pertanian, perikanan dan kehutanan).

Gambaran umum daerah tertinggal di wilayah Papua disajikan pada **Tabel 66**, dengan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi daerah tertinggal, diantaranya adalah: IPM, PDRB Perkapita, tingkat pengangguran, dan kemiskinan, sesuai dengan ketersediaan data. Menurut data IPM tahun 2019, tingkat pembangunan sumberdaya manusia di 30 daerah tertinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan nilai IPM daerah tertinggal rata-rata di bawah IPM nasional (71,92) yang berkisar antara IPM tertinggi sebesar 68,53 (Kabupaten Nabire) dan terendah 30,75 (Nduga). Berdasarkan perhitungan reduksi *shortfall* pertahun (*annual reduction in shortfall*) yang mengindikasikan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai IPM ideal (IPM =100), hanya Kabupaten Sorong (1,73) dan Kabupaten Keerom (1,71) yang termasuk kategori cepat (>1,70), dan kabupaten lainnya termasuk kategori Menengah (1,5-1,7). Rendahnya IPM disebagian besar Provinsi Papua masih dibutuhkan upaya khusus untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya, misalnya di Kabupaten Nduga (IPM =30,75, dan

reduksi *shortfall* pertahun 1,63) akan dibutuhkan waktu selama 25 tahun untuk mencapai nilai IPM rata-rata Nasional (71,92).

Berdasarkan PDRB Perkapita (ADHB) pada tahun 2018, sebanyak 5 kabupaten daerah tertinggal memiliki PDRB perkapita di atas PDB perkapita nasional (Rp. 55,99 juta), yaitu Kabupaten Teluk Bintuni (Rp.457,55 juta) dan Kabupaten Sorong (Rp. 120, 58 juta) di Provinsi Papua Barat, dan di Provinsi Papua meliputi: Nabire (Rp. 70,18 juta), Boven Digul (Rp. 67,53 juta), Waropen (Rp. 62,60 juta), dan Membramo Raya (Rp. 63,71 juta). PDRB terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak (Rp. 6,2 juta) di Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Lanny Jaya (Rp. 9,4 juta). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2018, peningkatan PDRB tertinggi berada di Kabupaten Teluk Bintuni (Rp. 52,38 juta), Kabupaten Membramo Raya (15,63 juta).

Dilihat dari indikator kemiskinan semester 1 tahun 2020, seluruh kabupaten tertinggal berada di atas tingkat kemiskinan nasional (9,78%). Tingkat kemiskinan tertinggi kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat berada di Kabupaten Pegunungan Arfak (33,81%), dan Tambrauw (32,80%). Di Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Intan Jaya (40,71%), Kabupaten Deiyai (41,76%). Berdasarkan perkembangan pada periode 2015-2020, tingkat kemiskinan disebagian besar kabupaten menunjukkan penurunan, kecuali di kabupaten Keerom meningkat sebesar 0,49 persen, Nduga (0,83%), dan Mambramo Tengah (0,87%).

Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019, sebagian besar kabupaten memiliki TPT di bawah TPT nasional (5,01%), kecuali di Kabupaten Teluk Bintuni dengan TPT sebesar (8,03%) dan menunjukkan peningkatan sebesar 1,16 persen dibanding dengan tahun 2015, dan kabupaten Nabire (6,31%) walaupun telah berhasil menurunkan TPT sebesar 3,83 persen dari tahun 2015 (TPT 10,14%). Kabupaten lainnya yang mampu menurunkan TPT yang tinggi selama periode 2015-2019 adalah Kabupaten Supiori dengan TPT tahun 2019 (4,68%), berkurang sebesar 6,07 persen dibanding tahun 2015 (10,75%).

Tabel 66:
Karakteristik Daerah Tertinggal di Wilayah Papua Tahun 2015/2019/2020

Kabupaten	IPM			Persentase Penduduk Miskin (persen)			PDRB Perkapita (ribu Rp.)			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	2015	2019	Reduksi Shortfall	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2018**	Δ ('15-'18)	2015	2019	Δ ('15-'19)
PAPUA BARAT												
1. Teluk Wondama	56,64	59,82	1,65	37,44	30,91	-6,53	36.862	45.668	8.806	2,83	3,23	0,40
2. Teluk Bintuni	61,09	64,00	1,65	36,66	29,39	-7,27	405.168	457.551	52.383	6,87	8,03	1,16
3. Sorong Selatan	58,60	61,93	1,68	20,38	18,28	-2,10	31.078	38.303	7.225	2,87	3,80	0,93
4. Sorong	61,86	65,29	1,73	33,35	27,48	-5,87	112.453	120.578	8.125	5,66	2,94	-2,72
5. Tambrauw	49,77	52,90	1,58	38,11	32,80	-5,31	11.819	15.384	3.565	0,00	2,02	2,02
6. Maybrat	55,78	59,15	1,66	35,31	30,78	-4,53	13.006	16.883	3.877	4,01	0,47	-3,54
7. Manokwari Selatan	56,59	59,72	1,64	34,33	28,88	-5,45	27.761	32.135	4.374	4,18	2,44	-1,74
8. Pegunungan Arfak	53,73	56,15	1,51	38,53	33,81	-4,72	5.274	6.228	954	1,05	0,21	-0,84
PAPUA												

Kabupaten	IPM			Persentase Penduduk Miskin (persen)			PDRB Perkapita (ribu Rp.)			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	2015	2019	Reduksi Shortfall	2015	2020	Δ ('15-'20)	2015	2018**	Δ ('15-'18)	2015	2019	Δ ('15-'19)
9. Jayawijaya	54,18	57,79	1,68	39,48	37,22	-2,26	26.252	35.369	9.117	0,06	2,39	2,33
10. Nabire	66,49	68,53	1,57	24,37	24,15	-0,22	54.980	70.180	15.200	10,14	6,31	-3,83
11. Paniai	54,20	56,58	1,51	37,43	36,71	-0,72	17.760	22.532	4.772	0,83	0,66	-0,17
12. Puncak Jaya	44,87	48,33	1,58	37,45	34,74	-2,71	8.908	10.316	1.408	0,89	1,78	0,89
13. Boven Digoel	59,02	61,51	1,57	19,50	19,41	-0,09	56.274	67.526	11.252	5,35	3,08	-2,27
14. Mappi	56,11	58,30	1,49	26,96	25,04	-1,92	21.076	26.873	5.797	2,94	4,51	1,57
15. Asmat	46,62	50,37	1,63	28,48	25,49	-2,99	18.501	23.627	5.126	0,53	1,06	0,53
16. Yahukimo	46,63	49,25	1,49	41,26	37,34	-3,92	9.373	11.808	2.435	0,55	2,01	1,46
17. Pegunungan Bintang	40,91	45,21	1,64	31,55	30,15	-1,40	18.275	23.722	5.447	2,72	1,63	-1,09
18. Tolikara	46,38	49,68	1,58	34,00	32,04	-1,96	8.593	10.635	2.042	0,48	1,30	0,82
19. Keerom	63,43	66,59	1,71	15,83	16,32	0,49	39.484	48.422	8.938	4,19	2,90	-1,29
20. Waropen	62,35	65,34	1,68	31,41	29,54	-1,87	49.936	62.602	12.666	4,43	3,32	-1,11
21. Supiori	60,09	62,30	1,53	39,25	36,91	-2,34	42.163	47.299	5.136	10,75	4,68	-6,07
22. Mamberamo Raya	48,29	52,20	1,66	29,71	28,38	-1,33	48.079	63.709	15.630	3,15	3,00	-0,15
23. Nduga	25,47	30,75	1,63	35,89	36,72	0,83	8.580	11.469	2.889	2,70	1,03	-1,67
24. Lanny Jaya	44,18	48,00	1,62	41,97	38,13	-3,84	7.154	9.435	2.281	0,00	0,12	0,12
25. Mamberamo Tengah	43,55	47,23	1,60	35,54	36,41	0,87	17.392	22.469	5.077	0,00	0,71	0,71
26. Yalimo	44,32	48,08	1,61	35,88	32,82	-3,06	13.711	18.254	4.543	0,05	0,64	0,59
27. Puncak	39,41	42,70	1,53	38,74	36,96	-1,78	8.704	11.569	2.865	0,96	0,00	-0,96
28. Dogiyai	52,78	55,41	1,54	29,10	28,62	-0,48	9.711	12.501	2.790	0,77	0,11	-0,66
29. Intan Jaya	44,35	47,51	1,54	41,34	40,71	-0,63	19.428	24.252	4.824	0,00	0,00	0,00
30. Deiyai	48,28	50,11	1,37	45,74	41,76	-3,98	13.274	17.485	4.211	5,64	0,22	-5,42
INDONESIA	69,55	71,92	1,67	11,22	9,78	-1,44	45.120	55.987	10.867	5,81	5,01	-0,80

Sumber: Publikasi BPS, 2020

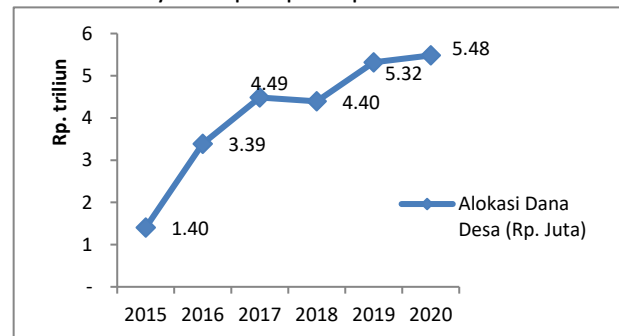
Keterangan: Kategori reduksi *shortfall* pertahun : (a) Sangat lambat jika : < 1,3; (b) Lambat jika : 1,3 – 1,5; (c). Menengah : 1,5 – 1,7; dan (d) Cepat jika : > 1,7.



Gambar 75:

Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Papua pada periode 2015-2019

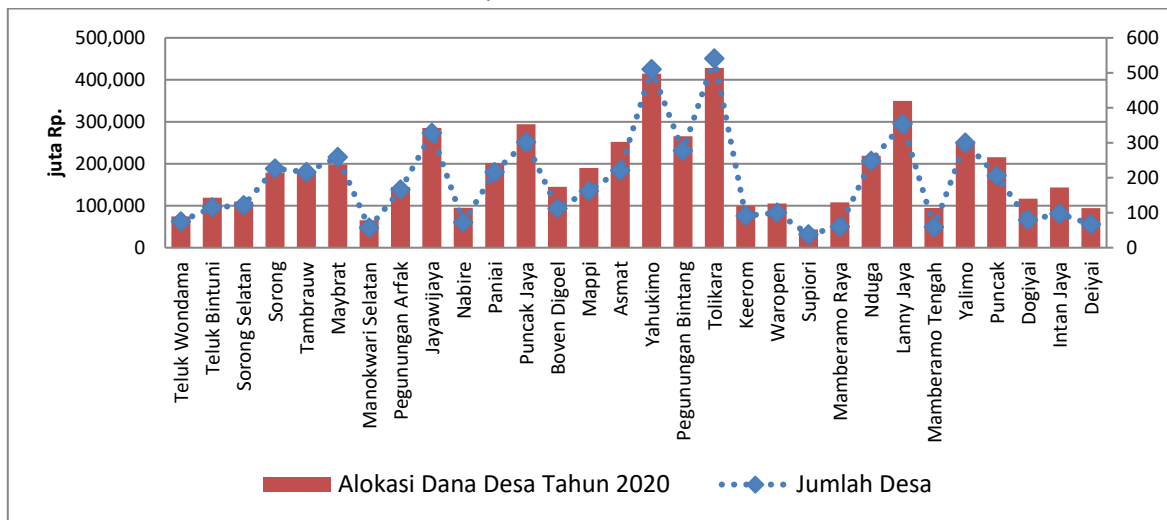
Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal di wilayah Papua, alokasi dana desa yang telah dikucurkan kepada kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat dan Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2015-2019. Pada tahun 2020 alokasi dana desa telah mencapai 5,48 triliun yang terbagi kepada 5.675 desa, dengan rata-rata perdesa sebesar 965,95 juta per desa.



Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Gambar 76:

Alokasi Dana Desa dan Jumlah Desa menurut Kabupaten Daerah Tertinggal di Wilayah Papua pada Tahun 2020.



Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Rincian pagu dana desa menurut kabupaten-kabupaten daerah tertinggal di wilayah Papua dapat dilihat pada **Tabel 67**, dimana Kabupaten Tolikara dengan jumlah desa terbanyak 541 desa memperoleh dana desa tertinggi sebanyak Rp. 428,17 miliar atau rata-rata perdesa sebesar Rp. 791,45 juta, kemudian Kabupaten Yahukimo dengan jumlah desa sebanyak 510 desa dengan total dana desa sebesar Rp. 414,66 miliar atau dengan rata-rata perdesa sebesar Rp. 813,05 juta.

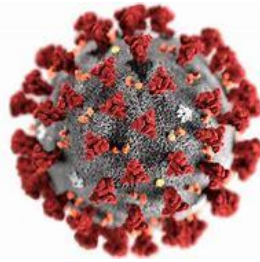
Tabel 67:

Perkembangan Alokasi Dana Desa untuk Daerah Tertinggal di Wilayah Papua Periode 2015-2019

No	Provinsi	Kabupaten	Jum Desa 2020	Pagu Dana Desa (juta Rp.)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Papua Barat	Teluk Wondama	75	21.383	47.933	61.650	60.809	70.929	74.356
2	Papua Barat	Teluk Bintuni	115	33.759	73.378	93.230	95.890	112.647	119.058
3	Papua Barat	Sorong Selatan	121	33.144	74.374	94.629	90.957	105.648	109.874
4	Papua Barat	Sorong	226	31.302	135.315	172.570	169.165	175.045	178.784
5	Papua Barat	Tambrauw	216	57.246	131.344	166.519	156.934	176.970	178.556
6	Papua Barat	Maybrat	259	68.584	154.133	195.228	176.533	197.467	198.083

No	Provinsi	Kabupaten	Jum Desa 2020	Pagu Dana Desa (juta Rp.)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Papua Barat	Manokwari Selatan	57	-	-	47.765	50.829	60.747	65.446
8	Papua Barat	Pegunungan Arfak	166	-	-	128.527	124.043	139.458	144.742
9	Papua	Jayawijaya	328	87.553	196.371	251.286	240.933	280.676	285.538
10	Papua	Nabire	72	21.743	48.641	61.576	76.885	90.739	95.104
11	Papua	Paniai	216	23.764	132.514	168.913	173.405	195.984	201.535
12	Papua	Puncak Jaya	302	82.653	185.439	236.772	243.550	280.489	294.087
13	Papua	Boven Digoel	112	33.879	75.955	96.872	107.926	136.207	145.036
14	Papua	Mappi	162	46.667	104.402	132.036	135.265	180.923	190.126
15	Papua	Asmat	221	62.684	140.449	178.815	184.603	246.961	252.162
16	Papua	Yahukimo	510	134.055	300.501	384.055	357.953	405.938	414.658
17	Papua	Pegunungan Bintang	277	76.822	172.279	219.396	219.019	253.279	265.579
18	Papua	Tolikara	541	142.664	320.044	406.528	365.436	419.512	428.173
19	Papua	Keerom	91	26.383	59.802	75.538	85.103	99.459	99.459
20	Papua	Waropen	100	28.568	64.138	81.866	83.950	102.972	105.325
21	Papua	Supiori	38	12.132	27.250	33.863	34.106	42.262	43.758
22	Papua	Mamberamo Raya	60	22.577	51.001	64.891	73.626	98.811	108.191
23	Papua	Nduga	248	67.356	151.118	192.816	177.338	214.316	219.137
24	Papua	Lanny Jaya	354	94.956	213.087	270.406	246.394	349.888	349.888
25	Papua	Mamberamo Tengah	59	20.345	45.721	58.176	64.303	88.551	94.756
26	Papua	Yalimo	300	80.810	181.971	230.608	209.824	243.262	249.870
27	Papua	Puncak	206	27.550	132.588	168.803	166.579	205.140	215.638
28	Papua	Dogiyai	79	23.830	53.465	67.066	69.721	113.380	116.909
29	Papua	Intan Jaya	97	30.655	69.081	86.945	92.187	136.334	143.526
30	Papua	Deiyai	67	10.902	45.390	57.781	62.045	93.083	94.432
		TOTAL	5.675	1.403.967	3.387.686	4.485.127	4.395.308	5.317.077	5.481.788

Sumber Data: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

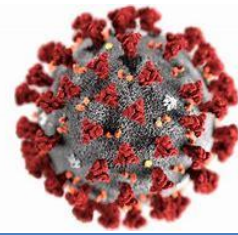


Perkembangan Penyebaran COVID-19 dan Dampak Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat.

- ❖ Penduduk wilayah Papua yang telah terkonfirmasi terjangkit COVID-19 mencapai 14.728 orang atau 2,96 persen dari total penduduk Indonesia yang terkonfirmasi, dan yang meninggal sebanyak 215 orang (1,38%).
- ❖ Penyebaran antarprovinsi, tertinggi di Provinsi Papua sebanyak 9.759 orang (66,26%) dan yang meninggal sebanyak 139 orang (64,65%), sedangkan di Provinsi Papua Barat terkonfirmasi sebanyak 4.969 orang (33,74%) dan meninggal sebanyak 76 orang (35,35%).
- ❖ Selama periode Februari-Agustus 2020, peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Papua sebesar 9.400 orang, dan Provinsi Papua Barat (3.460 orang). Berdasarkan perkembangan TPT, di Provinsi Papua meningkat sebesar 0,66 persen menjadi 4,28 persen, dan Provinsi Papua Barat meningkat sebesar 0,60 persen menjadi 6,80 persen.
- ❖ Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua pada Triwulan II 2020 berkontraksi di angka -2,86 persen (yoy) menurun cukup tajam dibandingkan Triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 6,57 persen (yoy),
- ❖ Menurunnya kinerja ekonomi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa perusahaan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- ❖ Pada Triwulan III 2020, dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian wilayah Papua berkontraksi lebih dalam dengan angka pertumbuhan -3,88 persen (yoy), dan diantaranya disebabkan sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh di angka -40,21 persen
- ❖ Realisasi PMDN dan PMA Triwulan II 2020 di Provinsi Papua Barat dan Papua cenderung mengalami sedikit penurunan dibandingkan nilai realisasi PMDN Triwulan I 2020.

07

Penyebaran COVID-19 dan Dampak Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat



7.1. Penyebaran COVID-19

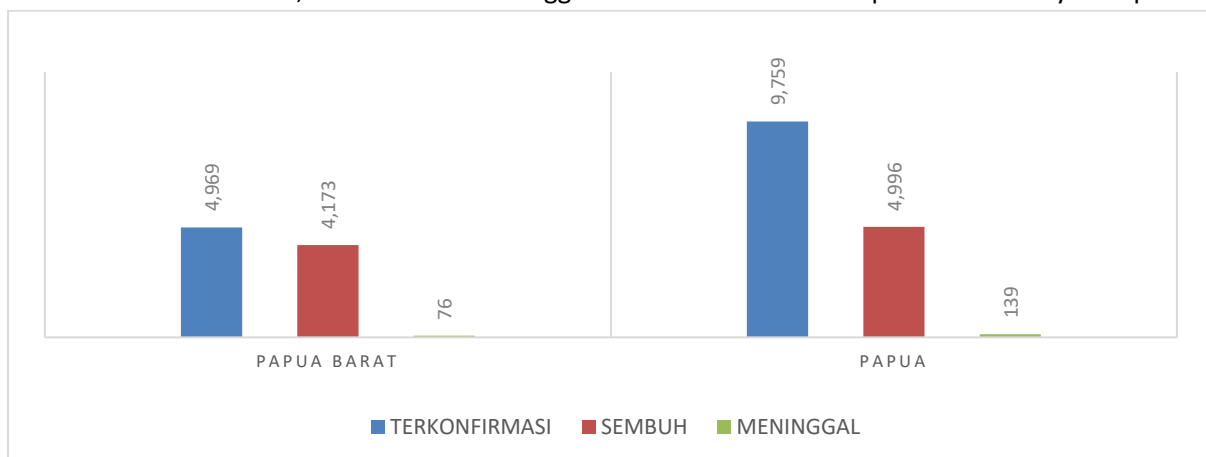
Pandemi Coronavirus jenis baru, telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Coronavirus tersebut, ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Gejala umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID19.

Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularan, serta jenis vaksin yang tepat. Berdasarkan perkembangan COVID-19 di Indonesia hingga November 2019, akan terus bertambah hingga proses vaksinasi yang tepat dapat diaplikasikan kepada penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang tersedia hingga awal bulan November 2019, dapat digambarkan penyebaran wabah di masyarakat yang berada di wilayah Papua berdasarkan jumlah terkonfirmasi (terinfeksi), Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19.

Gambar 68:

Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Papua



Sumber: www.covid19.go.id last update: 24-11-2020

Penduduk wilayah Papua yang telah terkonfirmasi terjangkit COVID-19 mencapai 14.728 orang atau 2,96 persen dari total penduduk Indonesia yang terkonfirmasi, dan yang meninggal sebanyak 215 orang (1,38%). Penyebaran antarprovinsi, tertinggi di Provinsi Papua sebanyak 9.759 orang (66,26%) dan yang meninggal sebanyak 139 orang (64,65%). Sedangkan di Provinsi Papua Barat terkonfirmasi sebanyak 4.969 orang (33,74%) dan meninggal sebanyak 76 orang (35,35%).

Tabel 77:

Jumlah Terkonfirmasi, Sembuh dan Meninggal Akibat COVID-19 Antarprovinsi di Wilayah Papua

Provinsi	Terkonfirmasi		Sembuh		Meninggal	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
Papua Barat	4.969	33,74	4.173	45,51	76	35,35
Papua	9.759	66,26	4.996	54,49	139	64,65
PAPUA	14.728	100,00	9.169	100,00	215	100,00

Sumber: www.covid19.go.id last update: 24-11-2020

Berdasarkan data yang tersedia hingga awal November 2019, dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 terhadap masyarakat wilayah Papua dapat diinformasikan sebagai berikut:

7.2. Dampak Covid 19 Terhadap Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data terakhir pengangguran terbuka pada periode Februari - Agustus 2020, dapat diindikasikan adanya dampak Pandemi Covid 19 terhadap peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah Papua. Dampak tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di wilayah Papua sebanyak 12,87 ribu orang, dengan peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Papua sebesar 9,40 ribu orang, dan Provinsi Papua Barat (3,46 ribu orang). Berdasarkan perkembangan TPT pada bulan Februari-Agustus 2020, Provinsi Papua (4,28%) dan Papua Barat (6,80%) menunjukkan peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran terbuka, dengan peningkatan TPT di Provinsi Papua sebesar 0,66 persen, dan Provinsi Papua Barat sebesar 0,60 persen.

Tabel 78:

Perkembangan Pengangguran Terbuka pada Periode Februari dan Agustus 2020.

Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka (ribu orang)			Tingkat Pengangguran terbuka (%)		
	Feb 2020	Ags 2020	Δ Feb-Ags 2020	Feb 2020	Ags 2020	Δ Feb-Ags 2020
Papua Barat	30,04	33,50	3,46	6,20	6,8	0,60
Papua	66,30	75,70	9,40	3,62	4,28	0,66
PAPUA	96,34	109,20	12,87	4,16		-4,16

Sumber: Publikasi BPS, Data Sosial Ekonomi November 2020

7.3. Dampak Covid 19 terhadap Perekonomian Daerah

Pandemi Covid 19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kinerja perekonomian hampir disebagian besar wilayah di Indonesia. Pada Triwulan II 2020 dengan semakin meluasnya dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan pada kinerja perekonomian daerah yang cenderung menurun. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi, investasi, dan menurunnya tingkat daya beli masyarakat di berbagai daerah.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua pada Triwulan II 2020 berkontraksi di angka -2,86 persen (yoy) menurun cukup tajam dibandingkan Triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 6,57 persen (yoy), (**Gambar 69**). Menurunnya kinerja ekonomi ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa perusahaan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, masing-masing pertumbuhan sektor berkontraksi pada angka pertumbuhan negatif di Triwulan II 2020. Sebaliknya sektor pertambangan dan penggalian masih mampu tumbuh positif di angka 22,85 persen meningkat cukup tajam dibandingkan Triwulan yang sama pada 2019 yaitu sekitar -50 persen (**Gambar 70**). Pada Triwulan III 2020, kondisi pandemi Covid masih mewarnai kinerja ekonomi daerah, tercatat perekonomian wilayah Papua berkontraksi lebih dalam dengan angka pertumbuhan -3,88 persen (yoy), dimana pertumbuhan sektor berkontraksi lebih mendalam dari pertumbuhan di Triwulan II 2020, seperti sektor transportasi dan pergudangan tumbuh di angka -40,21 persen dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh di angka 18,97 persen (**Gambar 70**).

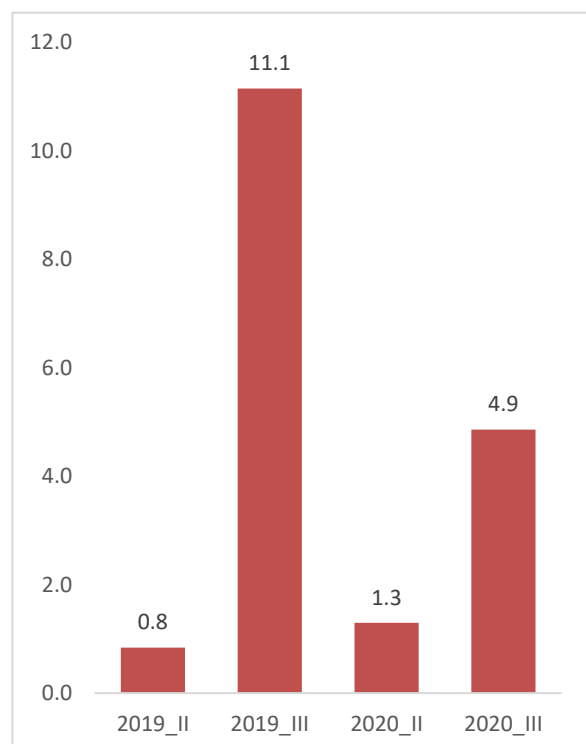
Gambar 69:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III Wilayah Papua Tahun 2019 dan 2020

Pertumbuhan Ekonomi (Y-o-Y) 2019 dan 2020



Pertumbuhan Ekonomi (Q-t-Q) 2019 dan 2020

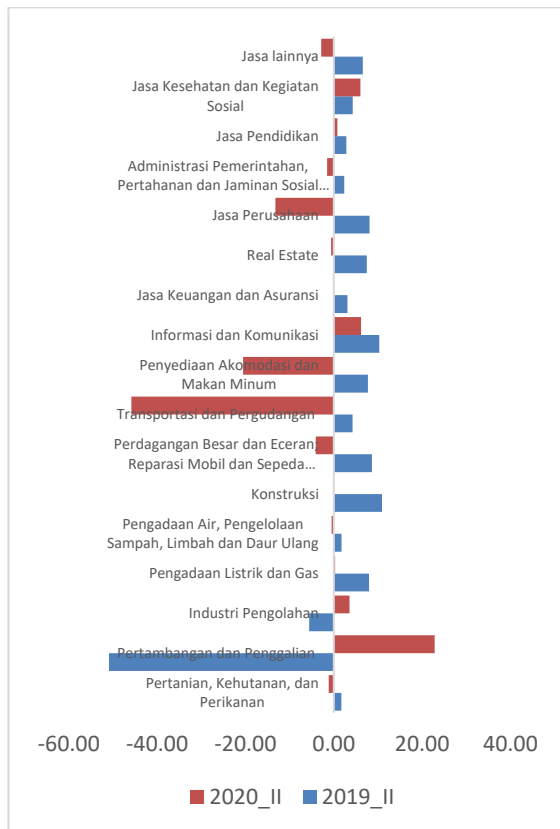


Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

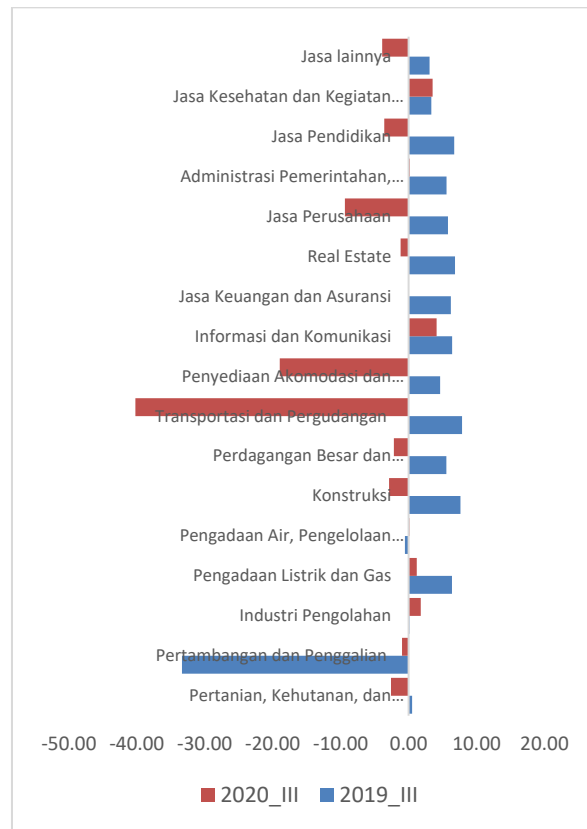
Gambar 70:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha di Wilayah Papua

Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2020 terhadap Triwulan II 2019 (Y-o-Y)



Pertumbuhan PDRB Triwulan III 2020 terhadap Triwulan III 2019 (Y-o-Y)

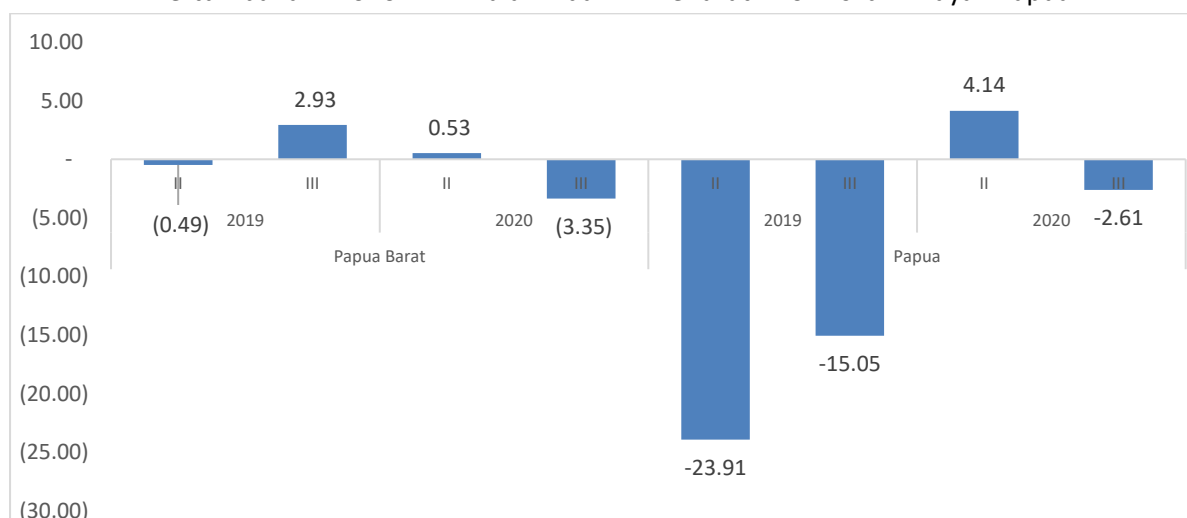


Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Sementara dilihat dari kinerja ekonomi provinsi masing-masing provinsi, Provinsi Papua Barat dan Papua pada Triwulan II 2020 tumbuh positif yaitu masing-masing tumbuh sebesar 0,53 persen dan 4,14 persen lebih tinggi dibandingkan kinerja ekonomi pada Triwulan II 2019. Pandemi covid-19 ini pada Triwulan II 2020 belum berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi Papua dan Papua Barat. Penyebaran Covid-19 mulai mewarnai terhadap kinerja ekonomi wilayah Papua pada Triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dan Papua berkontraksi masing-masing di angka -3,35 persen dan -2,61 persen (**Gambar 71**). Menurunnya kinerja ekonomi Triwulan III 2020 di provinsi Papua Barat sejalan dengan menurunnya kinerja pertumbuhan hampir semua sektor mengalami kontraksi dengan angka pertumbuhan negatif, seperti sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sekitar -6,46 persen, sektor konstruksi berkontraksi di angka -8,92 persen, sektor perdagangan besar dan eceran berkontraksi di angka -2,01 persen (**Tabel 79**). Hal yang sama untuk kinerja ekonomi Provinsi Papua menurun sejalan dengan menurunnya kinerja sektor, hampir seluruh sektor ekonomi tumbuh negatif pada Triwulan III 2020 dibandingkan Triwulan II 2019, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, dan jasa kesehatan masih mampu tumbuh positif di Triwulan III 2020 (**Tabel 79**).

Gambar 71:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Provinsi di Wilayah Papua



Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Tabel 79:

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II dan III menurut Lapangan Usaha dan Provinsi di Wilayah Papua

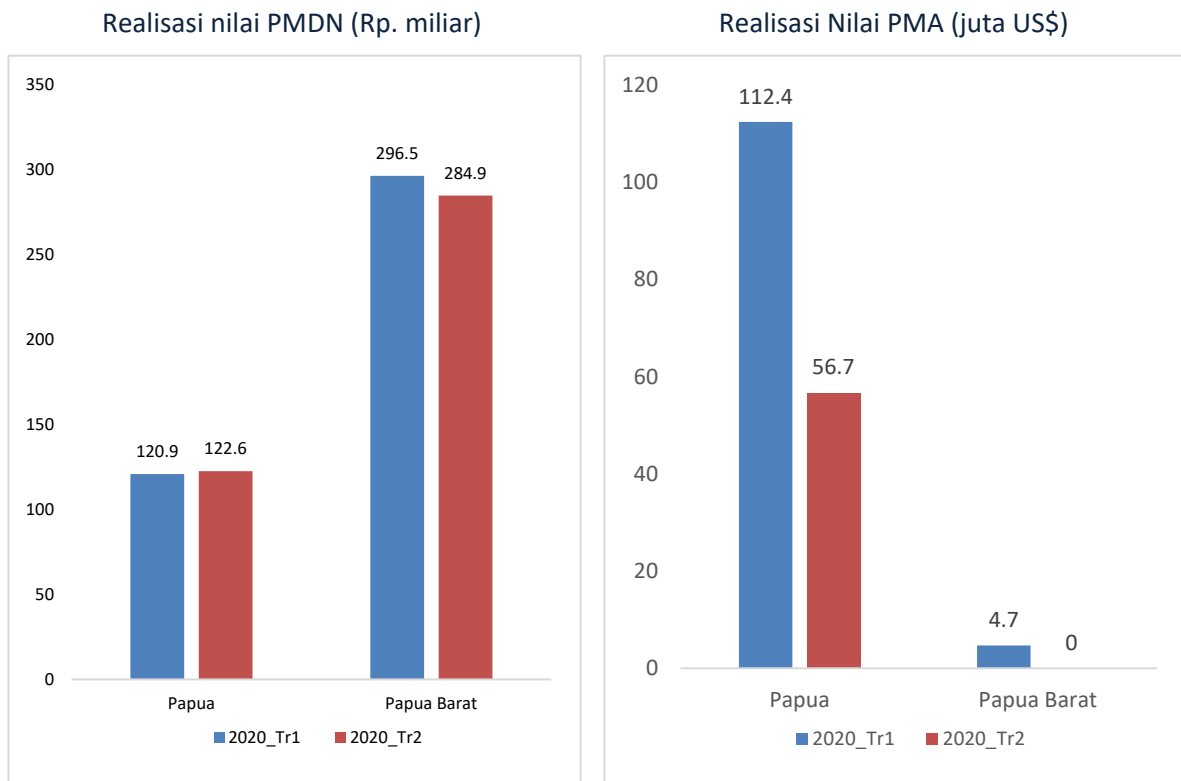
Lapangan Usaha	Papua Barat				Papua			
	2019		2020		2019		2020	
	II	III	II	III	II	III	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.31	2.57	0.14	(7.52)	1.12	-0.25	-1.62	-0.71
Pertambangan dan Pengalihan	(6.59)	(0.42)	1.07	(6.46)	-57.48	-38.31	29.92	0.36
Industri Pengolahan	(6.65)	0.52	5.04	2.96	1.16	-2.44	-5.08	-5.86
Pengadaan Listrik dan Gas	8.80	9.62	7.47	10.23	7.64	5.04	-2.70	-2.67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.09	7.26	4.34	0.16	-0.93	-6.86	-4.60	0.06
Konstruksi	7.86	8.41	(2.34)	(8.92)	12.32	7.29	1.10	-0.15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.98	8.82	1.40	(2.01)	8.85	4.55	-5.82	-2.23
Transportasi dan Pergudangan	7.36	8.15	(28.60)	(27.02)	3.56	7.80	-49.90	-43.29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.03	6.37	(8.34)	(8.28)	7.63	4.09	-24.43	-22.40
Informasi dan Komunikasi	12.49	9.96	9.82	9.91	9.82	5.67	5.35	2.87
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.13	7.71	0.05	10.64	0.46	5.68	-0.17	-4.07
Real Estate	9.21	8.32	(1.56)	(4.54)	7.14	6.54	-0.42	-0.51
Jasa Perusahaan	4.92	6.30	(4.92)	(6.91)	8.20	5.79	-13.53	-9.48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.41	2.24	(3.86)	(4.69)	1.98	6.97	-0.61	2.08
Jasa Pendidikan	3.42	2.78	(2.51)	(5.46)	2.55	8.64	2.37	-2.72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.74	3.27	10.52	6.35	4.76	3.37	5.17	2.98
Jasa lainnya	3.47	3.59	(2.63)	(1.86)	6.88	3.03	-2.88	-4.08
TOTAL	(0.49)	2.93	0.53	(3.35)	-23.91	-15.05	4.14	-2.61

Sumber: Publikasi BPS, Tahun 2020

Perkembangan realisasi investasi di masa pandemic Covid-19 di wilayah Papua, tercatat untuk nilai realisasi PMDN Triwulan II 2020 di Provinsi Papua Barat dan Papua cenderung mengalami sedikit penurunan dibandingkan nilai realisasi PMDN Triwulan I 2020. Hal yang sama untuk nilai realisasi PMA, terjadi penurunan baik di Provinsi Papua Barat maupun di Papua, penurunan cukup tajam terjadi di Provinsi Papua yaitu pada Triwulan I sebesar 112,4 juta US\$ menurun menjadi 56,7 juta US\$ di Triwulan II 2020 (**Gambar 72**).

Gambar 72:

Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Triwulan I dan II menurut Provinsi di Wilayah Papua



Sumber: Publikasi BKPM, Tahun 2020